

**ASPEK DASAR SOSIAL-EKONOMI TERUMBU
KARANG DAN EKOSISTEM TERKAIT
DI LOKASI COREMAP-CTI
KABUPATEN BUTON SELATAN :
Desa Tongali Kecamatan Sioumpu,
Desa Lalole, Kecamatan Sioumpu Barat**

Oleh:
**Andi Adri Arief
Haslinda**



**Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP CTI – LIPI)
Jakarta, 2016**



KATA PENGANTAR

Dalam upaya pengelolaan sumber daya laut, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan suatu program yang dikenal dengan COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). COREMAP adalah program nasional untuk upaya rehabilitasi, konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Program COREMAP tersebut dirancang dalam 3 (tiga) fase: Fase I mulai tahun 1998-2004 merupakan fase Inisiasi; Fase II adalah fase Akselerisasi yang programnya dimulai pada tahun 2005 sampai dengan 2011; dan Fase ke III adalah fase Penguatan Kelembagaan yang pelaksanaannya dirancang mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. COREMAP fase III disejalankan dengan program nasional dan regional tentang pengelolaan terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang dunia yang dikenal dengan *Coral Triangle Initiative* (CTI), sehingga COREMAP Fase III selanjutnya disebut dengan COREMAP - CTI. Tujuan COREMAP-CTI adalah melakukan pengelolaan sumber daya terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Lokasi program COREMAP- CTI di 7 kabupaten wilayah Indonesia bagian timur dan 7 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat.

Pemahaman aspek sosial ekonomi masyarakat sangat diperlukan untuk merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi suatu program pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu, sebelum COREMAP - CTI dilaksanakan, dilakukan riset sosial ekonomi untuk mengumpulkan data dasar (*baseline data*) di lokasi program dan kontrol. Data dasar sosial ekonomi ini diperlukan sebagai dasar dan masukan-masukan dalam merancang program dan merupakan titik awal (T0) yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum adanya intervensi dari program yang akan dilakukan.

Buku laporan ini berisi data dasar dan kajian tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait di Kabupaten Buton Selatan. Data dasar tentang aspek sosial-ekonomi penduduk ini merupakan bahan yang dapat dipakai

oleh para perencana, pengelola dan pelaksana dalam merancang, melaksanakan dan memantau program COREMAP - CTI. Di samping itu, data dasar ini juga dapat digunakan oleh *stakeholders (users)* sebagai bahan pembelajaran dalam pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan melibatkan berbagai pihak. Kepada para informan: masyarakat nelayan, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat dan kelompok perempuan di lokasi baseline Desa Tongali, Kecamatan Siompu dan Desa Lalole Kecamatan Sioumpu Barat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton Selatan serta narasumber dari unsur yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, November 2016

Drs Susetiono, MSc
Ketua NPIU COREMAP- CTI LIPI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Metodologi.....	6
1.3.1 Pengumpulan Data	6
1.3.2 Analisis Data	8
1.4 Pembabakan Penulisan.....	9
BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN.....	10
2.1 Keadaan Geografis	10
2.1.1 Gambaran di Kabupaten Buton Selatan	10
2.1.2 Gambaran di Kawasan Kecamatan Siompu	12
2.1.3 Gambaran di Kawasan Kecamatan Siompu Barat	14
2.1.4 Gambaran di Desa Penelitian.....	15
2.2 Keadaan Sumber Daya Alam	17
2.2.1 Sumber Daya Laut	17
2.2.2 Sumber Daya Darat.....	32
2.3 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	39
2.3.1 Sarana Transportasi	39
2.3.2 Sarana Perikanan	40
2.3.3 Sarana Ekonomi	42
2.3.4 Sarana Pendidikan.....	44
2.3.5 Sarana Kesehatan.....	47
2.3.6 Sarana Air Bersih dan MCK.....	48
2.3.7 Sarana Penerangan dan Informasi	50
2.4 Kelembagaan Sosial	51
2.4.1 Desa Tongali	51
2.4.2 Desa Lalole.....	53

2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat	54
2.6	Pengelolaan Sumber Daya Laut	55
2.6.1	<i>Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Dua Wilayah Studi</i>	<i>56</i>
2.6.2	<i>Konservasi Sumber Daya Laut di Dua Wilayah Studi.....</i>	<i>59</i>
BAB III POTRET PENDUDUK.....		66
3.1	Jumlah dan Komposisi	66
3.1.1	<i>Jumlah dan Karakteristik Penduduk.....</i>	<i>66</i>
3.1.2	<i>Jumlah dan Komposisi Penduduk di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat</i>	<i>67</i>
3.2	Kualitas Sumber Daya Manusia	71
3.2.1	<i>Pendidikan dan Keterampilan</i>	<i>72</i>
3.2.2	<i>Pekerjaan.....</i>	<i>75</i>
3.3	Kesejahteraan.....	83
3.3.1	<i>Pemilikan dan penguasaan Aset Produksi dan Non Produksi</i>	<i>83</i>
BAB IV PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PENDUDUK.....		86
4.1	Pendapatan di Tingkat Kabupaten.....	86
4.1.1	<i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....</i>	<i>86</i>
4.1.2	<i>Pendapatan Sektor Pertanian/Perikanan.....</i>	<i>87</i>
4.2	Pendapatan di Lokasi Survei	89
4.2.1	<i>Pendapatan Per Tahun/Bulan Menurut Sumber Pendapatan</i>	<i>89</i>
4.2.2	<i>Pendapatan Nelayan.....</i>	<i>94</i>
4.3	Pengeluaran Rumah Tangga.....	98
4.4	Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Buton Selatan.....	102
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT		104
5.1	Faktor Internal.....	104
5.1.1	<i>Sumber Pendapatan.....</i>	<i>104</i>
5.1.2	<i>Teknologi Alat Tangkap/Produksi dan Wilayah Tangkap....</i>	<i>104</i>
5.1.3	<i>Biaya Produksi</i>	<i>107</i>
5.1.4	<i>Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	<i>108</i>
5.2	Faktor Eksternal	109
5.2.1	<i>Pemasaran: Harga dan Pemasaran.....</i>	<i>109</i>
5.2.2	<i>Musim/Iklim.....</i>	<i>111</i>
5.3	Faktor Struktural (Program Wilayah Pesisir dan Laut serta Program Pembangunan Lainnya).....	113

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	115
6.1 Kesimpulan	115
6.2 Rekomendasi.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
TABEL 2.1-1.	GAMBARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN	11
TABEL 2.1-2.	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN SETIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN	11
TABEL 2.1-3.	LUAS WILAYAH DAN PERSENTASENYA TIAP DESA/KELURAHAN TAHUN 2013	14
TABEL 2.2-1.	PERSENTASE TUTUPAN KARANG TINGKAT KABUPATEN SELATAN	20
TABEL 2.2-2.	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015	21
TABEL 2.2-3.	INTESITAS BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI PERAIRAN PESISIR KABUPATEN BUTON SELATAN	24
TABEL 2.2-4.	PERSENTASE TINGKAT TUTUPAN KARANG DI KECAMATAN SIOMPU	27
TABEL 2.2-5.	JENIS TUTUPAN LAHAN DAN LUASANNYA	32
TABEL 2.2-6.	SUMBER DAYA ALAM DAN PEMANFAATANNYA DI DESA TONGALI	34
TABEL 2.2-7.	SUMBER DAYA ALAM DAN PEMANFAATANNYA DI DESA TONGALI	37
TABEL 2.3-1.	PROFIL TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA LALOLE	46
TABEL 2.3-2.	PERSENTASE DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 7 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016	46
TABEL 2.3-3.	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN DI DESA TONGALI	47
TABEL 2.6-1	KALENDER MUSIM PENANGKAPAN IKAN DI DESA TONGALI	57
TABEL 2.6-2.	KALENDER MUSIM PENANGKAPAN IKAN DI DESA LALOLE	59
TABEL 3.1-1.	JUMLAH PENDUDUK TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN	66
TABEL 3.1-2.	JUMLAH PENDUDUK, RUMAH TANGGA, ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN KEPADATAN MENURUT DESA DI KECAMATAN SIOMPU, KABUPATEN BUTON SELATAN	68

TABEL 3.1-3. JUMLAH PENDUDUK, RUMAH TANGGA, ANGGOTA RUMAH TANGGA DAN KEPADATAN MENURUT DESA DI KECAMATAN SIOMPU BARAT, KABUPATEN BUTON SELATAN	69
TABEL 3.1-4. DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI LOKASI PENELITIAN,	70
TABEL 3.2-1. JUMLAH MURID YANG LULUS UJIAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	72
TABEL 3.2-2. JUMLAH MURID YANG LULUS UJIAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	73
TABEL 3.2-3. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 7 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKANDI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016	74
TABEL 3.2-4. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016.....	76
TABEL 3.2-5. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (PERSENTASE)	77
TABEL 3.2-6. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 (PERSENTASE)	79
TABEL 3.2-7. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016.....	80
TABEL 3.2-8. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016.....	82
TABEL 3.3-1. DISTRIBUSI RUMAH TANGGA TERPILIH MENURUT KEPEMILIKAN ALAT/SARANA PRODUKSI DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016.....	83

TABEL 3.3-2. STATISTIK KEPEMILIKAN BARANG-BARANG BERHARGA RUMAH TANGGA TERPILIH DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016.	84
TABEL 4.1-1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2014-2015	86
TABEL 4.1-2. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015	87
TABEL 4.1-3. PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PER KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2008 - 2014	88
TABEL 4.2-1. STATISTIK PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (RUPIAH)	90
TABEL 4.2-2. DISTRIBUSI RUMAH TANGGA MENURUT BESAR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PER BULAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016. (PERSENTASE)	91
TABEL 4.2-3. RATA-RATA PENDAPATAN RUMAH TANGGA PER BULAN MENURUT SUMBER PENDAPATAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (RUPIAH)	93
TABEL 4.2-4. STATISTIK PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN DARI PERIKANAN TANGKAP, DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (RUPIAH)	94
TABEL 4.2-5. DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI PERIKANAN TANGKAP DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN .BUTON SELATAN, TAHUN 2016. (PERSENTASE)	95
TABEL 4.2-6. STATISTIK PENDAPATAN RATA-RATA RUMAH TANGGA NELAYAN DARI PERIKANAN TANGKAP MENURUT MUSIM DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 (RUPIAH)	97
TABEL 4.2-7. DISTRIBUSI RUMAH TANGGA NELAYAN MENURUT BESAR PENDAPATAN PER MUSIM DARI PERIKANAN TANGKAP, DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN 2016. (PERENTASE)	98
TABEL 4.3-1. STATISTIK PENGELUARAN RUMAH TANGGA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 (RUPIAH)	99

TABEL 4.3-2. DISTRIBUSI RUMAH TANGGA MENURUT BESAR PENGELUARAN RUMAH TANGGA PER BULAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016. (PERSENTASE)	100
TABEL 4.3-3. RATA-RATA PENGELUARAN RUMAH TANGGA MENURUT PENGGUNAAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (RUPIAH).....	101
TABEL 4.3-4. RATA-RATA PENGELUARAN RUMAH TANGGA MENURUT PENGGUNAAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016	101
TABEL 4.4-1. RATAAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) DI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016	103
TABEL 5.1-1. JUMLAH ALAT TANGKAP DI KECAMATAN SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN (UNIT)	105
TABEL 5.1-2. PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI KECAMATAN SIOMPU KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015.....	106

DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
GAMBAR 1.1-1.	PETA LOKASI-LOKASI COREMAP-CTI DI SELURUH INDONESIA	3
GAMBAR 2.1-1.	PERSENTASE LUAS PER DESA/KELURAHAN.....	13
GAMBAR 2.1-2.	PANTAI BERPASIR DAN BERBATU DI PULAU SIOMPU	13
GAMBAR 2.1-3.	PEMANDANGAN KECAMATAN SIOMPU BARAT DI LIHAT DARI KETINGGIAN DAN DARI LAUT.....	15
GAMBAR 2.2-1.	JUMLAH NELAYAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN	22
GAMBAR 2.2-2.	JUMLAH ALAT TANGKAP IKAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015	23
GAMBAR 2.2-3.	JENIS IKAN YANG DOMINAN TERTANGKAP DI KABUPATEN BUTON SELATAN	23
GAMBAR 2.2-4.	DIAGRAM JUMLAH INDIVIDU LAMUN PERSATUAN HEKTAR DI KECAMATAN SIOMPU	25
GAMBAR 2.2-5.	PERSENTASE MASING-MASING JENIS LAMUN DI KECAMATAN SIOMPU	26
GAMBAR 2.2-6.	PERSENTASE RATA-RATA TUTUTPAN KARANG DI KECAMATAN SIOMPU	28
GAMBAR 2.2-7.	PERSENTASE MASING-MASING JENIS LAMUN KEC.SIOMPU BARAT	29
GAMBAR 2.2-8.	DIAGRAM JUMLAH INDIVIDU LAMUN PERSATUAN HEKTAR KECAMATAN SIOMPU BARAT	30
GAMBAR 2.2-9.	PERSENTASE TUTUPAN KARANG DI KECAMATAN SIOMPU BARAT	31
GAMBAR 2.2-10.	KASUAMI YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEBAGAI MAKANAN KHAS DI DESA TONGALI	34
GAMBAR 2.2-11.	KONDISI LAHAN YANG BERBATU DAN USAHA PECAHAN BATU SEBAGAI PENDAPATAN ALTERNATIF MASYARAKAT	37
GAMBAR 2.3-1.	AKTIVITAS MASYARAKAT DI PELABUHAN SIOMPU DI KECAMATAN SIOMPU	39
GAMBAR 2.3-2.	PELABUHAN DI DESA LALOE KECAMATAN SIOMPU BARAT..	40
GAMBAR 2.3-3.	SARANA PERIKANAN TANGKAP DI DESA TONGALI	41
GAMBAR 2.3-4.	SARANA PERIKANAN TANGKAP DI DESA LALOLE	42
GAMBAR 2.3-5.	SARANA PEREKONOMIAN (PASAR, TPI DAN DEPO PENJUALAN PREMIUN) DI DESA TONGALI	43
GAMBAR 2.3-6.	INFRASTRUKTUR PASAR DAN INSTALASI LISTRIK KE RUMAH-RUMAH PENDUDUK DI DESA LOLOLE	44

GAMBAR 2.3-7. PERSENTASE PARTISIPASI WARGA DALAM BIDANG PENDIDIKAN	45
GAMBAR 2.3-8. SUMUR WARGA DI DESA TONGALI	49
GAMBAR 2.3-9. SUMUR WARGA DI DESA LALOLE DENGAN FASILITAS PENAMPUNGAN AIR	49
GAMBAR 2.3-10. FASILITAS LISTRIK TENAGA SURYA DI WARGA DAN USAHA PENJUALAN PULSA TELEPON SATELIT	50
GAMBAR 2.4-1. <i>BARUGA PARABELLA</i> BAGI MASYARAKAT DESA TONGALI YANG TERLETAK	52
GAMBAR 2.4-2. <i>BARUGA PARABELLA</i> DI DESA LALOLE	53
GAMBAR 2.6-1. PENGGALIAN INFORMASI DAERAH FISHING GROUND NELAYAN DI DESA TONGALI	58
GAMBAR 2.6-2. RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BUTON SELATAN.....	60
GAMBAR 2.6-3. PETA ZONA INTI KKPD BUTON SELATAN.....	62
GAMBAR 2.6-4. PETA ZONA PENYANGGAH KKPD BUTON SELATAN	63
GAMBAR 2.6-5. DAERAH PERLINDUNGAN LAUT PASI KALIMONDA DI DESA TONGALI.....	64
GAMBAR 2.6-6. DAERAH PERLINDUNGAN LAUT PASI LALOLE DI DESA LALOLE.....	64
GAMBAR 3.1-1. DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (PERSENTASE).....	71
GAMBAR 3.2-1. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 7 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016	75
GAMBAR 3.2-2. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016	76
GAMBAR 3.2-3. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJAMENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (PERSENTASE)	78
GAMBAR 3.2-4. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 (PERSENTASE)	79
GAMBAR 3.2-5. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (PERSENTASE)	81

GAMBAR 3.2-6. DISTRIBUSI PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN TAMBAHAN UTAMA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 (PERSENTASE)	82
GAMBAR 4.2-1. DISTRIBUSI RUMAH TANGGA MENURUT BESAR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PER BULAN KABUPATEN BUTON SELATAN,TAHUN 2016. (PERSENTASE).....	92
GAMBAR 4.2-2. DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA DI LOKASI PENELITIAN, KABUPATEN .BUTON SELATAN, TAHUN 2016 (PERSENTASE).....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Dokumentasi FGD (Nelayan dan Tokoh Masyarakat) Desa Tongali Kecamatan Siompu
- Lampiran 2** Dokumentasi FGD (Ibu-Ibu Rumah Tangga) Desa Tongali Kecamatan Siompu
- Lampiran 3** Dokumentasi FGD (Nelayan dan Tokoh Masyarakat) Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat
- Lampiran 4** Dokumentasi FGD (Ibu Rumah Tangga) Desa Tongali Kecamatan Siompu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang dilaksanakan dan didanai oleh Asian Development Bank (ADB) untuk Kawasan Indonesia Barat dan World Bank (WB) untuk Kawasan Indonesia Timur, merupakan program lanjutan dari program COREMAP-II. COREMAP-CTI secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait (padang lamun dan mangrove) serta sumber dayanya. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengelola terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan, dan melalui upaya-upaya tersebut, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan COREMAP-CTI dilakukan melalui sistem dukungan dari lembaga pemerintah ke desa-desa pesisir untuk mempromosikan manajemen dan kontrol atas sumber daya pesisir secara desentralisasi (KKP, 2013).

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, program COREMAP-CTI dirancang untuk memiliki empat komponen utama yang lengkap dengan sub-komponennya, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan untuk pengelolaan terumbu karang.
 - a. Penguatan dan ekspansi pendekatan COREMAP.
 - b. Pemantauan ekologi dan sosial-ekonomi melalui CRITIC.
 - c. Penguatan pengawasan ekosistem pesisir.
 - d. Pengembangan SDM.
2. Pengembangan pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem.
 - a. Dukungan untuk pengaturan tata ruang kelautan.
 - b. Penerapan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu.
 - c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Spesies Terancam.
 - d. Perintisan komunitas berdasarkan pendekatan yang tepat.

- e. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
3. Penguatan ekonomi berkelanjutan berbasis kelautan.
 - a. Pembangunan infrastruktur dasar untuk ekoinvestasi.
 - b. Pembangunan model usaha berbasis kelautan Kelompok Produksi Berkelanjutan (KPB).
4. Pengelolaan proyek, koordinasi, dan pembelajaran.

Keluaran dari COREMAP-CTI antara lain:

1. Pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut Nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut Kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Penguatan kelembagaan di 8 provinsi, 14 kabupaten/kota, 6 Unit Pelaksana Lokal KKP, serta Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang Lokal dan Nasional (CRITIC).
3. Dihasilkannya 100 unit kegiatan ekonomi berbasis konservasi.
4. Status pengamanan untuk enam spesies punah dan terancam punah.

Hasil yang diharapkan dari COREMAP-CTI adalah pengelolaan berkelanjutan sumber daya terumbu karang dan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di lokasi proyek, termasuk:

1. Bertahannya dan/atau peningkatan tutupan karang pada tingkat optimal di lokasi proyek (dibandingkan dengan survei proyek awal dasar di lokasi proyek).
2. Peningkatan pendapatan rumah tangga penerima manfaat inti proyek 10-15 persen pada akhir proyek (dibandingkan dengan baseline awal tahun 2014).
3. Efektivitas DPL meningkat setidaknya satu tingkat dalam status mereka berdasarkan efektivitas DPL dan sistem Pemerintah Indonesia (misalnya, dari kuning ke hijau, berdasarkan survei awal proyek tahun 2014).
4. Peningkatan pendapatan penerima di lokasi proyek (dibandingkan dengan survei baseline awal proyek).
5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan terumbu karang menjadi rata-rata 85 persen di lokasi proyek.

Kabupaten Buton Selatan (hasil pemekaran Kabupaten Buton) merupakan salah satu lokasi proyek COREMAP-CTI World Bank selain lokasi-lokasi lainnya di lima provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua). Kabupaten Buton Selatan yang sebelumnya terintegrasi dengan Kabupaten Buton merupakan lokasi COREMAP-CTI yang pernah mendapatkan manfaat dari COREMAP-II. Kabupaten Buton dan lokasi-lokasi COREMAP-CTI dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1-1. Peta lokasi-lokasi COREMAP-CTI di Seluruh Indonesia

Kabupaten Buton Selatan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Buton yang disahkan pada pertengahan tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa wilayah kabupaten Buton Selatan terdiri dari 7 Kecamatan yakni Kecamatan Batauga, Sampolawa, Lapandewa, Kadatua, Siompu, Siompu Barat dan Batuatas. Dari 7 kecamatan tersebut, 4 kecamatan berada di tiga pulau kecil yang dimiliki

oleh Kabupaten Buton Selatan yakni Kecamatan Kadatua di pulau Kadatua, Kecamatan Siompu dan Siompu Barat di pulau Siompu serta Kecamatan Batuatas di pulau Batuatas. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buton Selatan didominasi oleh wilayah perairan laut dengan beberapa pulau-pulau kecilnya. Secara administrasi Kabupaten Buton Selatan mempunyai batas-batas wilayah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, Kelurahan Labalawa Kecamatan Murhum, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Bugi, Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Bau Bau dan Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaongkeongkea, Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo, Desa Wabula I, Desa Wasuempa Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dan Laut Flores; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan Sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores.

Ekosistem terumbu karang yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Buton Selatan nampak dalam berbagai kegiatan penangkapan ikan, pariwisata bahari dan kegiatan lainnya. Realitas pemanfaatan sumberdaya karang masih dijumpai praktek-praktek penangkapan ikan karang yang menggunakan cara-cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan kimia atau penggunaan alat tangkap yang merusak karang sehingga selain mengganggu kelestarian sumberdaya ikan, juga mengganggu kelestarian sumberdaya terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut.

Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu wilayah COREMAP-CTI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari hasil Studi Baseline Ekologi yang dilakukan oleh CRITC COREMAP - LIPI pada tahun 2006, didapatkan hasil studi sebagai berikut : Luas rata-rata terumbu karang di Kabupaten Buton Selatan adalah 221,82 km²; Kondisi terumbu karang yang diamati pada 34 stasiun RRI termasuk dalam kategori sedang dengan persentase penutupan karang hidup 29,79 % atau seluas 66,08 km².

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan serta mengoptimalkan hasil dari COREMAP-CTI, LIPI melakukan kegiatan penelitian aspek sosial-ekonomi terumbu karang dan ekosistem terkait (padang lamun dan

mangrove). Penelitian dilakukan sedikitnya empat kali selama periode COREMAP-CTI, yaitu:

- Riset data dasar/baseline (T0)
- Monitoring dan evaluasi 1 (T1)
- Monitoring dan evaluasi 2 (T2)
- Monitoring dan evaluasi .. (T..)
- Evaluasi akhir (Tn)

1.2 Tujuan

Tujuan umum dari penelitian aspek sosial-ekonomi ini adalah

1. Memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat, permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta potensi dan alternatif solusi terkait dengan pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Memantau pelaksanaan dan dampak program penyelamatan terumbu karang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, tujuan khusus dari penelitian data dasar (*baseline*) T0 ini adalah

1. Memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, sarana dan prasarana, potensi dan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Menggambarkan kondisi sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraannya.
3. Mendeskripsikan tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat serta faktor-faktor yang berpengaruh.

1.3 Metodologi

Pemilihan Lokasi

Penelitian penelitian data dasar (baseline) T0 ini dilakukan di dua desa, satu desa di Pulau Sioumpu (Kecamatan Sioumpu) dan satu desa lainnya di Pulau Sioumpu Barat (Kecamatan Sioumpu Barat). Kedua desa tersebut adalah Desa Tongali di Pulau Siompu dan Desa Lalole di Pulau Siompu Barat. Selain pernah menjadi lokasi COREMAP II, wilayah perairan kedua desa telah ditetapkan sebagai bagian Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Buton Selatan yang secara spesifik menyebutkan melalui Keputusan Bupati Nomor: 1576 Tahun 2005 bahwa kawasan perairan laut Pulau Liwutongkidi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya, disinergikan dengan kawasan pengembangan pariwisata BASILIKA (Batauga, Siompu, Liwutongikidi, dan Kadatua) dan Daerah Perlindungan Laut Program COREMAP II untuk memenuhi target minimal 10% dari total luasan terumbu karang di daerah.

Sebagaimana yang terjelaskan sebelumnya bahwa poin pertama dari keluaran COREMAP-CTI adalah "Pengelolaan yang efektif dari 10 Kawasan Konservasi Laut/Perairan Nasional dan 13 Kawasan Konservasi Laut/Perairan Kabupaten dan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada terumbu karang dan ekosistem terkait." Oleh karena itu, pemilihan kedua desa ini sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan banyak masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan COREMAP-CTI bagi pencapaian keluaran sebagaimana yang menjadi tujuan dari program yang dimaksud.

1.3.1 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian/publikasi/laporan teknis pihak lain. Data sekunder yang dikumpulkan berupa buku, laporan teknis, data statistik, monografi, peta dari instansi pemerintah, universitas, LSM, dan lain-lain. Pengumpulan

data sekunder dilakukan sepanjang waktu riset, baik sebelum, ketika, maupun setelah pelaksanaan pengumpulan data lapangan.

Sementara itu, Pengumpulan data primer dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix-methode). Penggunaan kedua pendekatan ini dilakukan agar data yang diperoleh lengkap dan holistik sehingga prinsip triangulasi data penelitian bisa tercapai. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei rumah tangga dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Survei rumah tangga terdiri dari berbagai pertanyaan tertutup yang menanyakan profil rumah tangga, pendapatan, pengeluaran, dan aset. Sementara itu, berbagai pertanyaan terbuka sebagai pelengkap dengan menanyakan pengetahuan, persepsi, dan kepedulian terhadap ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.

Survei dilakukan peneliti yang terdiri dari dua orang dan dibantu oleh 10 enumerator/pewawancara lokal yang telah diberi pelatihan intensif sebelumnya. Survei dilakukan terhadap 100 rumah tangga secara acak dan proporsional di dua desa, dengan perincian sebagai berikut :

- Desa Tongali : 50 responden rumah tangga
- Desa Lalole : 50 responden rumah tangga

Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif melalui survei ini bertujuan untuk :

1. Mendapat informasi yang bersifat kuantitatif terhadap isu spesifik terkait pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait.
2. Mendapat data yang secara statistik dapat mewakili kelompok masyarakat.
3. Mengetahui distribusi data tertentu, misal pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, pengetahuan, persepsi, dan lain-lain, dalam dan antar kelompok masyarakat.
4. Dapat membandingkan data antar kelompok (misalnya pendapatan rumah tangga yang dapat dan tidak dapat dana program) dan antar waktu (sebelum program dimulai, pertengahan, dan setelah program berakhir).

Sementara itu, untuk pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara terbuka dan mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta observasi langsung dan partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap narasumber kunci secara purposive dan snowballing. Meskipun telah dibekali panduan, dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan beberapa pengembangan. FGD dilakukan di setiap desa terhadap kelompok nelayan, pengurus LPSTK, dan pemerintahan desa (laki-laki) dan kelompok perempuan/wanita, baik istri nelayan, guru, dan pemilik usaha rumah tangga. Observasi dilakukan langsung sendirian oleh peneliti maupun melibatkan partisipasi masyarakat desa. Observasi dilakukan di antaranya dengan :

- Mengamati lingkungan/ekosistem di lokasi penelitian
- Mengamati aktivitas masyarakat di lokasi penelitian.
- Melengkapi (check recheck) informasi hasil wawancara, FGD, atau wawancara data kuantitatif (kuesioner).

Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk:

- Mendapat informasi yang lebih mendalam/rinci tentang isu yang spesifik.
- Menjelaskan latar belakang, proses, dan hubungan sebab akibat.
- Memberikan kesempatan pertukaran informasi antara pewawancara dengan narasumber/informan.
- Mengetahui bahasa istilah lokal yang berkaitan dengan potensi dan permasalahan lokal.

1.3.2 Analisis Data

Analisis data primer yang bersumber dari survei didasarkan hasil pengolahan data yang umumnya mendasarkan pada distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Sesuai dengan tujuan penelitian dalam menganalisis cukup melakukan deskripsi. Bahkan dalam melihat hubungan data tabulasi silang pun tidak diadakan uji statistik. Dari tabel yang dimuat hanya dilihat pola hubungan dua variabel. Adapun dari data kualitatif dan observasi dapat dianalisis tentang dinamika kehidupan sesuai dengan isu

yang diteliti. Dengan demikian data kuantitatif di balik data survei dapat dijelaskan melalui analisis data dan informasi kualitatif.

1.4 Pembabakan Penulisan

Tulisan ini terdiri dari tujuh bab. *Bab pertama* merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan pembabakan penulisan. *Bab kedua* memberikan gambaran profil lokasi penelitian. Profil ini meliputi kondisi geografis, kondisi sumber daya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi, kelembagaan sosial ekonomi, program pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya laut. *Bab ketiga* mendeskripsikan potret penduduk yang terdiri dari jumlah dan komposisi penduduk, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduk.

Bab keempat mengemukakan tentang pendapatan dan pengeluaran penduduk, meliputi pendapatan tingkat kabupaten, pendapatan dan pengeluaran penduduk di lokasi survey. *Bab kelima* membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pengelolaan sumber daya laut, meliputi faktor internal, eksternal dan struktural. Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dari seluruh tulisan dari buku ini dan dari kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diangkat beberapa rekomendasi.

BAB II PROFIL LOKASI PENELITIAN

2.1 Keadaan Geografis

2.1.1 Gambaran di Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten Buton Selatan merupakan daerah pemekaran baru, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Buton Selatan berada di Laompo, Kecamatan Batauga. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buton Selatan pada bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Buton, sementara pada bagian barat dan selatan berbatasan langsung dengan Laut Flores. Diperkirakan perairan Kabupaten Buton Selatan ini merupakan jalur pelintasan ikan yang terbesar di Indonesia. Karenanya, selain kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya alam berupa tambang aspal dan galian C di wilayah darat, juga kaya dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Secara astronomis, Kabupaten Buton Selatan terletak di antartara koordinat $5^{\circ}28'46.524''$ - $6^{\circ}12'46.915''$ Lintang Selatan dan $122^{\circ}27'20.858''$ - $122^{\circ}53'25.451''$ Bujur Timur. Berbatasan langsung dengan Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton di sebelah utara dan Laut Flores di sebelah selatan, barat dan timur. Kabupaten ini, memiliki luas daratan sebesar $\pm 348 \text{ Km}^2$, luas laut lautan sebesar $\pm 99.685,62 \text{ Ha}$ atau $\pm 996,86 \text{ Km}^2$. Rincian luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada tabel 2.1.1 berikut ini.

Tabel 2.1-1. Gambaran Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan

No	Kecamatan	Nama Ibukota	Luas (Km ²)	Persentase Luas Total (%)	Letak pada Pulau
1	Batauga	Laompo	75,83	21,79	Pulau Buton
2	Sampolawa	Mambulu	153,57	44,13	Pulau Buton
3	Lapandewa	Lapandewa	45,25	13,00	Pulau Buton
4	Batu Atas	Ujung	7,18	2,06	Pulau Batu Atas
5	Siompu Barat	Molona	10,00	2,87	Pulau Siompu
6	Siompu	Biwinapa	32,50	9,34	Pulau Siompu
7	Kadatua	Kaofe	36,67	6,80	Pulau Kadatua
	Jumlah		348	100	

Sumber : BPS Kabupaten Buton Selatan, 2016.

Kabupaten Buton Selatan terdiri dari 60 Desa dan 10 Kelurahan. Gambaran desa dan kelurahan yang dimaksud dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1-2. Jumlah Desa dan Kelurahan Setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Batauga	5	7
2	Sampolawa	13	3
3	Lapandewa	7	-
4	Batu Atas	7	-
5	Siompu Barat	8	-
6	Siompu	10	-
7	Kadatua	10	-
	Jumlah	60	10

Sumber : BPS Kabupaten Buton Selatan, 2016.

Keadaan iklim di Wilayah Kabupaten Buton Selatan tidak berbeda dengan iklim yang ada di Kota Bau-Bau, pengukuran iklim yang ada hanya di Stasiun Meteorologi Kls III Betoambari. Musim hujan terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut,

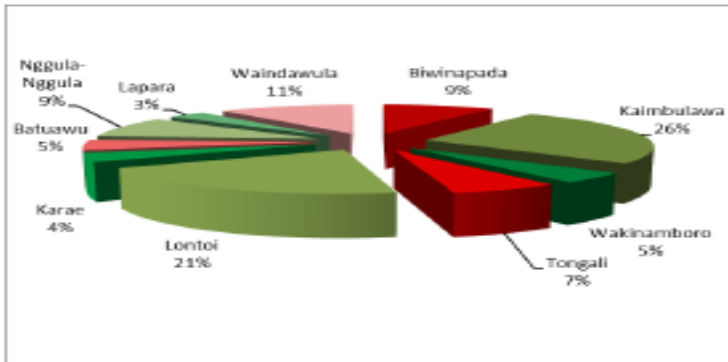
angin barat bertiup dari Benua Asia serta Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di Daerah Kabupaten Buton Selatan arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.

Dari sudut oceanografi memiliki perairan laut yang sangat luas, sehingga wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

2.1.2 Gambaran di Kawasan Kecamatan Siompu

Kecamatan Siompu merupakan salah satu kecamatan yang membentuk jazirah Pulau Siompu yang terletak di barat daya Pulau Buton, di bagian selatan berbatasan dengan Pulau Kadatua, dan bagian baratnya berbatasan dengan Kecamatan Siompu Barat, batas-batas lainnya adalah dengan perairan Kecamatan Batauga di bagian utara, dan wilayah Kota Bau-Bau di bagian timur. Wilayah administrasi Kecamatan Siompu sebagai salah satu wilayah kecamatan penelitian memiliki luas wilayah 32,50 km², terbagi menjadi 10 desa/kelurahan dengan status desa swadaya. Masing-masing desa tersebut, adalah : Desa Biwinapada (Ibu kota kecamatan), Desa Kaimbulawa, Desa Wakinamboro, Desa Tongali, Desa Lontoi, Desa Karae, Desa Batuawu, Desa Nggula-Nggula, Desa Lapara dan Desa Waindawula. Desa Kaimbulawa menjadi desa dengan luas terbesar, yakni 9.99 Km² atau sekitar 26.23% dari luas keseluruhan Kecamatan Siompu. Sedangkan Desa Lapara menjadi desa dengan luas terkecil, yakni 1.25 km² atau hanya menempati 3.28% dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Siompu. Persentase luas dari masing-masing desa dapat di pada gambar 2.1.

Gambar 2.1-1. Persentase Luas Per Desa/Kelurahan



Sumber : BPS Kabupaten Buton Selatan, 2016

Topografi wilayah Kecamatan Siempu sebagian besar merupakan perbukitan dengan kemiringan 0 – 400. Bagian wilayah pesisir yang merupakan tebing yang sangat curam. Struktur pantai sebagian besar didominasi pantai berbatu dan hanya sebagian kecil pantai berpasir (Gambar 2.2). Karena sebagian besar topografi pantainya curam, maka daerah intertidalnya juga sangat sempit. Topografi dasar perairan umumnya berkisar antara 5-300, namun ada juga lokasi yang *drop-off* hingga kedalaman 20 meter (La Ila, 2010).

Gambar 2.1-2. Pantai Berpasir dan Berbatu di Pulau Siempu



2.1.3 Gambaran di Kawasan Kecamatan Siompu Barat

Letak geografis Kecamatan Siompu Barat adalah terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan berada tepatnya di pulau Siompu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Bagian Utara berbatasan dengan Selat Flaming/ Selat Buton. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Flores. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Kabaena. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Siompu

Topografi Kecamatan Siompu Barat memiliki relief yang berbukit-bukit dengan ketinggian daratan bervariasi dan tanah yang kurang subur, memiliki curah hujan yang kurang sepanjang tahun dan dipengaruhi oleh angin musim. Terdiri dari 8 (delapan) desa/kelurahan dengan luas 10 km². Kelurahan Watuampara merupakan desa yang terluas dengan luas 2,17 km² atau sekitar 21,70% dari luas keseluruhan Kecamatan Siompu Barat. Sedangkan Desa Molona merupakan desa dengan luas wilayah paling kecil yaitu, 0,85 km² atau hanya 8,5% dari luas Kecamatan Siompu Barat. Luas Wilayah tiap desa/kelurahannya dapat dilihat pada table 2.3.

Tabel 2.1-3. Luas Wilayah dan Persentasenya Tiap Desa/Kelurahan Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Lalole	2.00	20
2.	Molona	1.13	11.30
3.	Mbanua	1.97	19.70
4.	Watuampara	2.17	21.70
5.	Katampe	0.85	8.50
6.	Lamaninggara	1.88	18.80
7.	Kamoali	0.00	0.00
8.	Mokobeau	0.00	0.00
Jumlah		10.00	100

Sumber : Kecamatan Siompu Barat dalam Angka, 2014.

Desa Lamaninggara dan Desa Katampe merupakan desa dengan jarak terjauh dari ibu kota kecamatan yaitu 1,5 km, sedangkan ke enam desa lainnya hanya berjarak 1 km dari ibu kota kecamatan (Desa Molona)

Gambar 2.1-3. Pemandangan Kecamatan Siompu Barat di lihat dari Ketinggian dan dari laut.



2.1.4 Gambaran di Desa Penelitian

2.1.4.1 Desa Tongali

Desa Tongali memiliki luas wilayah 12 km² dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan laut Pulau Ular; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batuawu; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lapara; Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batuawu. Secara umum kondisi topografi wilayah desa tongali cenderung datar, perbukitan/pegunungan, berada di wilayah ketinggian kurang lebih 0,1 m diatas permukaan air laut. Dengan lahan sebagian besar berpasir dan berbatu yang dipengaruhi oleh letak wilayah dekat pantai. Keadaan ini berkolerasi terhadap pola hidup masyarakat dan mata pencaharian warga yakni bidang perikanan sedangkan lahan pertanian sangat terbatas. Usaha di bidang peternakan juga cocok untuk dilakukan seperti; beternak ayam, itik, dan kambing.

Wilayah desa Tongali pada umumnya beriklim tropis, sepanjang tahunnya mengenal dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan atau yang dikenal pula oleh nelayan/petani yakni musim barat dan musim timur. Musim timur (musim teduh) setiap tahunnya berlangsung antara Februari s/d Agustus, pada bulan ini masyarakat banyak melaut dimana

pada umumnya masyarakat adalah nelayan tradisional yang sangat bergantung dengan musim dimana saat ini kebanyakan adalah musim ikan pelagis sedang musim barat (musim ombak) mulai pada bulan september sampai dengan Januari pada bulan – bulan ini masyarakat jarang melaut karena kondisi cuaca yang ekstrim. Namun demikian, di musim ini pula banyak terdapat ikan tuna dengan harga jual yang cukup tinggi yakni, sekitar Rp 25.000 /Kg.

2.1.4.2 Desa Lalole

Desa Lalole merupakan salah satu lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Siompu Barat, dengan luas wilayah 14.69 Km² yang terdiri dari 2,03 Km² wilayah daratan dan 12,66 km² wilayah lautan. Desa Lalole mempunyai batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watuampara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kamoali; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores; Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mokobeau.

Secara umum kondisi topografi wilayah Desa Lalole adalah perbukitan/pengunungan, berada pada tinggigian ± 15 m diatas permukaan air laut. Dengan lahan sebagian besar berpasir dan berbatu Kondisi ini berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat dan mata pencarian warga yakni bidang perikanan sedangkan lahan pertanian terbatas.

Wilayah Desa Lalole pada umumnya beriklim tropis, sepanjang tahun mengenal dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan atau yang dikenal pula oleh nelayan/petani yakni musim barat dan musim timur. Musim timur (musim teduh setiap tahunnya berlangsung antara bulan Mei sampai dengan bulan November, pada bulan ini masyarakat banyak melaut dimana pada umumnya masyarakat adalah nelayan tradisional yang sangat terganung pada musim dimana saat ini kebanyakan adalah musim ikan pelagis sedang musim barat (musim ombak) mulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret.

2.2 Keadaan Sumber Daya Alam

2.2.1 Sumber Daya Laut

2.2.1.1 Gambaran Umum Potensi Sumber Daya Laut Kabupaten

Secara administrasi Kabupaten Buton Selatan memiliki luas lautan sebesar $\pm 99.685,62$ ha atau $\pm 996,86$ km². Wilayah pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah tersebut merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Ada tiga pembentuk dasar ekosistem pesisir, yaitu; ekosistem mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang.

Ekosistem pantai di Kabupaten Buton Selatan sangat bervariasi, berupa formasi pantai berpasir, pantai tebing batu (*cliff*) dan pantai karang. Kombinasi ukuran partikel yang berbeda dan variasi factor lingkungan menciptakan suatu kisaran habitat pantai berpasir. Reoksigenasi dan suplay nutrient kedalam pasir bervariasi berdasarkan tingkat porositas, aksi gelombang dan tinggi muka pasir. Profil vertical bergradasi dari aerobic (pasir berwarna terang) hingga lapisan anaerobic dengan pasir berwarna gelap.

Sementara untuk konteks pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km² dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Kemudian direvisi dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

Beberapa karakteristik lain pulau-pulau kecil sebagai pendasaran bahwa secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular, mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi, tidak mampu mempengaruhi hidroklimat, memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya (Arief, 2007). Kabupaten Buton Selatan tidak begitu banyak memiliki pulau kecil samapi pulau sangat kecil (*micro island*). Sebaran pulau kecil sebanyak empat buah pulau terutama di bagian sebelah selata, yaitu; Pulau Kadatua, Pulau Liwutongkidi, Pulau Sioumpu dan salah satu pulau yang terjauh dari daratan Buton Selatan adalah Pulau Batu Atas berjarak 28,73 mil laut atau 53,21 km dari pulau daratan. Kondisi pulau kecil dan sangat kecil ini tidak berbeda jauh dengan pulau induknya, baik dalam hal geologi maupun vegetasinya. Pulau-pulau kecil ini terbentuk dari pengangkatan dasar perairan pada masa lampau, umumnya pulau jenis ini berupa pulau batu karang dan karst. Vegetasi yang tumbuh di pulau induknya, seperti vegetasi pantai dengan vegetasi mangrove dan lebih kearah perairan terdapat padang lamun dan terumbu karang.

Ekosistem mangrove di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Buton Selatan sudah sangat jarang ditemukan. Ekosistem mangrove ditemukan terkonsentrasi pada beberapa tempat dan jumlah kecil dengan *cover area* yang tidak begitu luas. Salah satunya ditemukan di bagian dalam Teluk Sampolawa pada koordinat 05⁰37" 18,6' LS dan 122⁰43" 15,9' BT. Selain itu, keragaman spesiesnya sangat rendah, dimana hanya ada dua jenis, yaitu; jenis *Rhizopora mucronata* dan *Avecienia alba*.

Dari studi dokumen yang dilakukan, gambaran secara umum untuk ekosistem padang lamun di Kabupaten Buton Selatan, ditemukan lima spesies dominan yaitu; *Cymodecea rotundata*, *Halodule univervis*, *Thalassia hemprichii*, *Syringodium isoetifolium* dan *Enhalus acoroides*.

Demikian halnya dengan ekosistem terumbu karang. Berdasarkan laporan daerah monitoring ekosistem terumbu karang merupakan kawasan konservasi perairan daerah yang melingkupi daerah-daerah perlindungan laut yang ada pada lokasi program COREMAP- CTI. Gambaran umum tipe terumbu karang disepanjang pesisir Kabupaten Buton Selatan merupakan terumbu tipe pantai (*fringing reef*). Hasil monitoring *baseline* kondisi ekosistem terumbu karang yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa dari hasil Studi Baseline Ekologi yang dilakukan oleh CRITC COREMAP - LIPI Kondisi terumbu karang yang diamati pada 34 stasiun RRI termasuk dalam kategori sedang dengan persentase penutupan karang hidup 29,79 % atau seluas 66,08 km²; Jumlah jenis ikan yang dijumpai selama pengamatan adalah 231 jenis yang termasuk dalam 35 suku, meliputi ikan major, ikan target dan ikan indikator.

Hasil monitoring pada tahun 2015 pada 8 DPL dan 1 Kawasan Inti KKPD Kab. Buton Selatan, menunjukan persentase tutupan karang hidup (*living coral*) mencapai 51,20%, termasuk dalam kategori sedang. Penutupan karang hidup tersebut pada 9 stasiun pengamatan berkisar 20,40% - 74,53% tergolong dalam criteria buruk hingga baik. Penutupan daerah terendah berada pada stasiun pengamatan di Kecamatan Siompu, sedangkan untuk stasiun pengamatan dengan tingkat tutupan karang tertinggi yakni berada pada stasiun pengamatan Liwutongkidi. Penutupan karang mati sebagai indikasi kerusakan karang berkisar 5,40% - 44,27% (rata-rata 24,22%), dimana kerusakan terbesar pada stasiun pengamatan Desa Kaimbulawa, Kecamatan Siompu sebesar 44,27% dan kerusakan terkecil di Kel Majapahit, Kecamatan Batauga yaitu 5,40%. Kerusakan karang ini terdiri dari karang keras (*hard coral*) yang baru mati (*Dead Coral*, DC), karang yang telah lama mati dan ditumbuhi algae (*Dead Coral with Algae*, DCA) dan patahan karang yang telah mati (*Rubble*, R). Komponen bentik lain yang hidup dan terdapat di ekosistem terumbu karang COREMAP-CTI Buton Selatan yaitu karang lunak (*Soft Coral*, SC), Sponge (SP), *Fleshy Seaweed* (FS) dan *Other Biota* (OT). Untuk

komponen abiotik yang terdiri dari batu (*Rock*, R), pasir (*Sand*, SD) dan lumpur (*Silt*, SI) secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2-1. Persentase Tutupan Karang Tingkat Kabupaten Selatan

MAJOR CATEGORY	% TUTUPAN
CORAL (HC)	51.20
RECENT DEAD CORAL (DC)	0.10
DEAD CORAL WITH ALGAE (DCA)	24.22
SOFT CORAL (SC)	4.27
SPONGE (SP)	1.31
FLESHY SEAWEED (FS)	4.99
OTHER BIOTA (OT)	1.03
RUBBLE (R)	6.50
SAND (S)	6.39
SILT (SI)	0.00
ROCK (RK)	0.00
TAPE, WAND, SHADOW (TWS)	0.00

Sumber : Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem terkait Kab. Buton Selatan, 2015.

Perikanan tangkap merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini sangat dimungkinkan oleh karena letak geografis Kabupaten Buton Selatan yang berhadapan langsung dengan Laut Flores. Laut Flores adalah sala satu laut dalam yang ada di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Beberapa jenis ikan pelagis besar seperti Tuna dan Cakalang memiliki daerah pemijahan di perairan Laut Flores ini. Sementara untuk wilayah pesisir Kabupaten Buton Selatan, kelimpahan klorofil tertinggi terjadi pada setiap Bulan Oktober yang memicu kemunculan ikan-ikan pelagis kecil, seperti ikan kembung, selar, laying dalam jumlah besar di Laut Flores, Laut Banda dan Teluk Bone. Hal serupa juga terjadi pada Bulan Maret hingga Bulan Juni.

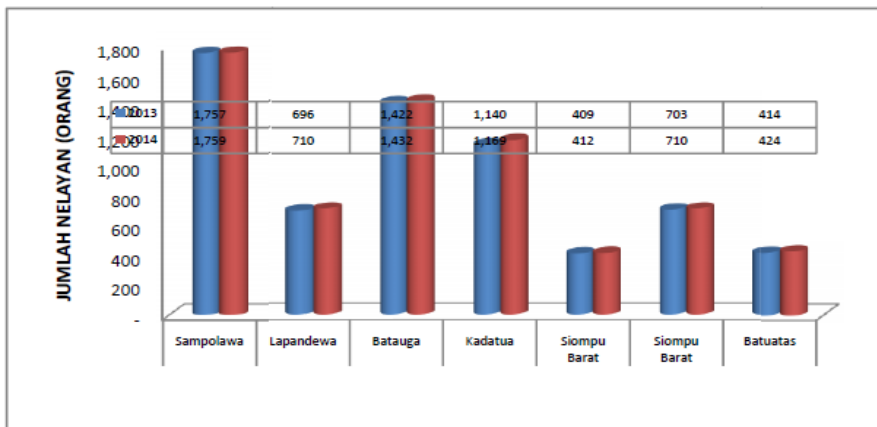
Tabel 2.2-2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015

No	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)
1.	Tongkol	16.287.376
2.	Tuna	4.530.378
3.	Cakalang	3.155.522
4.	Ikan Terbang	132.823
5.	Layang	2.959.620
6.	Kembung	145.761
7.	Kakap	574.240
8.	Kerapu	155.960
9.	Baronang	10.500
10.	Lola	1.716
11.	Teripang	3.162
12.	Cumi	12.752
13.	Pari	600
14.	Hiu	18.426
15.	Gurita	7.578
16.	Teri	383.760
17.	Tenggiri	31.770
18.	Kerang	4.770
19.	Layur	12.780
20.	Lobster	6.064
21.	Ikan Lainnya	4.386.320
Jumlah		32.821.878

Sumber : DKP Kabupaten Buton Selatan, 2015.

Keberadaan jumlah nelayan terbesar di Kabupaten Buton Selatan terdapat di Kecamatan Sampolawa, diikuti oleh Kecamatan Batauga dan Kadatua. Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar nelayan yang ada di Kabupaten Buton Selatan mendiami wilayah yang termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Oleh karenanya pengelolaan sumberdaya tangkap di KKP Buton Selatan sangatlah penting dilakukan.

Gambar 2.2-1. Jumlah Nelayan di Kabupaten Buton Selatan

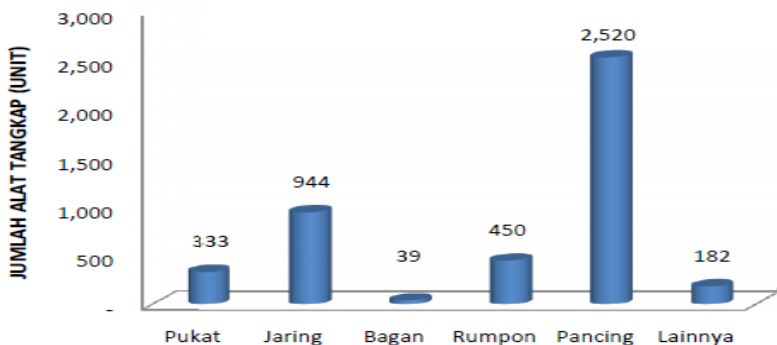


Sumber : Rencana Teknis Pemanfaatan KKP Kabupaten Buton Selatan, 2015.

Alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan di Kabupaten Buton Selatan adalah alat tangkap pancing (*tuna hand line* serta armada *pole and*

Line). Hal ini lebih disebabkan oleh kapasitas armada penangkapan yang dimiliki masih dalam kategori tradisional. Perahu Tanpa Motor (PTM) masih sangat dominan pula. Namun demikian, alat tangkap purse seine juga telah dioperasikan oleh nelayan di Kabupaten Buton Selatan, khususnya oleh nelayan di Kecamatan Kadatua.

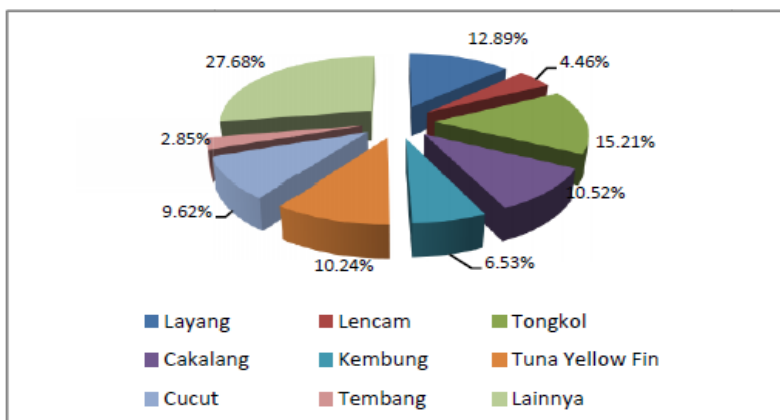
Gambar 2.2-2. Jumlah Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015



Sumber : DKP Kabupaten Buton Selatan, 2015

Jenis hasil tangkapan yang dominan adalah ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang dan Tongkol. Sedangkan ikan pelagis kecil lebih banyak ditangkap dengan alat tangkap purse seine dan gill net, seperti layang dan kembung. Sementara ikan demersal yang banyak ditangkap adalah ikan kerapak, kakap dan lencam.

Gambar 2.2-3. Jenis Ikan yang Dominan Tertangkap di Kabupaten Buton Selatan



Sumber : Rencana Teknis Pemanfaatan KKP Kabupaten Buton Selatan, 2015

Potensi budidaya rumput laut, Buton Selatan telah menghasilkan 11.358.25 ton. Meskipun ada beberapa kecamatan yang produksi rumput lautnya belum terdata seperti Kecamatan Siompu, Kadatua dan Lapandewa. Selain budidaya rumput laut, beberapa komoditas budidaya telah dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Buton Selatan, diantaranya adalah, budidaya kerang mabe di Kecamatan Kapontori, budidaya ikan kerapu melalui KJA (Keramba Jaring Apung) dan KJT (Keramba Jaring Tancap) di Kecamatan Lakudo dan Kapontori.

Tabel 2.2-3. Intesitas Budidaya Rumput Laut di Perairan Pesisir Kabupaten Buton Selatan

Kecamatan	Intesitas Budidaya	Keterangan
Batauga	Tinggi	Semua desa pesisir
Sampolawa	Sedang	Desa Bangun, Jayabakti, Katilombu
Lapandewa	-	Belum ada
Batu Atas	-	Belum ada
Siompu Barat	Kurang	Desa Lalole
Siompu	Kurang	Desa Karae
Kadatua	Kurang	Desa Kapoa, Kaofe

Sumber : RTRW Kabupaten Buton Selatan (2013-2033).

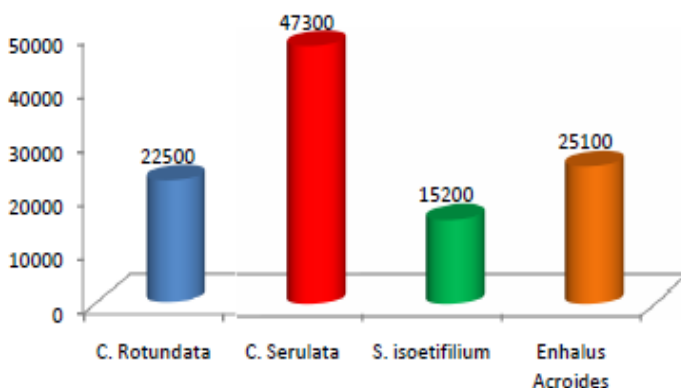
2.2.1.2 Gambaran Umum Potensi Sumber Daya Laut di Wilayah Studi

2.2.1.2.1 Kecamatan Siompu (Desa Tongali)

Potensi dan Kondisi Mangrove. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa ekosistem mangrove tidak ditemukan di Desa Tongali. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dilaporkan dalam Dokumen Awal RZWP-3-K Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015 di sebutkan bahwa ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Buton Selatan sudah sangat jarang ditemukan. Ekosistem mangrove ditemukan terkonsentrasi pada beberapa tempat saja dalam jumlah kecil dengan *cover area* yang tidak begitu luas. Salah satunya ditemukan di bagian dalam teluk Sampolawa dengan keragaman spesies yang rendah, dimana hanya dua jenis yang dijumpai yaitu jenis *Rhizopora mucronatu* dan *Avicenia alba*

Potensi dan Kondisi Lamun. Data dari studi dokumen yang dilakukan, menggambarkan bahwa kondisi padang lamun di Kecamatan Siompu tumbuh di sepanjang pantai. Pada kondisi air surut kawasan padang lamun Kec. Siompu sebagian besar kawasannya merupakan kawasan yang tidak digenangi oleh air laut serta kondisi substrat dasar lumpung hingga berpasir. Penutupan lamun setiap petak contoh berkisar antara 30% – 85% dengan kondisi setiap petak contoh dijumpai 3 – 4 jenis lamun dengan tinggi kanopi 15 - 40 cm. Cover lamun semakin ketengah hingga ujung kawasan padang lamun semakin padat dengan tingkat dominansi jenis yang tinggi. Jumlah individu lamun per satuan hektar di Kecamatan Siompu, gambaran sederhananya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2-4. Diagram Jumlah Individu Lamun Persatuan Hektar di Kecamatan Siompu



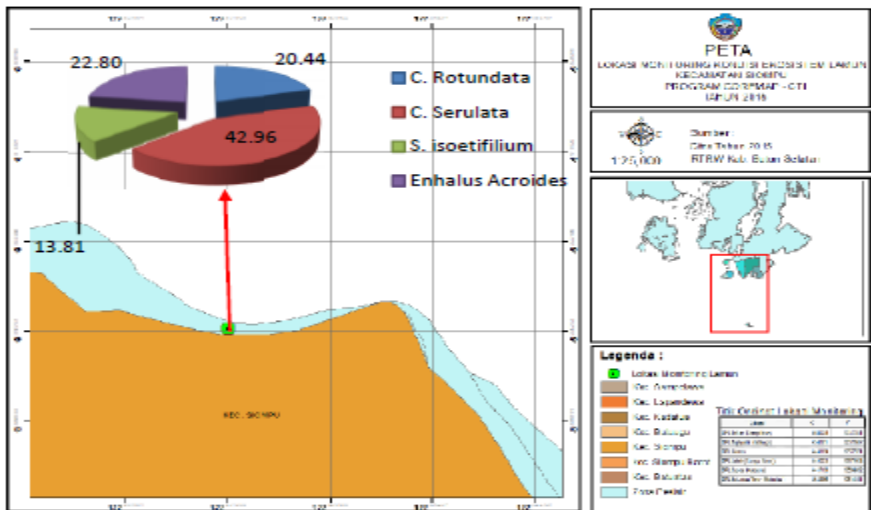
Sumber : Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem terkait Kab. Buton Selatan, 2015.

Data diatas menggambarkan bahwa dominasi pada stasiun ini tertinggi pada jenis *C. Serulata* sebanyak 47.300 individu, *C. rotundata* sebanyak 22,500 individu, *S. isoetifilium* sebanyak 15.200 individu dan *Enhalus Acroides* jumlah 25,100 individu pada luasan 1 Ha. Diagram diatas menjelaskan pula bahwa tampilan umum pada hamparan ini adalah jenis

C. serulata dan *Enhalus* mendominasi setiap transek dimana pada kedua jenis ini memiliki tingkatutupan kanopi yang cukup lebar.

Hasil monitoring tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Lamun jenis *C. Serulata* merupakan jenis dengan persentaseutupan tertinggi yakni sebesar 42,96% yang berarti untuk jenis ini berada pada kategori kurang sehat, adapun untuk jenis lamun yang lain mulai dari jenis *C. Rotundata* sebanyak 20,44%, *Enhalus Acroides* sebanyak 22,80%, dan jenis *Syringodium isoetifilium* sebanyak 13,81% yang berarti jenis-jenis ini pada kategori miskin (Gambar 2.2.6)

Gambar 2.2-5. Persentase Masing-Masing Jenis Lamun di Kecamatan Siompu



Sumber : Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem terkait Kab. Buton Selatan, 2015.

Potensi dan Kondisi Terumbu Karang. Tim monitoring ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait tahun 2015 melakukan pengamatan kondisi ekosistem terumbu karang di kecamatan ini terdiri dari 3 (tiga) stasiun pengamatan dimana satu stasiun terdapat di Pulau Liwutongkidi dan dua stasiun lainnya terdapat di Pulau Siompu. Tofografi perairan Kecamatan Siompu secara umum untuk tiga stasiun pengamatan

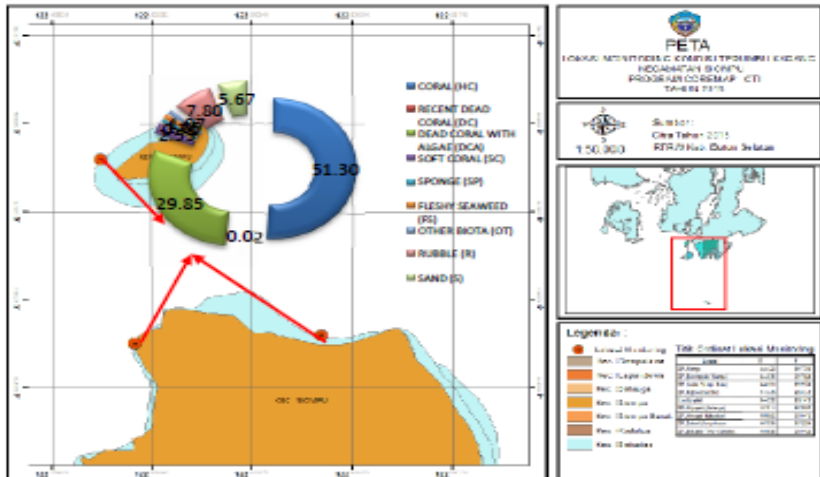
merupakan perairan yang terbuka dan landai dengan kemiringan 15^0 hingga 90^0 *drop off*. Adapun tingkat tutupan karang hidup yang tertinggi terdapat pada stasiun di Pulau Liwutongkidi dengan tingkat tutupan mencapai 74,53% dengan Kategori Baik, untuk stasiun I di Pulau Siompu tingkat tutupan karang hidup mencapai 20,4% yang didominasi oleh DCA sebanyak 44,27% dengan Kategori Buruk, sedangkan untuk stasiun II Siompu dengan tingkat tutupan karang hidup mencapai 58,97% dengan Kategori Baik. Pada stasiun Pulau Liwutongkidi secara keseluruhan tutupan karang hidup di dominasi oleh coral branching sebanyak 23,27% dan coral foliose sebanyak 25,27%. Untuk stasiun II Pulau Siompu didominasi oleh coral encrusting sebesar 33,16%.. Secara rinci tingkat tutupan karang perkategori dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2-4. Persentase Tingkat Tutupan Karang di Kecamatan Siompu

MAJOR CATEGORY	Persentase Tutupan/Stasiun		
	Liwutongkidi	Siompu	Siompu I
CORAL (HC)	74.53	20.4	58.97
RECENT DEAD CORAL (DC)	0	0.07	0
DEAD CORAL WITH ALGAE (DCA)	14.13	44.27	31.15
SOFT CORAL (SC)	5.73	0.2	1.67
SPONGE (SP)	0.27	0.47	1.4
FLESHY SEAWEED (FS)	0.2	0.47	2.47
OTHER BIOTA (OT)	0.07	0.13	3
RUBBLE (R)	5.07	17.67	0.67
SAND (S)	0	16.33	0.67

Sumber : Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem terkait Kab. Buton Selatan, 2015.

Gambar 2.2-6. Persentase Rata-Rata Tutupan Karang di Kecamatan Siompu



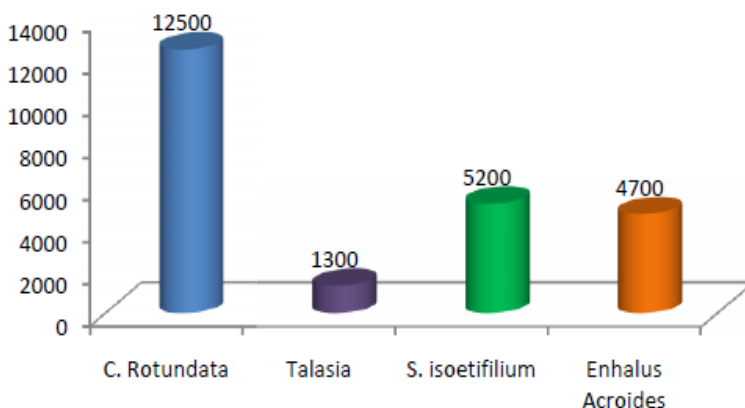
Sumber : Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan ekosistem terkait Kab. Buton Selatan, 2015.

Gambar diatas menunjukkan bahwa lokasi monitoring pada masing-masing stasiun pengamatan rata-rata tingkat tutupan karang mencapai 51,31% dengan Kategori Sedang, dan untuk karang mati yang ditumbuhi alga sebesar 29,85%, ini merupakan sebuah kerusakan yang cukup besar. Olehnya itu masih perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan penyadaran serta pengawasan yang intensif untuk menjaga daerah-daerah perlindungan laut tersebut sehingga adanya peningkatan tingkat tutupan karang hidup di Kecamatan Siompu.

Potensi dan kondisi perikanan di Kecamatan Siompu tergambar secara kuantitatif berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015. Data yang ada menunjukkan bahwa RTP (Rumah Tangga Perikanan) di Kecamatan Siompu sekitar 628 RTP dengan rincian masing-masing alat tangkap; pancing (902 orang) dengan alat tangkap jenis pancing rawai tuna, rawai dasar, tonda, ulur; jaring insang (395 orang); bubu (94 orang). Sementara untuk armada perahu tanpa motor (286 buah); perahu motor sekitar 342 buah. Adapun jenis ikan tangkapan (kg) adalah ikan tongkol (288,672); ikan

Lamun jenis *C. Rotundata* penutupan spesis berada pada 52.74% merupakan jenis lamun yang didapati dengan tingkat tutupan tertinggi dan berada pada kategori kurang sehat bila dibanding dengan jenis lamun yang lain dan jenis *Enhalus acroides* sebanyak 19,83%, *Syringodium isoetifilium* sebanyak 21,94% dan jenis lamun *Talasia* sebanyak 5,49% yang berarti ketiga jenis lamun ini pada kategori kurang sehat.

Gambar 2.2-8. Diagram Jumlah Individu Lamun Persatuan Hektar Kecamatan Siompu Barat



Sumber : Monitoring Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Kab. Buton Selatan, 2015.

Potensi dan Kondisi Terumbu Karang. Tim monitoring ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait tahun 2015 menjadikan Desa lalole sebagai stasiun pengamatan. Hasil yang diperoleh disebutkan bahwa tingkat tutupan karang sebesar 36,6% untuk karang hidup (*living coral*) dan dengan kategori sedang, karang dengan kategori karang mati yang ditumbuhi alga mendominasi dengan tingkat persentase tutupan mencapai 33,13%, hal ini diakibatkan pada lokasi monitoring merupakan lokasi yang sementara mengalami *recovery*. Pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi kegiatan penangkapan yang merusak seperti bom dan bus. Secara rinci tingkat tutupan karang perkategori adalah sebagai berikut : *Coral*

Cakalang (708,600); ikan terbang (64,200); kan laying (32,00); kembung (78,225); ikan kakap (210,600); kerapu (108,000) dan sebagainya.

2.2.2 Sumber Daya Darat

2.2.2.1 Sumber Daya Darat Kabupaten

Topografi tanah daerah Kabupaten Buton Selatan pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sector pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relative rendah, ada juga yang bias digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya mencapai 40⁰.

Secara garis umum, keadaan pegunungan lahan di daerah ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu; lahan yang diusahakan dan lahan tidak/belum diusahakan. Lahan yang diusahakan meliputi penggunaan lahan seperti : sawah, peladangan/tegal, kebun campuran dan pekarangan, kebun kelapa, dan perkebunan kapas, kebun jambu mete serta sedikit kebun tebu. Jenis penggunaan lahan serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2-5. Jenis Tutupan Lahan dan Luasannya

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1.	Hutan lahan kering primer	16.078,38
2.	Hutan lahan kering sekunder	1.130,95
3.	Kawasan pemukiman	971,19
4.	Lahan kosong	3,75
5.	Lahan terbuka	26,01
6.	Perkebunan campuran	1.400,68
7.	Perkebunan kelapa	21,90
8.	Semak belukar	31.811,52
9.	Tubuh air	44,49
Jumlah		51.488,86

Sumber : RZWP-3-K Kabupaten Buton Selatan, 2015.

Lahan yang tidak/belum diusahakan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu; padang rumput/alang-alang, padang rumput dan belukar, padang rumput dan hutan pelebahan, belukar, hutan lebat, hutan sekunder, dan mangrove. Selain itu terdapat penggunaan lahan lainnya, seperti : pertambangan, pemukiman, danau/rawa dan sungai-sungai. Tutupan lahan didominasi oleh semak belukar dan hutan lahan kering primer. Lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan masih tergolong kecil sehingga potensi pengembangan pemanfaatan lahan kosong sangat besar.

2.2.2.2 Gambaran Umum Potensi Sumber Daya Darat di Wilayah Studi

2.2.2.2.1 Kecamatan Siompu (Desa Tongali)

Pada tahun 2014, tercatat dari 32,50 km² luas keseluruhan wilayah Kecamatan Siompu. Lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian baru sejumlah 135 ha, selebihnya masih merupakan areal pemukiman, padang rumput, hutan rakyat dan areal tanah yang belum diusahakan. Dari lahan pertanian di Kecamatan Siompu yang seluas 8.149 ha, umumnya digunakan untuk menanam jagung, ubi kayu, dan kacang tanah dengan total jumlah produksi 1.635 ton. Tanaman ubi kayu merupakan tanaman yang memiliki produksi terbanyak sebesar 1.514 ton. Terkhusus untuk tanaman ubi kayu, masyarakat di wilayah penelitian telah mengolah dan menjadikannya sebagai bahan pangan pokok (makanan tradisional) diversifikasi dari padi (beras) yang dikenal dengan istilah makanan *kasuami*. Cara pengolahannya sangat sederhana masih menggunakan cara-cara lama (tradisional) sebagai pengetahuan masyarakat yang diperoleh dari generasi sebelumnya.

Gambar 2.2-10 *Kasuami* yang Diperdagangkan di Pasar Tradisional sebagai Makanan Khas di Desa Tongali



Tabel 2.2-6. Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya di Desa Tongali

Potensi Sumber Daya Alam	Kondisi serta Akses dan Kontrol
Pantai/ laut	Garis pantai desa tongali \pm 1 km saja dan wilayah pantainya bergelombang dan kondisinya sudah mulai terkikis dan garis pantainya sudah tidak asi lagi dan letak geografisnya cocok digunakan wilayah jembatan dan sekarang sudah ditimbun untuk wilayah pelabuhan kecamatan Siompu
Pasir	Sudah mulai terkikis karena 20% wilayah pantai sudah ditimbun untuk pelabuhan sehingga keperluan bahan bangunan masyarakat mengambil diluar desa seperti desa Lapa dan Karae
Batu	Desa Tongali terbentuk dari 3 jenis alam yakni terdiri 70% batu dengan jenis batu gunung sebagian besar digunakan untuk bahan bangunan seperti jembatan, fasilitas umum dan perumahan masyarakat.
Tanah	Tanah bercampur batu cadas seingga kurang cocok digunakan sebagai lahan pertanian karena tidak semua jenis tanaman dapat tumbuh ditanah dengan jenis tanah

	dengan karakteristik yang terdapat di Desa Tongali
Lahan pertanian	Masih luas dengan kondisi perbukitan dan biasanya warga menanam lahannya dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan tetapi tidak semua bisa ditanami karena lebih banyak batu daripada tanah
Kayu (maniaga, cendana, mahoni, sengon dan wola)	Disamping tumbuh di hutan juga ditanam di kebun kebun warga yang terletak \pm 1km dari permukiman penduduk rata-rata umurnya \pm 4 tahun dan kayu jenis ini digunakan warga sebagai bahan bangunan (perumahan)
Jagung	Masih banyak warga yang menanam di lahan pertaniannya dengan mengikuti musim tanam. Dikenal 2x musim tanam dengan waktu panen 3-4 bulan dibudidayakan secara tradisional dan bibit lokal. Dengan rasa yang manis akan tetapi buahnya lebih kecil dibandingkan dengan buah jagung dari kecamatan batauga dan desa-desa lainnya
Kelapa	Ditanam di kebun warga dan sekitar pemukiman penduduk. Hasilnya sebagian dijual dalam bentuk glondongan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian warga pengelolaan seperti diolah menjadi minyak dan masih sedikit yang dikelola menjadi kopra karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti mesin parut/giling
Kerang	Kerang masih cukup banyak terdapat dilaut, dicari warga saat air surut dan sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian sedikit dijual jika hari pasar saja
Ayam	Jenis ayam yang dibudidayakan warga adalah jenis ayam kampung, rata rata hanya 1-22 ekor per Kk dan hanya masyarakat yang tinggal di daerah bebatuan dan sebagian untuk dikonsumsi pada hari-hari tertentu (lebaran dan pesta pernikahan dan sebagian kecil untuk dijual)
Itik	Itik yang dibudidayakan masyarakat desa tongali dibagi menjadi 2 kategori yakni : itik angsa dan itik biasa dan yang paling banyak dibudidayakan adalah itik biasanya karena rasanya yang gurih dan telurnya sebagian besar dijual dan sebagian kecil ada masyarakat yang biasa mengelola menjadi telur asin

Kambing	Sangat sedikit warga yang memelihara kambing hanya 1-2 ekor saja karena kurangnya modal dan dibudidayakan secara liar tidak dibuatkan kandang
Kepiting kenari	Saat ini kepiting kenari sudah terancam punah ada beberapa warga yang mencoba membudidayakan sedang sistem tradisional
Teripang	Teripang yang ada di kisaran pantai Desa Tongali ada sesekali dijumpai berdasarkan kondisi alam yakni pada musim ombak (musim barat)
Kayu	Ketersediaan kayu sudah sangat terbatas, khususnya di hutan. Kayu dijadikan bahan bangunan bagi rumah pembangunan sarana umum
Bambu	Sudah sangat sedikit dan tumbuh di sekitar hutan digunakan warga untuk bahan bangunan rumah dan kandang ternak

2.2.2.2.2. Kecamatan Siompu Barat (Desa Lalole)

Penggunaan tanah menurut jenisnya, tercatat bahwa sebagian besar atau sekitar atau sekitar 43,10% (431 ha) tanah di Kecamatan Sioumpu Barat merupakan lahan yang sementara belum diusahakan. 3,50% (35 ha) hutan rakyat, 12,70% merupakan padang rumput. Untuk tanaman bahan makanan yang dikembangkan di Kecamatan Sioumpu Barat, hanya dua jenis yaitu jagung dan ubi kayu. Namun yang menarik di kecamatan ini adalah usaha pecahan batu untuk campuran bahan bangunan (pembuatan batako) yang diusahakan oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi masyarakat dengan harga jual Rp. 5000,- per kantong sak semen.

Gambar 2.2-11. Kondisi Lahan yang Berbatu dan Usaha Pecahan Batu sebagai Pendapatan Alternatif Masyarakat



Tabel 2.2-7. Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya di Desa Tongali

Potensi Sumber Daya Alam	Kondisi Serta Akses dan Kontrolnya
Laut	Laut di Desa Lalole yang panjangnya pesisirnya \pm 2 km terbentang karang dan dihuni berbagai jenis ikan pelagis dan ikan karang serta habitat lainnya yang sebagian habitat lautnya dimanfaatkan oleh warga untuk pemenuhan hidup keluarga. Di laut ini warga pernah mengembangkan budidaya agar-agar tetapi gagal karena terserah penyakit <i>ice-ice</i>
Kawasan DPL	100x400 m yang merupak zona inti, sedangkan kawasan adat (<i>kaombo</i>) yang digunakan seluas \pm 1 km yang didalamnya mencakup Desa Watuampara, Lalole, Mokobheau dan Kam0ali karena satu adat
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Kaimulawa terletak di sebelah barat Desa lalole dengan pasir putih seluas kurang lebih 10 m lebar dan panjang 100 meter - Pantai Kandindiyno terdapat gua yang dalamnya ada stalaktik mentekan air pada batu yang berbentuk kima besar. Di batu tersebut tidak pernah kering bahkan tidak pernah meluap airnya - Pantai Napa Manuru merupakan tempat bertelurnya penyu tetapi telur tersebut sering diambil oleh warga sehingga punyu makin langka

Air Lalo	Barada pada seblah barat Desa Lalole merupakan lokasi kumpulan udang merah yang tidak pernah ditangkap karena tempat tersebut dimitoskan anker.
Pasir	Sudah mulai terkikis karena wilayah karena abrasi pantai dan sebagian diambil sebagai bahan bangunan.
Batu	Desa lalole terbentuk dari tiga jenis alam yakni terdiri dari 70% batu dengan jenis batu gunung sebagian besar digunakan untuk bahan bangunan seperti pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas umum dan perumahan masyarakat.
Tanah	Tanah bercampur batu cadas sehingga kurang cocok digunakan sebagai lahan pertanian karena tidak semua jenis tanaman dapat tumbuh ditanah dengan jenis tanah seperti karakteristik yang terdapat di Desa Lalole.
Lahan Pertanian	Masih luas dengan kondisi perbukitan dan biasanya warga menanam lahannya dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan tetapi tidak semua bisa ditanami karena lebih banyak batu dari pada tanah walaupun kondisi lahannya berbatu tetapi dilahan ini dikembangkan tanaman jeruk siompu.
Jagung	Masih banyak warga menanam dilahan pertaniannya dengan mengikuti musim tanam dikenal dua kali musim tanam dengan waktu panen tiga sampai 4 bulan dibudidayakan secara teradisional dan bibit lokal dengan rasa yang manis akan tetapi buahnya lebih kecil jika dibanding buah jagung dari Kecamatan Batauga dan desa-desa lain (pesisir).
Kelapa	Ditanam di kebun warga disekitar pemukiman penduduk hasilnya sebagian dijual dalam bentuk glondongan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian warga mengolah menjadi minyak dan masih sedikit yang di kelola menjadi kopra karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti mesin parut/giling.
Kerang	Kerang masih cukup banyak terdapat di laut dicari warga saat air surut dan sebagian besar dikonsumsi sendiri dan sebagaian lainnya dijual di pasar saja.

2.3 Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

2.3.1 Sarana Transportasi

2.3.1.1 Desa Tongali

Fasilitas jalan sebagai sarana transportasi utama yang menghubungkan antar wilayah desa dalam kondisi rusak walaupun ada sebagian jalan masih dalam tahap perbaikan berupa tanah timbunan yang belum teraspal. Jalan darat yang beraspal menghubungkan antar desa dilalui oleh sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Adapun alat transportasi yang menghubungkan antar desa maupun ibukota kecamatan dapat menggunakan sepeda motor (ojek) maupun mobil yang aktivitasnya setiap hari. Sementara alat transportasi yang menghubungkan dengan Ibu Kota kabupaten Buton Selatan (Batauga) dan Kota Bau-Bau dapat ditempuh melalui speed boat di pelabuhan Siompu.

Gambar 2.3-1. Aktivitas Masyarakat di Pelabuhan Siompu di Kecamatan Siompu



2.3.1.2 Desa Lalole

Fasilitas jalan sebagai sarana transportasi utama yang digunakan menghubungkan antar wilayah desa sebagian rusak, jalan darat yang menghubungkan antara desa dapat dilalui sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Adapaun alat transportasi yang menghubungkan antara desa ibukota kecamatan dapat menggunakan sepeda motor maupun mobil yang aktifitasnya setiap hari. Yang menghubungkan ibu kora Kabupaten Buton selatan (Batauga) dan Kota Bau-bau adalah melalui *speed boat* yang berangkat dari pelabuhan yang ada di Desa Lalole selanjutnya menggunakan roda dua maupun roda empat.

Gambar 2.3-2. Pelabuhan di Desa Laloe Kecamatan Sioumpu Barat



2.3.2 Sarana Perikanan

2.3.2.1 Desa Tongali

Jenis sarana dan prasarana produksi dan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut yang dimiliki nelayan di Desa Tongali terdiri dari jaring apung, rumpon, alat pancing tuna, pancing chigi, sampan dan perahu motor. Nelayan Desa Tongali masih menggunakan alat dan metode yang tradisional yaitu jaring insang dan pancing. Pada umumnya nelayan menggunakan pancing untuk menangkap ikan, menurut Ayodhyoa (1981) alat tangkap pancing

mempunyai banyak kelebihan diantaranya sangat kecil pengaruh cuaca dan musim, selektif terhadap ukuran dan jenis tangkapan sehingga tergolong alat tangkap yang ramah lingkungan, Alat-alat pancing tidak susah dalam strukturnya dan operasinya dapat dilakukan dengan mudah, walaupun memiliki banyak kelebihan alat tangkap pancing juga memiliki banyak kekurangan yaitu hasil tangkapan terbatas jumlahnya, Memerlukan umpan, sehingga ada tidaknya umpan akan berpengaruh terhadap jumlah kali operasi yang dapat dilakukan dan Pancing terhadap ikan adalah pasif, dengan demikian tertangkapnya ikan tersebut sangat ditentukan oleh tertariknya ikan untuk memakan umpan.

Gambar 2.3-3. Sarana Perikanan Tangkap di Desa Tongali



2.3.2.2 Desa Lalole

Jenis sarana dan prasarana produksi dan ekonomi yang berhungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut yang dimiliki nelayan di Desa Lalole terdiri dari perahu jukung, jaring apung, rumpon, alat pancing tuna, pancing chigi, sampan dan perahu motor. Sarana aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan masih terbilang sangat sederhana. Keterbatasan modal produksi menjadi factor determinan dalam mengakses untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana perikanan tangkap yang mereka miliki.

Gambar 2.3-4. Sarana Perikanan Tangkap di Desa lalole



2.3.3 Sarana Ekonomi

2.3.3.1 Desa Tongali

Sarana perdagangan di Desa Tongali masih berupa kios-kios kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Meskipun terdapat pasar, namun sebagian besar transaksi jual beli, seperti kebutuhan rumah tangga maupun hasil bumi dilakukan di luar pulau (Kota Bau-Bau dan Kecamatan Batauga). Kebutuhan rumah tangga misalnya, beras, minyak tanah, bensin, solar, garam, mie instan, bumbu dapur, dan sebagainya didatangkan dari luar pulau. Hal tersebut menyebabkan timbulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penduduk di desa ini untuk transportasi air ke daratan (*maind landnya*). Di desa ini juga terdapat tempat pendaratan ikan (TPI) yang bangunannya permanen, akan tetapi meja-meja untuk penjual kondisinya sudah rusak. Aktivitas transaksi jual-beli ikan berlangsung dua kali sehari, yaitu pagi dan menjelang sore hari. Di desa ini ada tempat penjualan bahan bakar premium yang di usahakan oleh warga dengan peralatan yang lebih modern dibanding dengan penjualan bensin botolan.

Gambar 2.3-5. Sarana Perekonomian (Pasar, TPI dan Depo Penjualan Premium) di Desa Tongali



2.3.3.2 Desa Lalole

Kios-kios kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat merupakan sarana perdagangan di Desa Lalole. Terdapat pasar dua kali dalam seminggu (hari Selasa dan Kamis), namun sebagian besar transaksi jual beli, seperti kebutuhan rumah tangga maupun hasil bumi dilakukan di luar pulau. Tersedia transportasi reguler ke Kota Bau-Bau dan Kecamatan Batauga dengan kapal speed dengan biaya Rp.30.000,- per orang sekali jalan. Instalasi listrik Negara (PLN) sudah tersedia yang beroperasi mulai dari pukul 18.00 – 22.00 Wita. Untuk hari minggu penerangan listrik mulai dari jam 08.00 – jam 13.00 wita. Memiliki 2 buah dermaga (tradisional dan semi permanen). Kondisi ekonomi masyarakat setempat bergantung dari sector perikanan dan perkebunan. Ada kebiasaan masyarakat pada bulan Agustus – Oktober setiap tahunnya melakukan migrasi musiman ke Daerah Ternate dan Ambon untuk menjadi pemetik cengkeh. Di desa ini juga ada terdapat penjualan bahan bakar premium dengan cara botolan. Lembaga perekonomian makro belum ditemukan, dengan inisiatif masyarakat sendiri telah mendirikan lembaga simas arisan bagi ibu-ibu di desa ini dalam mengatasi persoalan-persoalan ekonomi mereka.

Gambar 2.3-6. Infrastruktur Pasar dan Instalasi Listrik ke Rumah-Rumah Penduduk di Desa Lolole

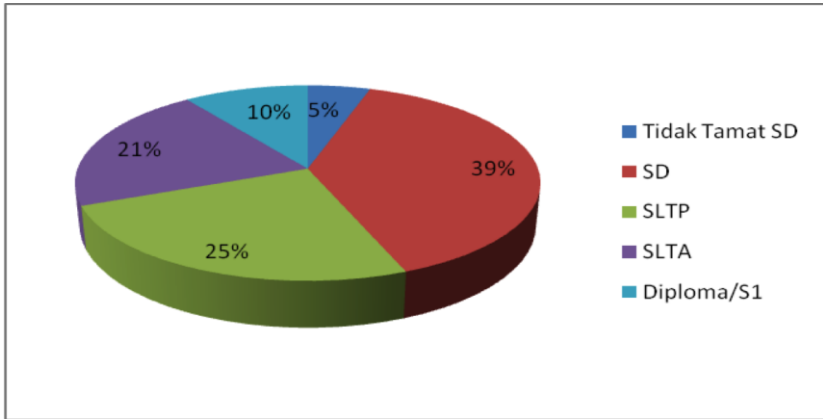


2.3.4 Sarana Pendidikan

2.3.4.1 Desa Tongali

Fasilitas pendidikan di Desa Tongali sudah relatif baik, terdapat satu taman kanak kanak (TK), 2 sekolah dasar (SD). Untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA ada di Kecamatan Siompu. Bahkan ada pula yang melanjutkan pendidikannya di Kota Bau-Bau. Untuk saat ini, animo masyarakat di Desa Tongali untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka di perguruan tinggi cukup signifikan. Beberapa Perguruan Tinggi yang menjadi pilihan seperti yang terdapat di Kota Bau-Bau, Kendari dan Makassar. Berikut adalah diagram venn tingkat partisipasi warga yang sedang bersekolah pada tahun 2014-2015.

Gambar 2.3-7. Persentase Partisipasi Warga dalam Bidang Pendidikan



Sumber : Profil Desa Tongali, 2015.

2.3.4.2 Desa Lalole

Kesadaran masyarakat arti pendidikan di desa ini cukup baik. Kondisi tersebut ditunjang oleh ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Lalole. Terdapat satu taman kanak-kanak (TK), dua sekolah dasar (SD). Sedangkan untuk usia sekolah SMP dan SMA, melanjutkan pendidikan di Kecamatan Siompu Barat, bahkan ada pendidikan ditempuh di Kota Bau-Bau. Dari data yang ada serta keterangan yang diperoleh di lapangan, bahwa ada sebagian masyarakat yang telah menepuh pendidikan di perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi yang terdapat di Kota Bau-Bau maupun di luar Kota Bau-Bau seperti di Kendari atau di Makassar.

Tabel 2.3-1. Profil Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Lalole

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tindak Tamat SD	239
2	TK	6
3	SD	560
4	SLTP sederajat	228
5	SLTA sederajat	178
6	Akademi	43
7	Sarjana	26

Sumber : Profil Desa Lalole, 2015.

Secara keseluruhan persentase gambaran tingkat pendidikan berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilakukan di kedua desa (Desa Tongali dan Desa Lalole) terkuantifikasi seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3-2. Persentase Distribusi Penduduk Berumur 7 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Lalole			Tongali			Total (%)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Belum/tidak sekolah	4,5	6,9	5,6	1,1	2	1,6	3	4,3	3,6
Belum/tdk tamat SD	29,1	29,9	29,4	32,3	21,4	26,7	30,5	25,4	28,1
Tamat SD	27,3	25,3	26,4	19,4	21,4	20,4	23,6	23,2	23,5
Tamat SMP	20	18,4	19,3	19,4	28,6	24,1	19,7	23,8	21,6
Tamat SMA/keatas	15,5	17,2	16,2	15,1	18,4	16,8	15,3	17,8	16,5
Tamat D1/D2/D3	0,9	1,1	1	4,3	1	2,6	2,5	1,1	1,8
D4/S1 ke atas	2,7	1,1	2	8,6	7,1	7,9	5,4	4,3	4,9
N	110	87	197	93	98	191	203	185	388

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2016.

2.3.5 Sarana Kesehatan

2.3.5.1 Desa Tongali

Kondisi dan tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah termasuk di Desa Tongali sangat tergantung dari tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, polindes, dokter, tenaga medis, bidan desa, serta tersedianya obat-obatan. Di desa tongali terdapat puskesmas pembantu, satu orang perawat, satu orang bidan desa dan dua orang dukun bayi untuk membantu warga desa proses melahirkan. Disamping itu, ada juga warga memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan lokal sebagai obat berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dari generasi ke generasi.

Tabel 2.3-3. Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan di Desa Tongali

Tenaga terlatih	Jumlah	Keterangan
Dukun Desa	2 orang	1 orang sudah terlatih dan 1 orang belum. Dukun desa(dukun melahirkan) yang sudah terlatih dan biasanya bermitra dengan bidan desa dalam melayani proses persalinan ibu- ibu yang ada di desa dengan honor sesuai dengan kesanggupan warga yang melahirkan tersebut
Bidan Desa	1 orang	Bertugas dan bertempat tinggal di Desa Tongali. Keberadaannya sangat membantu warga dalam proses melahirkan
Suster	1 orang	Sangat membantu dalam proses persalinan di desa tetapi belum memadai dalam melayani masyarakat bila dibandingkan jumlah bidan dengan angka kelahiran yang ada di Desa Tongali
Kader Posyandu	5 orang	Melayani penimbangan bayi setiap bulan dengan honor Rp.200.000,- (pengganti uang tranport). Masih membutuhkan pelatihan dalam hal pengolahan data dan pelayanan posyandu

Sumber : Profil Puskesmas Pembantu Desa Tongali, 2016.

2.3.5.2 Desa Lalole

Kondisi dan tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah termaksud Desa Lalole sangat tergantung dari ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan serti puskesmas, polindes, dokter, tenaga medis, bidan desa, dan tersedianya obat-obatan. Di Desa Lalole hanya terdapat puskesmas pembantu, satu orang perawat, satu orang bidan desa dan dua dukun bayi untuk membantu penduduk dalam proses melahirkan. Disamping itu juga warga memanfaatkan tumbuhan sebagai obat berdasarkan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Keberdaan dukun urut juga dimanfaatkan oleh masyarakat di desa ini.

2.3.6 Sarana Air Bersih dan MCK

2.3.6.1 Desa Tongali

Di desa ini dijumpai sumur dengan air tawar yang digunakan untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Fasilitas pompa air juga ditemukan di sebagian rumah warga yang berfungsi untuk memasukkan air kedalam rumah dan menyimpang di penampungan-penampungan air yang mereka miliki. Untuk keperluan air minum, mereka mengandalkan air gunung yang ada di gua-gua yang airnya mengalir sepanjang musim.

Pengambilan air di gua-gua untuk kebutuhan air minum telah menjadi sumber pendapatan bagi remaja-remaja di desa ini dengan harga jual Rp. 5000,- per jeregen. Di desa ini juga ditemuka 2 buah WC umum permanen yang digunakan oleh sebagaian warga yang tidak memiliki jamban keluarga. Namun secara keseluruha nampak bahwa di hampir setiap rumah, warga di desa ini sudah memiliki jamban keluarga tersendiri.

Gambar 2.3-8. Sumur Warga di Desa Tongali



2.3.6.2 Desa Lalole

Serupa dengan Desa Tongali, warga Desa Lalole juga mengandalkan fasilitas sumur untuk keperluan kebutuhan air mereka. Bahkan di desa ini pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa penampungan air yang menjadi fasilitas umum untuk dipergunakan oleh masyarakat di Desa Lalole.

Gambar 2.3-9. Sumur Warga di Desa Lalole dengan Fasilitas Penampungan Air



2.3.7 Sarana Penerangan dan Informasi

2.3.7.1 Desa Tongali

Lampu penerangan bagi penduduk di desa ini sebagian besar menggunakan instalasi listrik yang dikelola secara swadaya oleh pemerintah desa dengan iuran Rp. 2500,- per mata lampu setiap KK yang dibayarkan setiap bulan. Generator yang berkapasitas 360 KVA berbahan bakar premium beroperasi antara pukul 17.30 – 22.00 Wita. Awal tahun 2016 generator mengalami kerusakan sehingga pemerintah desa mengantisipasi kondisi tersebut melalui dana desa untuk pengadaan lampu penerangan dari tenaga surya. Informasi dan komunikasi masih sangat terbatas fasilitas telepon yang ada masih sebatas telepon satelit, penyebaran informasi dan komunikasi antar kecamatan dengan desa-desa di wilayahnya untuk kepentingan dinas dilakukan dengan kurir. Sedangkan untuk keberadaan TV dan radio, berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan rata-rata masyarakat memiliki fasilitas tersebut. Siaran TV yang dapat akses di desa ini semua siaran TV Nasional dengan menggunakan antena petromaks

Gambar 2.3-10. Fasilitas Listrik Tenaga Surya di Warga dan Usaha Penjualan Pulsa Telepon Satelit



2.3.7.2 Desa Lalole

Informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, fasilitas telepon yang ada masih terbatas telepon satelit, penyebaran informasi dan komunikasi antara kecamatan dengan desa-desa di wilayah untuk kepentingan dinas dilakukan dengan kurir. Sedangkan untuk keberadaan TV yang dapat diterima desa ini semua siaran TV Nasional, karena ada sebagian penduduk menggunakan antena parabola, sementara itu, untuk penerangan masyarakat masih ada yang menggunakan lampu petromaks dan sebagian besar lainnya telah mengakses penerangan listrik dari PLN.

2.4 Kelembagaan Sosial

2.4.1 Desa Tongali

Kelembagaan yang dimaksud disini adalah berupa organisasi formal maupun informal yang terdapat di Desa Tongali dan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan penduduk. Keberadaan kelembagaan ini cukup penting bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan dalam menjalankan pemerintahan setempat. Selain kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa terdapat badan perwakilan desa yang berfungsi sebagai mitra kepala desa sekaligus sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat yang terdapat di Desa Tongali. Selain itu, terdapat lembaga tempat perkumpulan para pemuda seperti Karang Taruna, organisasi perempuan, LPSK coremap, LKM coremap. Efektivitas kelembagaan formal masyarakat masih belum optimal dalam operasionalnya, hal ini disebabkan karena adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki antara lain pendidikan dan keterampilan yang masih rendah dan terbatasnya personil yang bersedia menjalankan organisasi-organisasi sosial seperti ini.

Dalam hal kelembagaan tradisional, praktek-praktek lembaga *parabella* masih menjadi bagian yang mendinamisasi kehidupan masyarakat di desa ini. *Parabela* pada masyarakat suku Buton diartikan sebagai tokoh adat atau tokoh masyarakat yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Eksistensi *Parabela* dalam masyarakat Suku Buton dianggap sebagai

sesuatu yang sangat menentukan berkah tidaknya suatu kampung yang dihuni oleh masyarakat tertentu. *Parabela* di desa ini memegang peranan yang sangat penting dalam segala proses adat yang dijalankan oleh masyarakat, termasuk yang paling urgent adalah setiap ritual yang hendak dilakukan oleh masyarakat haruslah melalui persetujuan dan keterlibatan *Parabela*. Sebagai contoh, ketika hendak membuka sebuah lahan pertanian baru yang kebetulan di dalamnya masih terdapat banyak pohon besar yang oleh masyarakat setempat diyakini masih mempunyai kekuatan adikodrati, maka di situlah *Parabela* menganbil posisinya sebagai pemuka adat sekaligus pemuka agama. Sebelum pohon tersebut ditebang, ada ritual tertentu yang dilakukan oleh mereka berupa pembacaan *Bhatata* (mantra-mantra) yang dipercayai secara spiritual dapat menghilangkan pengaruh kekuatan adikodrati yang terdapat pada pohon besar tersebut sehingga nantinya tidak akan mengganggu masyarakat yang akan menggarap tanah di tempat itu. Demikian halnya gadis-gadis yang menjelang usia transisi dari remaja ke dewasa (17 tahun) harus di upacarkan melalui tradisi pingitan dengan berbagai prosesinya sebagai praktek tradisi yang terlestarikan, Semua kegiatan yang dimaksud di selenggarakan di *Baruga Parabella*.

Gambar 2.4-1. *Baruga Parabella* Bagi Masyarakat Desa Tongali yang Terletak di Desa Nggula-Nggula



2.4.2 Desa Lalole

Serupa dengan kondisi kelembagaan di Desa Tongali, keberadaan kelembagaan di Desa Lalole dianggap cukup penting bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain kepala desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa terdapat pula Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai mitra kepala desa sekaligus sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat yang terdapat di Desa Lalole. Selain itu terdapat perkumpulan para pemuda seperti karang taruna, organisasi perempuan, LPSK Coremap, LKM Coremap II, SPP blocgrant. Kelembagaan organisasi bagi kepentingan masyarakat masih sangat kurang, banyak kegiatan yang tidak terprogram dengan baik dan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena adanya berbagai keterbatasan antara lain pendidikan dan keterampilan yang masih rendah dan keterbatasan personil yang tersedia menjalankan organisasi masyarakat.

Demikian halnya kelembagaan tradisional yang ada di Desa Lalole, sebagai pewaris kebudayaan Buton, eksistensi lembaga *parabella* sangat signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di desa ini. Bahkan praktek-praktek tradisi lembaga *parabella* juga beroperasi di bidang pengelolaan sumberdaya laut yang dikenal dengan istilah *kaombo* yang prakteknya mirip dengan kebudayaan *sasi* di Maluku.

Gambar 2.4-2. *Baruga Parabella* di Desa Lalole



2.5 Program Pemberdayaan Masyarakat

Sesungguhnya sudah banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, antara lain: Bantuan budi daya rumput laut pada tahun 2012 yang dikelola secara kelompok berjumlah 10 anggota, namun dalam perkembangannya usaha budidaya rumput laut di Desa Lalole mengalami kegagalan. Selain itu, di Desa Tongali dan Desa Lalole juga diberikan pelatihan dan bantuan peralatan usah kepada kelompok Perempuan Pengolah Hasil Perikanan untuk membuat produk olahan seperti abon ikan, bakso ikan, nugget ikan dan sebagainya.

Kendatipun berbagai program pemberdayaan nelayan sudah dilakukan, bukan berarti bahwa persoalan kenelayanan telah selesai, temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai program tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan yang masih kompleks. Berbagai permasalahan tersebut meliputi; ketidakberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan yang berkaitan konflik-konflik internal antar anggota kelompok akibat adanya kecenderungan penguasaan bantuan sarana produksi yang dikuasai oleh ketua kelompok.

Temuan di dua desa penelitian menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak berlanjut, seperti budi daya ikan kerapu, budidaya rumput laut pembuatan minyak kelapa, pembuatan abon ikan, tidak berjalannya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Tongali. Semua itu menunjukkan masih lemahnya studi kelayakan yang dilakukan, serta pendampingan yang tidak berkelanjutan.

Produk-produk hasil penciptaan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dalam kenyataannya mengalami kesulitan dalam pemasaran. Persoalan teknis menyangkut teknik pengemasan produk, promosi, dan membuka jaringan pemasaran merupakan kendala utama yang membuat terhentinya kegiatan MPA. Lemahnya disiplin, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mikro, membuat lembaga ini mengalami kesulitan keuangan akibat tidak lancarnya pengembalian pinjaman (kredit macet simpan pinjam perempuan). Pada wanita yang bergerak diidang industri rumah tangga pembuatan abon ikan sempat terkendala meyangkut pemasaran dan persaingan dengan produk yang sama, sehingga produk

tersebut tidak laku dijual. Bila hal ini berkelanjutan, tentu akan berdampak serius yakni hilangnya kepercayaan bagi mereka untuk terus melakukan usaha-usaha hasil program pemberdayaan.

Bila merujuk pada konsep pemerdayaan (Eddy Ch Papilaya, 2001, 1) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan akan potensi yang dimiliki, dan berupaya mengembangkan potes itu menjadi tindakandan hasil nyata. Menurut Chambes pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Karena itu, konsep pemberdayaan lebih luas dari hanya sekedar upayantuk memenuhi kebutuhan dasar, atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses peiskinan lebih lanjut (*safty net*). (Zubaidi, 2013, 25).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep yakni konsp (*power*) dan konsep (*disadvntaged*). Dengan pemberdayaan diharapkan dapat untuk mengatasi ketimpangan yang selama ini dianggap sebagai penyebab ketidakberdayaan masyarakat. (Ife Jim, 1997, 60 – 62). Program-program MPA yang telah dilakukan sesungguhnya sudah berangkat dari potensi yang ada, tetapi belum menjawab kebutuhan yang dirasakan masyarakat, seperti perlunya peralatan teknologi tepat guna yang mudah diakses oleh masyarakat, dan pelatihan pengemasan dan yang terpenting adalah jaminan pasar. Artinya, konsep pemberdayaan diberikan tidak hanya harus dalam perspektif parsial tetapi sudah harus di dalam konteks agribisnis mulai dari hulu sampai hilir, termasuk kepastian terhadap jaminan pasar. Program-program MPA juga masih menghadapi persoalan yang tak kalah klasiknya juga, yakni tidak intensif dan berkelanjutannya kegiatan pendampingan, sehingga banyak kegiatan yang berhenti di tengah jalan.

2.6 Pengelolaan Sumber Daya Laut

Konstruksi pengelolaan sumber daya laut, sesungguhnya harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pemanfaatan yang banyak melibatkan masyarakat dengan berbagai dinamikannya dan aspek perlindungan atau konservasi

yang melibatkan lembaga pemerintah, NGO, perguruan tinggi sebagai upaya melestarikan sumberdaya alam. Dalam konteks perlindungan atau konservasi, tidak berarti tidak ada upaya masyarakat di dalamnya, berbagai studi telah menjelaskan tentang hal tersebut bahwa masih ada kearifan-kearifan lokal yang tersisa baik secara individu maupun komunal yang melakukan praktek-praktek perlindungan sumberdaya alam sebagai warisan tradisi yang diteruskan dan dijaga eksistensinya. Dengan demikian, dalam memaparkan pengelolaan sumber daya laut di wilayah studi, kedua aspek ini dimasukkan sebagai analisis dalam upaya menjelaskan fenomena pengelolaan sumberdaya laut secara komprehensif..

2.6.1 Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Dua Wilayah Studi

Berbeda dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, masyarakat nelayan di pulau ini (Desa Tongali dan Desa Lalole) *working groups* yang ada adalah usaha rumah tangga yang seluruh anggotanya adalah anggota rumah tangga (keluarga batih). Eksistensi dari kelompok ini difasilitasi oleh “*pappalele*” (orang yang memberikan pinjaman; pelepas uang) baik dalam aktivitas produksi maupun keperluan sosial lainnya. Secara fungsional keberadaan *pappalele* dalam aktivitas kenelayanan adalah sebagai berikut; (1) menyediakan modal produksi (2) menyediakan kredit alat tangkap (*fishing gear*) (3) menyediakan kredit kapal tangkap atau perahu dan (4) membeli hasil tangkapan nelayan. Pemberian pinjaman kepada para nelayan dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*), termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut melahirkan hubungan ketergantungan yang sifatnya patron-klien.

Wilayah Desa Tongali beriklim tropis, sepanjang tahun mengalami dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan atau yang dikenal pula oleh nelayan/petani yakni musim barat dan musim timur. Musim timur (musim teduh) berlangsung antara bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Pada musim ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kegiatan aktivitas penangkapan ikan. Sementara pada musim barat (musim ombak) mulai pada bulan september sampai dengan bulan

Januari. Pada musim ini masyarakat jarang melaut karena keterbatasan teknologi dalam menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim. Tabel berikut merupakan kalender musim penangkapan ikan oleh nelayan di Desa Tongali.

Tabel 2.6-1 Kalender Musim Penangkapan Ikan di Desa Tongali

Bulan	Musim			Keterangan Simbol (ikan yang tertangkap)
	Gelombang Tenang	Pancaroba	Gelombang Kuat (paceklik)	
Januari			Xxxx	
Februari			Xxx	X = sangat kurang
Maret		Xx	Xx	Xx = kurang
April	X	Xx	X	Xxx = cukup
Mei	Xx			Xxxx = banyak
Juni	Xxxx			Xxxxx = banyak sekali
Juli	Xxx			
Agustus	Xx			
September	X	Xx		
Oktober		Xx		
November			X	
Desember			Xx	

Sumber : Hasil FGD, 2016.

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa, musim gelombang tenang puncaknya terjadi pada bulan Juni-Juli selama 2 bulan. Di bulan ini hasil tangkapan ikan nelayan melimpah namun harganya relatif murah. Musim pancaroba terjadi dua kali setahun, merupakan peralihan dari musim gelombang kuat ke musim tenang atau dari musim tenang ke musim gelombang kuat. Di kedua musim ini aktifitas penangkapan ikan nelayan selalu rutin 13-28 kali sebulan dengan rata-rata hasil tangkapan 5-10 kg ikan dari berbagai jenis ikan pelagis (*laying*, *tongkol*, *lema*, *ruma-ruma*) dan ikan karang (*kerapu*, *kakap putih/merah*). Alat tangkap yang dipergunakan adalah, pancing, jaring apung, pancing ulur, (*chigi*), bubu serta panah. Sedangkan musim gelombang kuat (*paceklik*) puncaknya terjadi pada bulan Januari-Februari.

Gambar 2.6-1. Penggalian Informasi Daerah Fishing Ground Nelayan di Desa Tongali



Untuk wilayah penangkapan ikan karang di sekitar pulau Siompu. Sekitar 16 mil sebelah barat ke arah selatan pulau terdapat rumpun yang dijadikan wilayah tangkap untuk ikan tuna, sebelah barat pulau sekitar 19 mil dari pulau terdapat rumpun nelayan siompu. Antara Pulau Kadatua dan Pulau Siompu merupakan wilayah tangkap untuk ikan tongkol. Pada musim paceklik ini sebagian besar nelayan memilih aktifitas lain seperti membersihkan kebun, atau bekerja menjadi buruh.

Sementara di Wilayah Desa Lalole, keterangan dari hasil FGD (*Focus Group Discussion*) diperoleh informasi bahwa nelayan di desa ini mengenal tiga musim penangkapan yaitu; musim gelombang tenang (musim timur), musim gelombang kuat (musim barat) dan musim peralihan (musim pancaroba). Istilah musim paceklik mereka istilahkan ketika musim gelombang kuat puncak atau peralihan dari musim timur ke musim barat. Jenis-jenis ikan yang tertangkap disetiap musim yaitu : Musim Barat; Ikan Tongkol, Ikan Pogo (*Tiger Fish*), Ikan Roa, dan Ikan Tuna. Musim Pancaroba; Ikan Layang, Ikan rumah-rumah, ikan lalosi, dan Ikan Tongkol dan Musim Timur; Ikan Tongkol, Ikan Terbang, Ikan Kakak Tua, Ikan Baronang. Adapun alat tangkap yang digunakan yaitu pancing, bubu dan jaring. Hasil Tangkapan di jual di laut (*papalele*) yang berasal dari Kab. Muna dan Bau-Bau. Lamanya waktu yang digunakan sekali melaut sekitar 7 jam, mulai pukul 04.00 sampai 11.00. Daerah fishing ground berada di pulau kecil sebelah barat Pulau Siompu,

berdasarkan informasi tidak jauh dari pulau kecil tersebut terdapat rumpon milik nelayan Selayar dan Sinjai. Nelayan Lalole juga melakukan penangkapan di rumpon tersebut. Tabel berikut menggambarkan pola musim berdasarkan kalender penangkapan ikan bagi nelayan di Desa Lalole.

Tabel 2.6-2. Kalender Musim Penangkapan Ikan di Desa Lalole

Bulan	Musim			Keterangan
	Gelombang Tenang	Pancaroba	Gelombang Kuat	
Januari			Xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • X : Sangat kurang ikan di tangkap • Xx ; kurang ikan • Xxx : cukup • Xxxx : banyak • Xxxxx : banyak sekali ikan yg ditangkap
Februari			Xxx	
Maret		Xx	Xx	
April		Xx		
Mei	X			
Juni	Xx			
Juli	Xxx			
Agustus	Xxxx			
September	Xxx			
Oktober	Xx			
November	X			
Desember				

Sumber : Hasil FGD, 2016.

2.6.2 Konservasi Sumber Daya Laut di Dua Wilayah Studi

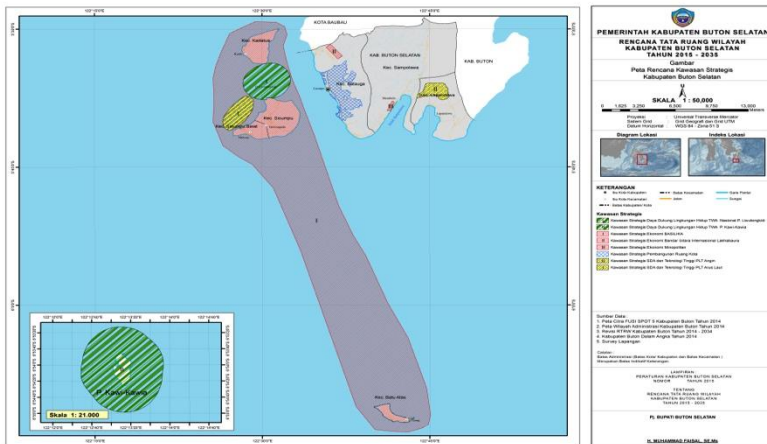
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang terdapat di Kabupaten Buton Selatan ditetapkan sejak tahun 2006 melalui Keputusan Bupati Buton No. 1578 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pulau Liwutongkidi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah. Keputusan Bupati ini berisi antara lain :

- a) Menetapkan Pulau Liwutongkidi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Buton Berbasis Masyarakat.
- b) Perlindungan dan pengelolaan Pulau Liwutongkidi sebagai Konservasi Laut Daerah (KKLD) dilaksanakan dengan pola berbasis masyarakat.

- c) Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Dalam implementasi Keputusan Bupati Buton tersebut kemudian disusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Rencana Pengelolaan KKPd berdasarkan atas pertimbangan keterpaduan antar berbagai komponen ekosistem, karena semua komponen ekosistem pesisir saling berhubungan, saling tergantung dan merupakan satu kesatuan unit fungsional yang terintegrasi. Keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan KKPd mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: (1) keterpaduan ekologis, (2) keterpaduan sektor, (3) keterpaduan disiplin ilmu, dan (4) keterpaduan *stakeholder*.

Gambar 2.6-2. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Buton Selatan



Sumber : Rencana Teknis Pemanfaatan KKPd Kab. Buton Selatan, 2015.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk memenuhi target minimal 10% dari total luasan terumbu karang di daerah serta mensinergikan dengan kawasan pengembangan pariwisata BASILIKA (Batauga, Siompu, Liwutongikidi, dan Kadatua) dan Daerah Perlindungan Laut Program COREMAP II, pada tahun 2007 Direktorat KTNL Ditjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan PT. Bina Marina Nusantara melakukan kajian rencana pengelolaan,

sehingga luasan KKPD Kabupaten Buton menjadi 283.577,33 ha yang pencanagannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Buton Nomor: 938 Tahun 2011.

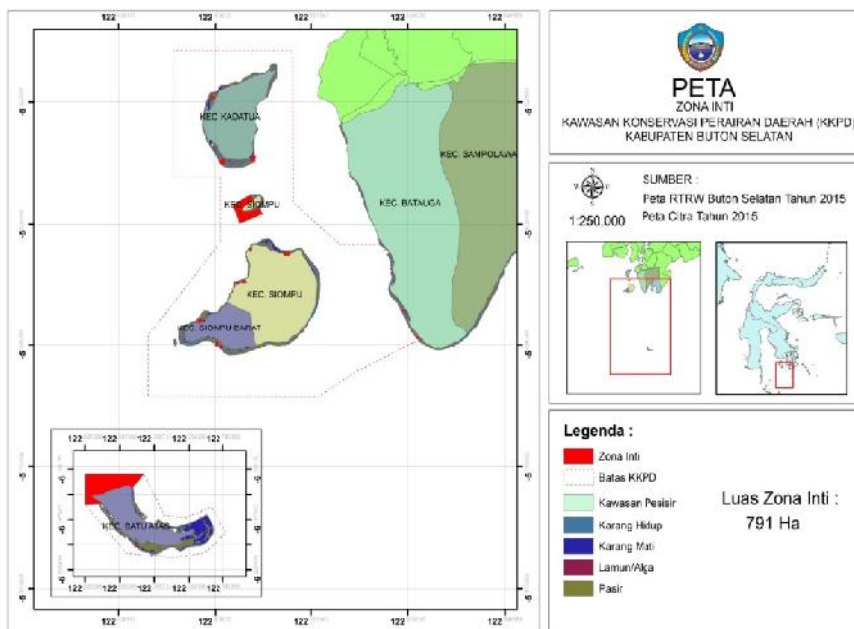
Kebijakan Pemekaran Kabupaten Buton Tahun 2014 menjadi Kabupaten Buton Selatan, maka konservasi laut BASILIKA masuk dalam wilayah otonomi Kabupaten Buton Selatan. Seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah daerah yang mulai berorientasi pada pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dengan menempatkan pendekatan konservasi didalam prinsip pengelolaannya, maka telah diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan konsep kebijakan daerah, khususnya terkait dengan pemanfaatan kawasan dan pengembangan pariwisata pantai dan pariwisata bahari, untuk menciptakan harmonisasi dan keterpaduan program dengan SKPD lain di daerah. Selain itu, prinsip pengelolaan yang dituangkan dalam Manajemen Plan KKLD (kawasan konservasi laut daerah) Kabupaten Buton, disusun belum berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan PP Nomor 60 Tahun 2007 beserta Peraturan turunannya.

Jika dilihat dalam aspek kualitas dan integritas, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi perairan di daerah ini masih sangat jauh dari yang diharapkan, bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah efektivitas dan operasional dalam mengorasionalkan pola pemanfaatan kawasan berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona perlindungan habitat, zona pemanfaatan wisata dan zona perikanan berkelanjutan. Kondisi realitas di lapangan memperlihatkan bahwa keberadaan KKP di daerah belum memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Disamping itu, kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan menggunakan tehnik dan peralatan kurang ramah lingkungan masih cukup intensif.

Kondisi ini terjadi karena diduga selama ini kawasan konservasi perairan masih dimaknai sebagai kawasan larang ambil serta belum adanya

dokumen acuan terkait dengan tehnik pemanfaatan kawasan, yang mencakup kegiatan wisata bahari dan perikanan berkelanjutan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, perlu dilakukan upaya dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan di masing-masing zona sesuai peruntukannya, sehingga upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

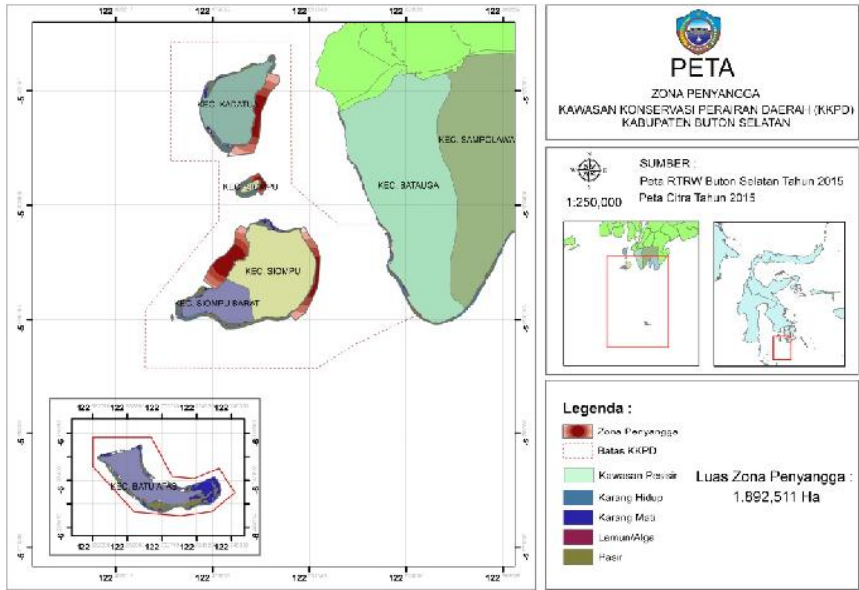
Gambar 2.6-3. Peta Zona Inti KKPD Buton Selatan



Sumber : Rencana Teknis Pemanfaatan KKPD Kab. Buton Selatan, 2015.

Salah satu upaya dan strategi pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat dilakukan adalah perlu diadakan dokumen acuan sebagai Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi di dalam pemanfaatan masing-masing zonasi. Hal ini menjadi penting dan strategis karena dokumen tersebut akan menjadi acuan umum bagi stakeholder berkepentingan didalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan.

Gambar 2.6-4. Peta Zona Penyangga KKPD Buton Selatan

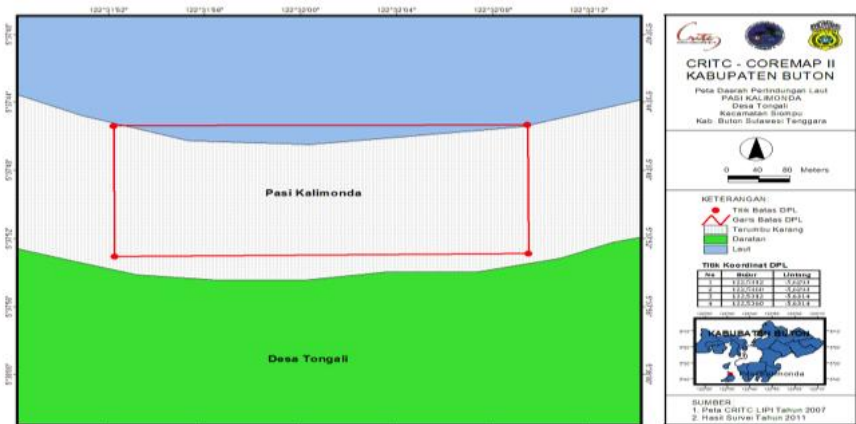


Sumber : Rencana Teknis Pemanfaatan KKPD Kab. Buton Selatan, 2015.

Penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai salah satu daerah perlindungan yang diinisiasi oleh masyarakat merupakan langkah strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Keberadaan DPL yang dimiliki setiap daerah, disamping berpotensi untuk mengembalikan kondisi ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai site-site penyelaman baik untuk tujuan wisata bahari maupun untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Di dua desa penelitian (Desa Tongali dan Desa Lalole) juga dijumpai DPL. Hal yang menarik sebagai pembelajaran dalam hal DPL di Desa Tongali dan Desa Lalole adalah keterlibatan kelembagaan lokal dalam hal praktek tradisi kaombo, khususnya sangksi-sangksi yang diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar dari aturan yang telah ditetapkan dalam operasional DPL yang dimaksud. Salah satu contoh misalnya, untuk zona larang pengambilan sumber daya perikanan (zona

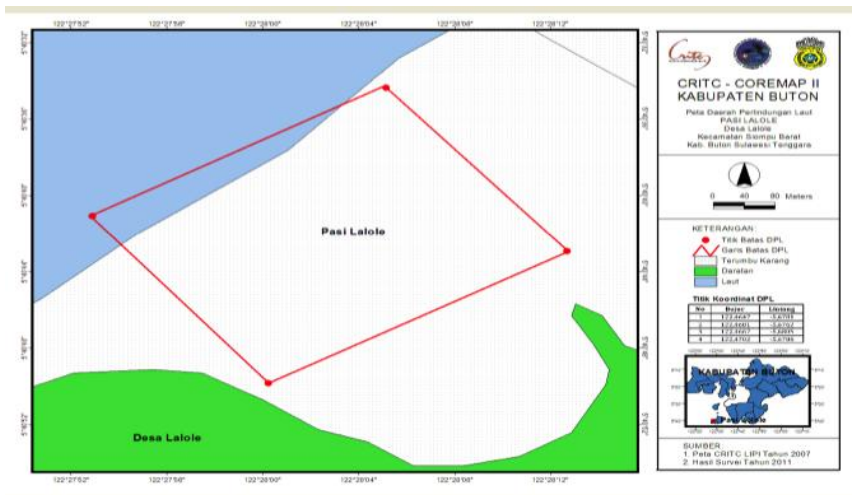
inti), bagi masyarakat yang melanggar aturan ini dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- yang diawasi dan dikelola oleh lembaga adat *parabella* dan pemerintah desa.

Gambar 2.6-5. Daerah Perlindungan Laut Pasi Kalimonda di Desa Tongali



DKP Kabupaten Buton Selatan, 2015

Gambar 2.6-6. Daerah Perlindungan Laut Pasi Lalole di Desa Lalole



DKP Kabupaten Buton Selatan, 2015

Namun demikian, penerapan KKLD tidak harus mengurangi peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan wilayah perairan konservasi. Artinya, masuknya DPL kedalam kawasan konservasi KKLD jangan sampai memunculkan kesalahpahaman masyarakat seolah-olah kewenangan pengelolaan kawasan perairan DPL suda diambil alih oleh pemerintah daerah, sehingga bias saja masyarakat besikap masa bodoh terhadap aktivitas kenelayanan yang terjadi di kawasan konservasi. Kondisi ini harus diantisipasi didalam memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa ketidakjelasan tanda batas zona kawasan KKLD serta aturannya, karena ketiadan tanda batas, minimnya informasi yang diterima masyarakat, tidak ditemukannya papan-papan plank yang menunjukkan bahwa suatu kawasan perairan tertentu menjadi kawasan konservasi di duga dapat menjadi potensi yang menyebabkan kawasan tersebut tidak efektif dalam pengelolaannya.

BAB III POTRET PENDUDUK

3.1 Jumlah dan Komposisi

3.1.1 Jumlah dan Karakteristik Penduduk

Kabupaten Buton Selatan mempunyai jumlah penduduk sebesar 76.738 jiwa pada tahun 2013. Dilihat dari luas wilayah pada tahun 2013, Kecamatan Sampolawa mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 153,57 km², Kecamatan Sampolawa mempunyai rasio jumlah penduduk sebesar 26,92% dari total penduduk Kabupaten Buton Selatan. Kecamatan yang terluas kedua yaitu Kecamatan Batauga seluas 94,69 km², Kecamatan Batauga mempunyai rasio jumlah penduduk sebesar 18,78% dari total penduduk Kabupaten Buton Selatan. Kecamatan yang terluas ketiga yaitu Kecamatan Lapandewa seluas 44,54 km², Kecamatan Lapandewa mempunyai rasio jumlah penduduk sebesar 10,4% dari total penduduk Kabupaten Buton Selatan. Luas wilayah di Kabupaten Selatan yang paling kecil adalah wilayah Kecamatan Batuatas yaitu 7,18 km², Kecamatan batuatas mempunyai rasio jumlah penduduk sebesar 10,99% dari total penduduk Kabupaten Buton Selatan. Jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1-1. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah (km ²)	Penduduk		Kepadatan (jiwa/km ²)
				Jumlah (jiwa)	Persentasi (%)	
1	Sampolawa	16	153,57	20,659	26,92	134,52
2	Batuatas	10	7,18	8.430	10,99	1134,09
3	Lapandewa	7	44,54	7.980	10,40	179,16
4	Batauga	12	94,69	14.415	18,78	152,23
5	Siompu	10	38,08	8.998	11,73	236,29
6	Kadatun	10	32,82	7.911	10,31	241,04
7	Siompu Barat	8	10	8.345	10,87	834,5
Jumlah		73	380,88	76.738	100	2951,85

Sumber : Kecamatan dalam angka 2014,(Diolah)

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton Selatan tidak begitu besar, rata-rata sekitar 0,63% selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Tren penambahan penduduk Kabupaten Buton Selatan menurun dari kurun waktu tahun 2009 ke tahun 2013, tetapi tren penurunannya tidak besar. Pertumbuhan jumlah penduduk ini belum diimbangi dengan persebaran penduduk yang lebih merata antara 1 lokasi dengan lokasi lain seperti antara kota-desa dan antar pulau. Dilhat dari kepadatan penduduk (jumlah penduduk/ km²) pada tahun 2013. Kecamatan Batuatas merupakan kecamatan yang paling padat dengan tingkat kepadatan 1.174,09 jiwa/km², sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Sampolawa dengan tingkat kepadatan 134,52 jiwa km².

3.1.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat

Jumlah penduduk di Kecamatan Siompu Berdasarkan hasil pencatatan tahun 2014 adalah sebesar 10.306 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5,168 jiwa dan perempuan 5,138 jiwa dengan rasio jenis kelamin (RJK) 99 persen. Jumlah rumah tangga di Kecamatan Siompu mencapai 2,255 dengan rata-rata anggota rumah berjumlah 4 orang, rata-rata jumlah anggota rumah tangga terbanyak adalah Desa Ngula-ngula yaitu 8 orang.

Sebaran penduduk menurut wilayah administrasi memperlihatkan bahwa Desa Ngula-ngula merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 1.518 jiwa, kemudian Wakinambaro 1.297 jiwa, disusul Biwinapada 1.203 jiwa, Lontoi 1.031 jiwa, Kaimbulawa 1.014 jiwa, Tongali 98 jiwa, Batuawu 843 jiwa, Lapara 842 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Desa Waindawula. Luas wilayah sebesar 85,35 km², kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 121 jiwa/km². Desa Wakinamboro memiliki kepadatan tertinggi yaitu 305 jiwa, sedangkan Desa Waindawula menjadi desa dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni 55 jiwa/km² artinya setiap 1 km² dihuni oleh penduduk sejumlah 55 jiwa.

Tabel 3.1-2. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Anggota Rumah Tangga dan Kepadatan menurut desa di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2014

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		L+P	RJK	Jml RT	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		L	P				
1	Biwinapada	610	593	1,203	103	267	124
2	Kaimbulawa	501	513	1,014	98	310	97
3	Wakinamboro	661	636	1,297	104	246	305
4	Tongali	495	491	986	101	322	154
5	Lontoi	507	524	1,031	97	212	103
6	Karae	369	374	743	99	114	74
7	Batuawu	426	417	843	102	143	169
8	Nggula- nggula	759	759	1,518	100	258	156
9	Lapara	424	418	842	101	191	156
10	Waindawula	416	413	829	101	192	55
Jumlah		5,168	5,138	10,306	99	2,255	121

Sumber : Kecamatan Siompu Dalam Angka, 2014

Jumlah penduduk yang tercatat disetiap desa di Kecamatan Siompu Barat hingga akhir tahun 2014 adalah sebesar 8.346 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 10 km², tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Siompu Barat mencapai angka 835 jiwa/km². Desa Molona menjadi desa dengan jumlah penduduk terpadat yakni pada angka 1357 jiwa/km² yang berarti bahwa setiap 1 km rata-rata dihuni oleh 1.357 jiwa, sedangkan Desa Lalole menjadi desa dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni 442 jiwa/km² yang berarti bahwa setiap 1 km rata-rata hanya dihuni oleh sejumlah 442 orang penduduk. Adapun rasio perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di wilayah kecamatan ini hampir berbanding rata, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.121 jiwa atau hanya selisih 104 jiwa dari jumlah penduduk perempuan yakni sebanyak 4225 jiwa. Desa Molona merupakan desa dengan penduduk yang paling terbesar yaitu 1.533 jiwa, dengan persebaran penduduk terbesar pula yaitu sebesar 18,35 persen. Persebaran penduduknya terkecil desa Siompu Barat Makmur yaitu 8,69 persen.

Tabel 3.1-3. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Anggota Rumah Tangga dan Kepadatan menurut desa di Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2014

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		L+P	RJK	Jml RT	Kepadatan (Jiwa/ Km2)
		L	P				
1	Lalole	305	459	764	115	240	442
2	Molona	453	729	1182	96	413	1,357
3	Mbanua	485	496	981	85	435	566
4	Watuampara	327	570	897	117	310	501
5	Katampe	291	430	721	103	267	1,026
6	Lamaninggara	383	598	981	103	380	645
7	Kamoali*	303	496	799	126	295	0
8	Mokobeau*	241	344	585	96	230	0
Jumlah		2,788	4,122	6,910	103	2,570	835

Sumber : Kecamatan Siompu Barat Dalam Angka, 2014

Hasil survei struktur penduduk di kedua desa terpilih yaitu Desa Tongali dan Desa Lalole termasuk dalam katagori penduduk usia Dewasa, dengan persentase mencapai lebih 40 persen untuk penduduk berumur di atas 20 tahun, sedangkan penduduk lanjut usia di Desa Tongalisangat rendah ditunjukkan dengan rendah proporsi pendudukan lansia sekitar 0.4 persen sedangkan Desa Lalole relative tinggi yaitu sekitar 10.7 persen (Lihat Tabel 3.1.4 dan Gambar 3.1.1.). Besarnya proporsi penduduk usia produktif menunjukan rendahnya beban ketergantungan penduduk produktif di kedua lokasi penelitian. Akan tetapi, meningkatnya penduduk usia produktif dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan akan berdampak peningkatan penduduk non produktif atau penduduk berusia 5 tahun ke bawah.

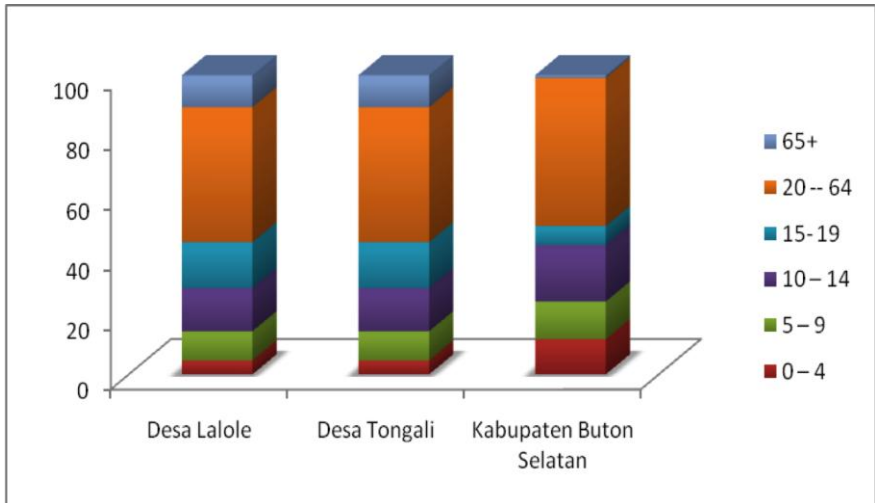
Tabel 3.1-4. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)

Kelompok Umur	Desa Lalole			Desa Tongali			Kabupaten Buton Selatan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
0 – 4	4.2	5.2	4.7	11.7	12.0	11.8	7.8	8.9	8.4
5 – 9	10.1	9.4	9.8	12.6	12.8	12.7	11.3	11.3	11.3
10 – 14	16.0	12.5	14.4	18.9	10.3	14.5	17.4	11.3	14.4
15 - 19	16.0	14.6	15.3	6.3	13.7	10.1	11.3	14.1	12.6
20 - 64	40.3	51.0	45.1	49.5	51.3	50.4	44.8	51.2	47.9
65+	13.4	7.3	10.7	0.9	0.0	0.4	7.4	3.3	5.4
N	119	96	215	111	117	228	230	309	443

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Penduduk usia balita 0 – 4 tahun untuk Desa Lalole relatif rendah yaitu sekitar 4.7 persen sedangkan Desa Tongali cukup besar yaitu sekitar 11.8 persen. Tinggi rendahnya jumlah balita di suatu daerah menunjukkan tingkat/angka kelahiran di desa tersebut. Dilihat dari kelompok umur penduduk usia kerja yaitu berumur 15 tahun keatas, dapat dibedakan menjadi tiga katagori, yaitu penduduk usia kerja produktif tidak penuh (15 – 19 tahun), penduduk usia kerja produktif penuh (20- 64 tahn) dan penduduk usia kerja tidak produktif (65 tahun ke atas). Di dua desa terpilih di Kabupaten Buton Selatan memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia kerja produktif tidak penuh relatif berkisar 10 sampai dengan 16 persen, proporsi terbesar terdapat di Desa Lalole mencapai 15,3 persen, Sedangkan Desa Tongali dengan proporsi 10,1 persen. Proporsi penduduk usia kerja produktif penuh terbesar adalah Desa Tongali mencapai 50,4 persen dan Desa Lalole (45,1 persen). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kedua desa memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam upaya meningkatkan roda perekonomian, baik ditingkat desa maupun kabupaten.

Gambar 3.1-1. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)



Sumber : Olahan Data Primer, 2016.

3.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat.

Kualitas sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumberdaya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

3.2.1 Pendidikan dan Keterampilan

Di era modernisasi global sekarang ini, sektor mutu sumberdaya manusia terlihat menjadi hal yang sangat mendasar yang sangatlah perlu mendapat perhatian utama dari semua pihak dalam hal ini pemerintah dan masyarakatnya. Merujuk pada hal tersebut, maka faktor utama pembentuknya telah sangat jelas yakni segi pendidikan. Di kecamatan Siompu sendiri, pembangunan sektor pendidikan dapat dinilai telah berjalan cukup maksimal. Selama tahun 2014 telah terdapat 7 gedung TK, 10 gedung SD, 4 gedung SLTP dan 1 gedung SLTA yang berada di desa Tongali, sehingga secara keseluruhan sarana gedung untuk sekolah di Kecamatan Siompu berjumlah 22 gedung. Pemerintah juga telah menghadirkan sejumlah 170 orang tenaga pengajar yang tersebar di seluruh desa. 170 orang tersebut mengajar di semua tingkatan pendidikan yang keseluruhan siswanya berjumlah 2.682 orang.

Tabel 3.2-1. Jumlah Murid yang Lulus Ujian Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2013/2014 di Kecamatan Siompu

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Taman Kanak-Kanak (Swasta)	0	0	0
2	Sekolah Dasar (Negeri)	137	144	281
3	SLTP (Negeri)	85	65	150
4	SLTA (Negeri)	26	30	56
Jumlah		248	239	487

Sumber :Kecamatan Siompu Barat Dalam Angka, 2014

Seiring dengan lajunya pembangunan dibidangn pendidikan, Kecamatan Siompu Barat telah memiliki 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan 1 PAUD, 7 SD dan 2 SLTP negeri dan 1 SLTA, dengan didukung sumberdaya guru yaitu TK, 68 guru SD, 27 guru SLTP dan 29 guru SLTA. Untuk data jumlah Murid yang lulus ujian menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.2-2.

Tabel 3.2-2. Jumlah Murid yang Lulus Ujian Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2013/2014 di Kecamatan Siompu Barat

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Taman Kanak-Kanak (Swasta)	20	27	47
2	Sekolah Dasar (Negeri)	99	115	214
3	SLTP (Negeri)	77	111	188
4	SLTA (Negeri)	71	54	125
Jumlah		267	307	574

Sumber : *Kecamatan Siompu Barat Dalam Angka, 2014*

Berdasarkan hasil survei, mayoritas penduduk berumur 7 tahun ke atas yang berpendidikan tamat SMP ke bawah mencapai 80,7 persen. Dilihat dari jenjang pendidikan dan masing-masing desa, Desa Tongali adalah desa dengan proporsi tertinggi dengan tingkat pendidikan tamat SMP yang mencapai 24,1 persen, kemudian Desa Lalole (19,3 persen). Sedangkan tingkat pendidikan dasar, dengan persentase terendah adalah Desa Tongali (20,4 persen) dan Desa Lalole (26,4 persen). Desa Lalole adalah desa dengan proporsi terbesar pada tingkat pendidikan tidak tamat SD yang mencapai 35 persen (Lihat Tabel 3.2-3). Secara umum, kedua desa terpilih memiliki sarana pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah pertama (SMP) bahkan SMP pertama yang ada di Pulau Siompu terletak di Desa Tongali. Kelengkapan fasilitas tersebut, sejalan dengan mayoritas tingkat pendidikan di Desa Tongali dan Desa Lalole. Pada tingkat pendidikan pendidikan tamat SMA, Desa Lalole dan Tongali hampir sama yaitu masing-masing 16,2 persen dan 16,8 persen. Pada tingkat pendidikan tamat D1 ke atas, Desa Tongali memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Lalole yaitu masing-masing 10,5 persen dan 3 persen (Lihat Tabel 3.2-3). Tingginya tingkat pendidikan di Desa Tongali sangat dipengaruhi dengan letak geografi yang berdekatan dengan Kota Bau-Bau, serta lancar aksesibilitas transportasi ke daratan. Desa Tongali merupakan desa yang

paling lengkap memiliki beragamnya fasilitasn pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah atas.

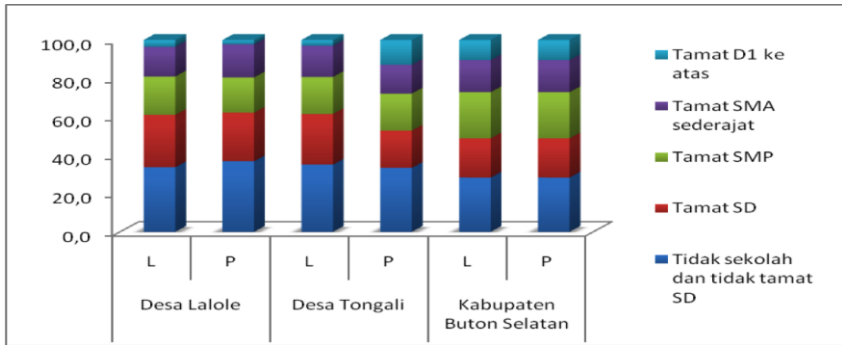
Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan perempuan dikedua desa terpilih hamper sama dengan laki-laki pada jenjang pendidikan mulai dari mulai dari jenjang pendidikan tamat SMP sampai dengan tamat Diploma ke atas. Ini membuktikan bahwa status perempuan dan laki-laki dikedua desa tersebut sama. Semuanya sudah diberikan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.2-3. Distribusi Penduduk Berumur 7 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang DitamatkanDi Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)

Tingkat Pendidikan	Desa Lalole			Desa Tongali			Kabupaten Buton Selatan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak sekolah dan tidak tamat SD	33.6	36.8	35.0	33.3	23.5	28.3	33.5	29.7	31.7
Tamat SD	27.3	25.3	26.4	19.4	21.4	20.4	23.6	23.2	23.5
Tamat SMP	20.0	18.4	19.3	19.4	28.6	24.1	19.7	23.8	21.6
Tamat SMA sederajat	15.5	17.2	16.2	15.1	18.4	16.8	15.3	17.8	16.5
Tamat D1 +	3.6	2.3	3.0	12.9	8.2	10.5	7.9	5.4	6.7
N	110	87	197	93	98	191	203	185	388

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Gambar 3.2-1. Distribusi Penduduk Berumur 7 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)



3.2.2 Pekerjaan

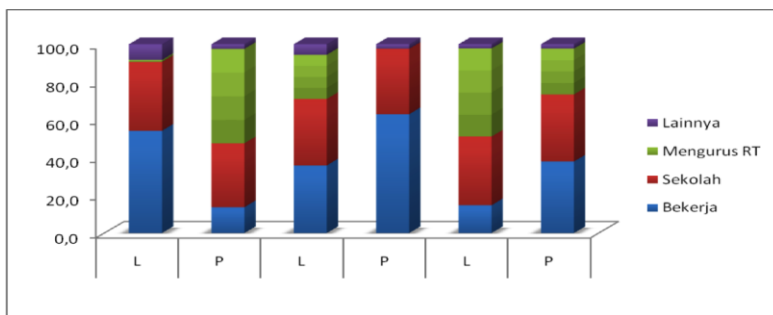
Pada umumnya di Desa Tongali dan Lalole, persentase jumlah laki-laki yang bekerja lebih tinggi daripada perempuan (Tabel 3.2.2.2). Untuk kegiatan utamanya sekolah antara Desa Lalole dan Tongali jumlah persentase hampir sama yaitu masing-masing 35,2 persen dan 35,6 persen. Kegiatan mengurus rumah tangga selalu didominasi oleh perempuan baik di Desa Lalole maupun di Desa Tongali. Hal ini membuktikan bahwa adanya pembagian peran antara perempuan sebagai pengelola dan mengatur urusan rumah tangga sementara laki-laki bertugas mencari nafkah untuk keluarganya. Jumlah Responden atau sampel berjumlah 100 rumah tangga dengan masing-masing desa berjumlah 50 rumah tangga.

Tabel 3.2-4. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Persentase)

Kegiatan Utama	Desa Lalole			Desa Tongali			Kabupaten Buton Selatan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Bekerja	54.2	13.8	35.8	63.0	14.8	37.9	58.2	14.3	36.8
Sekolah	36.5	33.8	35.2	34.6	36.4	35.5	35.6	35.1	35.4
Mengurus RT	1.0	50.0	23.3	0.0	46.6	24.3	0.6	48.2	23.8
Lainnya	8.3	2.5	5.7	2.5	2.3	2.4	5.6	2.4	4.1
N	96	80	176	81	88	169	177	168	345

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Gambar 3.2-2. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Persentase)



3.2.2.1 Pekerjaan Utama

Persentase distribusi penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Buton Selatan pada kedua desa tidak berbeda jauh, dimana persentase terbesar didapatkan di Desa Tongali yaitu terlihat pada Tabel 3.4 lapangan pekerjaan utama di desa Laloe dibidang perikanan tangkap menunjukkan persentasi terbesar yaitu 41,0 persen, sedangkan persentasi terbesar di Desa Tongali yaitu dibidang Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 27,7 persen. Hasil rata-rata persentasi lapangan

pekerjaan utama di Kabupaten Buton Selatan yaitu di bidang perikanan Tangkap sebesar 33.3 persen.

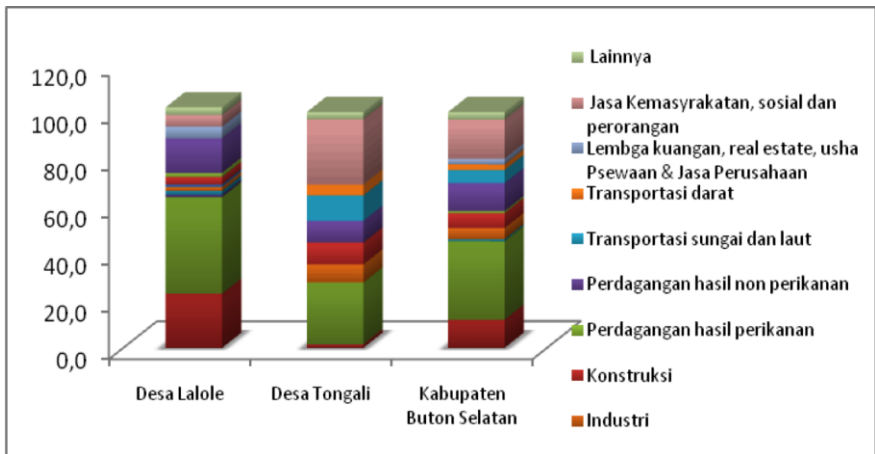
Adanya perbedaan jenis pekerjaan utama pada setiap desa dimana tidak adanya penduduk yang bekerja dibidang transportasi laut dan transportasi darat di desa Lalole sedangkan di desa Tongali tidak adanya penduduk yang bekerja dibidang pertambangan dan penggalian, perdagangan hasil perikanan, dan Lembaga keuangan, real estate, usaha Persewaan & Jasa Perusahaan.

Tabel 3.2-5. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)

Lapangan Pekerjaan Utama	Desa Lalole	Desa Tongali	Kab. Buton Selatan
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, perburuan	23.0	1.5	11.9
Perikanan tangkap	41.0	26.2	33.3
Pertambangan dan penggalian	1.6	0.0	0.8
Industri	1.6	7.7	4.8
Konstruksi	3.3	9.2	6.3
Perdagangan hasil perikanan	1.6	0.0	0.8
Perdagangan hasil non perikanan	14.8	9.2	11.9
Transportasi sungai dan laut	0.0	10.8	5.6
Transportasi darat	0.0	4.6	2.4
Lembaga keuangan, real estate, usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	4.9	0.0	2.4
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan	4.9	27.7	16.7
Lainnya	3.3	3.1	3.2
N	61	65	126

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Gambar 3.2-3. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)



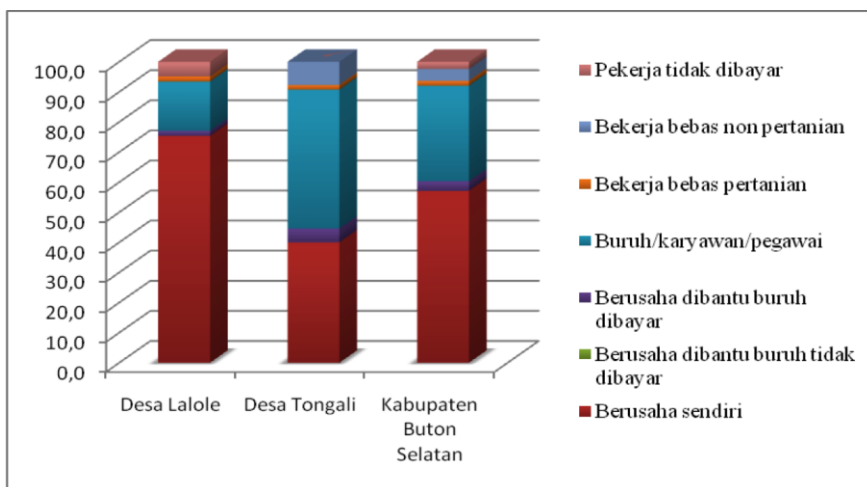
Total jumlah penduduk terbesar yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Buton Selatan yaitu persentasi status pekerjaan terbesar di desa Lalole dengan usaha sendiri sekitar 75.4 persen hal ini menunjukkan bahwa penduduk di desa laloe mendapatkan mata pencaharian dengan membuka pekerjaan sendiri. Di desa Tangali status pekerjaan sebagai buruh, karyawan dan pegawai sekitar 46.2 persen merupakan persentasi status pekerjaan terbesar, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jenis pekerjaan di Desa Tongali berptofesi sebagai buruh, karyawan dan pegawai. Pada umumnya status pekerjaan di Kabupaten Buton Selatan mendapatkan pekerjaan dengan usaha sendiri dengan persentasi sebesar 57.1 persen. Persentase status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak dibayar tidak di temukan pada setiap desa sedangkan status perkerja bebas non pertanian tidak ditemukan di Desa Lalole dan status bekerja tidak dibayar tidak di temukan di Desa Tongali.

Tabel 3.2-6. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Persentase)

Status Pekerjaan	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Berusaha sendiri	75.4	40.0	57.1
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar	0.0	0.0	0.0
Berusaha dibantu buruh dibayar	1.6	4.6	3.2
Buruh/karyawan/pegawai	16.4	46.2	31.7
Bekerja bebas pertanian	1.6	1.5	1.6
Bekerja bebas non pertanian	0.0	7.7	4.0
Pekerja tidak dibayar	4.9	0.0	2.4
N	61	65	126

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait, 2016.

Gambar 3.2-4. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Persentase)



○ **Pekerjaan Tambahan Utama**

Jenis pekerjaan tambahan utama di Desa Lalole di bidang Kontruksi sebesar 66.7 persen dan di bidang perikanan tangkap sebesar 33.3 persen, sedangkan di desa Tangoli masing-masing lapangan pekerjaan di bidang pertanian (pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), perdagangan (perikanan dan non perikanan) dan transportasi darat, sungai dan laut sebesar 11.1 persen, perikanan tangkap, kontruksi, serta jasa sebesar 22.2 persen. Jenis lapangan pekerjaan tambahan di desa Tongali jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa Lalole.

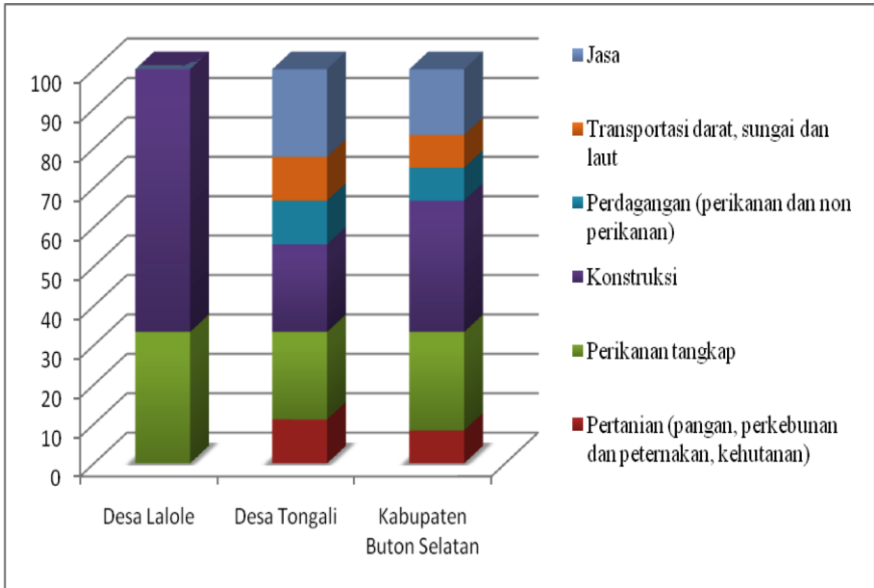
Tabel 3.2-7. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016

(Persentase)

Lapangan Pekerjaan Tambahan Utama	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Pertanian (pangan, perkebunan dan peternakan, kehutanan)	0.0	11.1	8.3
Perikanan tangkap	33.3	22.2	25.0
Perikanan budidaya	0.0	0.0	0.0
Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0
Industri (pengolahan dan rumah tangga)	0.0	0.0	0.0
Konstruksi	66.7	22.2	33.3
Perdagangan (perikanan dan non perikanan)	0.0	11.1	8.3
Transportasi darat, sungai dan laut	0.0	11.1	8.3
Jasa	0.0	22.2	16.7
Lainnya: Listrik, air, gas; keuangan	0.0	0.0	0.0
N	3	9	12

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Gambar 3.2-5. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)



Berdasarkan tabel 3.2.7 total jumlah penduduk terbesar yang bekerja menurut status pekerjaan tambahan di Kabupaten Buton Selatan yaitu persentasi status pekerjaan tambahan terbesar di desa Lalole sebesar 66.7 persen sebagai Buruh/karyawan/pegawai. Hal yang berbeda didapatkan di desa Tangali status pekerjaan berusaha sendiri sekitar 55.6 persen merupakan persentasi status pekerjaan terbesar, hal ini menunjukkan bahwa penduduk di desa Tangali memiliki untuk berusaha sendiri untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Sedangkan hasil rata-rata pekerjaan tambahan di Buton Selatan sebesar 50 persen dengan mendapatkan pekerjaan tambahan dengan berusaha sendiri.

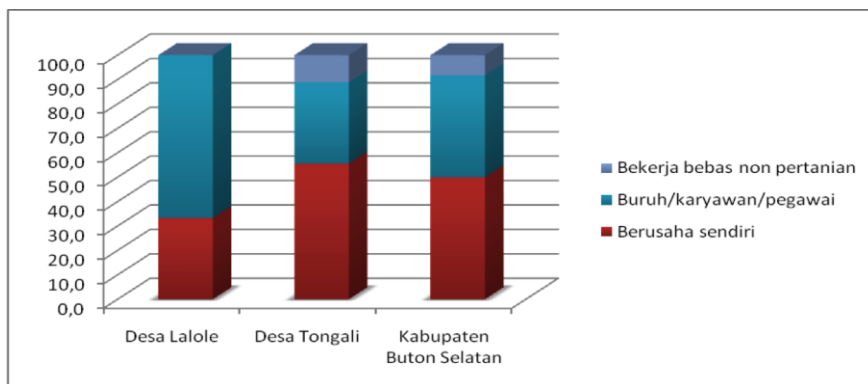
Tabel 3.2-8. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016

(Persentase)

Lapangan Pekerjaan Tambahan Utama	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Berusaha sendiri	33.3	55.6	50.0
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar	0.0	0.0	0.0
Berusaha dibantu buruh dibayar	0.0	0.0	0.0
Buruh/karyawan/pegawai	66.7	33.3	41.7
Bekerja bebas pertanian	0.0	0.0	0.0
Bekerja bebas non pertanian	0.0	11.1	8.3
Pekerja tidak dibayar	0.0	0.0	0.0
N	3	9	12

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Gambar 3.2-6. Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tambahan Utama di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Persentase)



3.3 Kesejahteraan

3.3.1 Pemilikan dan penguasaan Aset Produksi dan Non Produksi

Distribusi alat/ sarana produksi di Kabupaten Buton Selatan rata-rata alat/sarana produksi terbesar yaitu jaring insang (*gill net*) namun terlihat adanya perbedaan jenis dan jumlah alat/sarana pada setiap desa. Di desa Tongali jenis alat/sarana yang banyak di temukan yaitu bagan (kelong, sero, tancap, apung) dan pancing rawai, ulur, tonda sebesar 30 persen, sedangkan di desa Lalole jenis alat/sarana yang banyak di temukan yaitu jaring insang (*gill net*) sebesar 76 persen. Namun jenis alat/sarana kapal motor (mesin di dalam dan GT), karamba dan tambak tidak ditemukan di Kabupaten Buton Selatan hal ini menunjukkan bahwa nelayan di Kabupaten Buton Selatan hanya memiliki perahu yang berukuran sedang/kecil.

Tabel 3.3-1. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Kepemilikan Alat/Sarana Produksi di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016.

Alat/Sarana	Desa Lalole		Desa Tongali		Kabupaten Buton Selatan	
	Jml	% RT	Jml	% RT	Jml	% RT
Perahu tanpa motor	11	22.0	7	14.0	18	18.0
Perahu dengan motor (tempel dan motor dalam)	13	26.0	12	24.0	25	25.0
Kapal motor (mesin di dalam dan GT)	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Karamba	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Bagan (kelong, sero, tancap, apung)	3	6.0	15	30.0	18	18.0
Bubu	13	26.0	0	0.0	13	13.0
Muro ami/pukat cincin/kantong/udang	1	2.0	0	0.0	1	1.0
Jaring insang (<i>gill net</i>)	38	76.0	10	20.0	48	48.0

Alat/Sarana	Desa Lalole		Desa Tongali		Kabupaten Buton Selatan	
	Jml	% RT	Jml	% RT	Jml	% RT
Pancing rawai, ulur, tonda	18	36.0	15	30.0	33	33.0
Tambak	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Alat transportasi komersil	1	2.0	11	22.0	12	12.0
Lahan (pangan dan/perkebunan)	27	54.0	1	2.0	28	28.0
N	50		50		100	

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Hasil statistik kepemilikan barang-barang berharga rumah tangga di Kabupaten Buton Selatan yang banyak dimiliki oleh penduduk yaitu perhiasan (gram) dimana di desa Tongali perhiasa emas sebesar 372 persen sedangkan di Desa Lalole yaitu 852 persen. Namun jenis barang-barang berharga yang tidak dimiliki pada setiap desa yaitu hewan peliharaan (sapi,kerbau, kambing, dan babi). Dilihat dari Tabel 3.9 jenis barang berharga yang di miliki penduduk selain emas yaitu bahan elektronik.

Tabel 3.3-2. StatistikKepemilikan Barang-Barang Berharga Rumah Tangga Terpilih di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016.

Alat/Sarana	Desa Lalole		Desa Tongali		Kabupaten Buton Selatan	
	Jml	% RT	Jml	% RT	Jml	% RT
Rumah	48	96	40	80	88	88
TV	45	90	36	72	81	81
VCD player	14	28	9	18	23	23
Parabola	5	10	35	70	40	40
Perhiasan (gram)	426	852	186	372	612	612
Kendaraan bermotor Roda dua dan/atau tiga	17	34	35	70	52	52
Kendaraan bermotor	5	10	0	0	5	5

Alat/Sarana	Desa Lalole		Desa Tongali		Kabupaten Buton Selatan	
	Jml	% RT	Jml	% RT	Jml	% RT
Roda empat						
Sapi	0	0	0	0	0	0
Kerbau	0	0	0	0	0	0
Kambing	0	0	0	0	0	0
Babi	0	0	0	0	0	0
Lainnya: ayam, bebek	3	6	100	200	103	103
Lainnya: HP, kipas angin	58	116	139	278	197	197
N Desa	50		50		100	

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

4.1.2 Pendapatan Sektor Pertanian/Perikanan

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Buton Selatan, peranan sektor-sektornya dapat dilihat dari distribusi nilai tambah sektor tersebut terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada Tahun 2015 sektor pertambangan telah menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Buton Selatan dengan kontribusi sebesar 30,42 persen terhadap PDRB. Setelah itu terdapat lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi yang hampir sama dengan lapangan usaha pertambangan yaitu 30,18 persen. Besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian dan pertambangan ini menunjukkan bahwa perekonomian Buton Selatan masih bertumpu pada sektor primer. Selain itu, lapangan usaha konstruksi menyumbang 14,23 persen terhadap PDRB. Peranan lapangan usaha perdagangan juga cukup besar yaitu mencapai 8,14 persen terhadap PDRB. Perlu digarisbawahi bahwa peranan lapangan usaha industri pengolahan masih sangat kecil, hanya sekitar 3,98 persen (Tabel 4.1.2).

Tabel 4.1-2. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015(Persentase)

No	Lapangan Usaha/Sektor	Distribusi
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30.15
2	Pertambangan dan Penggalian	30.42
3	Industri Pengolahan	3.98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.29
6	Konstruksi	14.23
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.14
8	Transportasi dan Pergudangan	0.89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.14
10	Informasi dan Komunikasi	0.94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.43
12	Real Estate	0.07

13	Jasa Perusahaan	0.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.75
15	Jasa Pendidikan	5.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.40
17	Jasa Lainnya	0.65

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Buton Selatan, 2016

Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan nilai tambah perekonomian di Kabupaten Buton Selatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.2 dengan kontribusi yang hampir sama dengan lapangan usaha pertambangan yaitu 30,18 persen. Berdasarkan data BPS, volume produksi perikanan tangkap mengalami perkembangan yang 2016meningkat selama periode 2008 hingga periode 2013. Pada tahun 2008 volume produksi perikanan tangkap sebesar 40.440,28 ton dan pada tahun 2013 mencapai 54.988,47 ton. Produksi perikanan tangkap selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.1-3.

Tabel 4.1-3. Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2008 - 2014

Kecamatan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sampolawa	7,968.80	9,247.20	9,437.18	9,627.16	10,418.87	11,356.57
Batuatas	5,663.28	5,116.80	5,225.03	5,283.26	5,345.40	5,826.48
Lapandewa	4,960.16	4,756.96	4,824.37	4,842.37	4,947.17	5,392.41
Batuaga	3,845.08	4,065.24	4,163.09	4,260.93	4,999.76	5,449.74
Siompu	4,024.24	4,668.08	4,874.71	5,081.33	5,462.76	5,954.41
Kadatua	9,124.65	15,090.60	17,363.67	19,636.73	16,538.41	18,026.85
Siompu Barat	4,854.16	2,629.40	2,670.85	2,712.30	2,735.79	2,982.01
jumlah	40,440.37	45,574.28	48,558.90	51,444.08	50,448.16	54,988.47

Sumber : DKP Kabupaten Buton Induk, 2009 – 2014

Pada Tahun 2012, jumlah produksi ikan di Kabupaten Buton Selatan (masih bergabung dengan Buton Induk) sebesar 50,448.16 ton ikan, menyumbang 40,46 persen dari jumlah produksi ikan di Kabupaten Buton Induk

(124.701,07 ton). Perlu adanya perubahan jumlah realisasi rata-rata kenaikan produksi perikanan dari tahun 2008 – 2013 sebesar 21,20 persen.

4.2 Pendapatan di Lokasi Survei

Pendapatan penduduk adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari penghasilan selama kurun waktu dua belas bulan terakhir baik berupa barang maupun jasa dari pekerjaan utama dan tambahan, sedangkan pendapatan rumah tangga adalah seluruh pendapatan anggota rumah tangga yang bekerja selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari kepala rumah tangga (KRT) yang bekerja akan tetapi juga dari anggota rumah tangga lain yang bekerja, yang berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota rumah tangga.

4.2.1 Pendapatan Per Tahun/Bulan Menurut Sumber Pendapatan

Pada umumnya penduduk di Kabupaten Buton Selatan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sehingga sektor perikanan menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga. Penduduk di lokasi survei yaitu Kecamatan Siompu dan Siompu Barat memiliki mata pencaharian tambahan sebagai pemetik cengkeh musiman di Ternate yang dapat memberikan kontribusi besar bagi tambahan pendapatan rumah tangga nelayan. Pada musim cengkeh di Ternate dan Ambon, sebagian besar penduduk ke Ternate menjadi buruh pemetik cengkeh sekitar bulan Juli – September sehingga pada waktu melakukan survei banyak penduduk dalam hal ini nelayan yang tidak berada di desanya. Pendapatan rata-rata dari memetik cengkeh berkisar Rp 5.000.000 sampai Rp 7.000.000,- per musim.

Penduduk di Kabupaten Buton Selatan khususnya Desa Lalole dan Tongali memiliki total pendapatan rumah tangga per tahun maksimum sebesar Rp 80.220.400 dan yang terendah Rp 2.100.000,-, untuk total pendapatan rumah tangga perbulan yang diperoleh penduduk dengan nilai maksimum Rp 6.685.033 dan minimum Rp 175.000. Pendapatan per

kapita per bulan adalah nilai rata-rata pendapatan per bulan yang diterima dari masing-masing anggota rumah tangga, Pendapatan perkapita per bulan di lokasi survei berada pada kisaran Rp 25.000 sampai Rp 2.650.000. Sedangkan pengeluaran rata-rata perbulan terbanyak sebesar Rp 6.433.952 dan terkecil sebesar Rp 275.842,- (Tabel 4.2.1). Setiap orang atau keluarga mempunyai skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kondisi pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Makin tinggi pendapatan, makin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, sebaliknya makin sedikit pendapatan makin sedikit pula jumlah barang yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan ketika tingkat pendapatan meningkat, maka keinginan/hasrat seseorang untuk membeli beraneka ragam kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar.

Tabel 4.2-1. Statistik Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Rupiah)

Uraian	Mean	Median	Minimum	Maximum	N
Total Pendapatan RT Per Tahun	26,337,732	17,373,500	2,100,000	80,220,400	100
Total Pendapata RT Per Bulan	2,194,811	1,447,792	175,000	6,685,033	100
Pendapatan Per Bulan Per Kapita	550,570	357,722	25,000	2,650,000	100

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Distribusi rumah tangga memperlihatkan bahwa kondisi pendapatan rumah tangga per bulan di kedua desa survei tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang signifikan walaupun Desa Tongali lebih tinggi tingkat pendapatannya dibandingkan dengan Desa Lalole. 18 persen rumah tangga Desa Lalole memiliki pendapatan kurang dari Rp 500.000,-, sedangkan Desa Tongali hanya 6 persen. Untuk pendapatan di kisaran Rp 500.000,- sampai Rp 999.000 dan kisaran Rp 1.000.000 sampai Rp 1.499.000,-, Desa Lalole memiliki persentase pendapatan rumah tangga lebih besar dibanding Desa Tongali. Namun pada kisaran pendapatan yang lebih tinggi Desa Tongali memiliki rumah tangga dengan jumlah

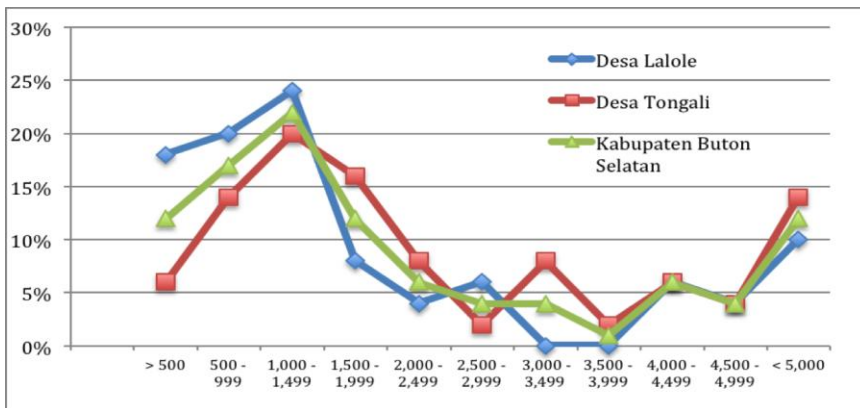
persentase lebih banyak hingga pada pendapatan di atas Rp 5.000.000,- (Tabel 2.2.2). Hal ini dikarenakan posisi geografis Desa Tongali lebih dekat dengan pasar yaitu Kota Bau-Bau dan Daratan Buton Selatan.

Tabel 4.2-2. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pendapatan Rumah Tangga per bulan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton selatan, Tahun 2016. (Persentase)

Kelompok Pendapatan (Ribu Rupiah)	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
> 500	18.0	6.0	12.0
500 - 999	20.0	14.0	17.0
1,000 - 1,499	24.0	20.0	22.0
1,500 - 1,999	8.0	16.0	12.0
2,000 - 2,499	4.0	8.0	6.0
2,500 - 2,999	6.0	2.0	4.0
3,000 - 3,499	-	8.0	4.0
3,500 - 3,999	-	2.0	1.0
4,000 - 4,499	6.0	6.0	6.0
4,500 - 4,999	4.0	4.0	4.0
< 5,000	10.0	14.0	12.0
N	50	50	100

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Gambar 4.2-1. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pendapatan Rumah Tangga per bulan Kabupaten Buton selatan, Tahun 2016. (Persentase)



Pulau Siompu merupakan wilayah yang dikelilingi oleh lautan dengan potensi sumberdaya yang melimpah, walau demikian sektor perikanan tangkap bukan menjadi satu-satunya sumber pendapatan yang memberikan kontribusi paling tinggi melainkan lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan & jasa perusahaan untuk Desa Lalole dan sumber pendapatan lainnya (pensiun, kiriman, beasiswa dan bantuan pemerintah) untuk Desa Tongali. Hal ini dikarenakan penduduk sudah banyak yang merantau ke luar pulau untuk mencari nafkah, mereka sudah tidak terlalu tergantung dengan sumberdaya yang ada di pulau. Hal ini dapat menjadi nilai positif bagi sumberdaya alam laut di Pulau tersebut. Namun mayoritas sumber pendapatan penduduk masih di sektor perikanan tangkap.

Tabel 4.2-3. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Menurut Sumber Pendapatan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, tahun 2016 (Rupiah)

Sumber Pendapatan	Desa Lalole	N (%)	Desa Tongali	N (%)	Kabupaten Buton Selatan	N (%)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, perburuan	769,468	26	-	0	769,468	13
Perikanan tangkap	2,551,641	46	2,709,172	34	2,618,592	40
Pertambangan dan penggalian	1,950,000	2	-	-	1,950,000	1
Industri	-	0	1,860,167	8	1,860,167	4
Konstruksi	1,015,833	4	1,196,431	12	1,151,281	8
Perdagangan hasil perikanan	2,545,000	2	-	-	2,545,000	1
Perdagangan hasil non perikanan	1,697,350	10	1,420,667	2	1,651,236	6
Transportasi sungai dan laut	-	0	1,579,883	10	1,579,883	5
Transportasi darat	-	0	1,338,528	6	1,338,528	3
Lembaga keuangan, real estate, usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	3,385,417	4	-	0	3,385,417	2
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan	883,833	4	3,642,208	24	3,248,154	14
<i>Lainnya</i>	<i>1,128,333</i>	<i>2</i>	<i>4,196,350</i>	<i>4</i>	<i>3,173,678</i>	<i>3</i>

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Rata-rata pendapatan rumah tangga sampel di lokasi survei bersumber dari perikanan tangkap. Desa Lalole sebanyak 46 persen dengan rata-rata pendapatan rumah tangga perbulan sebesar Rp 2.551.641,-, Desa Tongali sebanyak 34 persen dengan rata-rata pendapatan rumah tangga perbulan sebesar Rp 2.709.172,-. Jasa kemasyarakatan, social dan perorangan di Desa tongali juga memberikan kontribusi besar setelah sumber pendapatan lainnya yaitu sebesar Rp 3.642.208 dengan jumlah penduduk sekitar 24 persen. sedangkan Desa Lalole masih sangat rendah yaitu Rp 883.833,-. (4 persen).

4.2.2 Pendapatan Nelayan

Mayoritas penduduk di dua desa survei berprofesi sebagai nelayan dari sektor perikanan tangkap, rata-rata pendapatan perbulan hampir sama yaitu Rp 2.240.671 di Desa Tongali dan Rp 2.166.747,- demikian halnya dengan median di Desa Tongali Rp 1.606.250 dengan kisaran pendapatan Rp 21.250 sampai Rp. 6.016.667,- dan median desa Lalole Rp 1.056.250,- dengan kisaran pendapatan Rp 50.833 sampai Rp 6.283.333,-. Hal ini dikarenakan tipe nelayan yang ada di dua desa tersebut sama, semuanya masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan ukuran kapal penangkapan relatif kecil dengan ukuran dibawah 5 GT.

Tabel 4.2-4. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap, di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Rupiah)

Pendapatan per bulan	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Rata-rata	2,166,747	2,240,671	2,198,429
Median	1,056,250	1,606,250	1,148,750
Minimum	50,833	21,250	175,000
Maksimum	6,283,333	6,016,667	6,283,333
N	24	18	42

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Tabel 4.2-5. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Perikanan Tangkap di Lokasi Penelitian, Kabupaten .Buton Selatan, Tahun 2016. (Persentase)

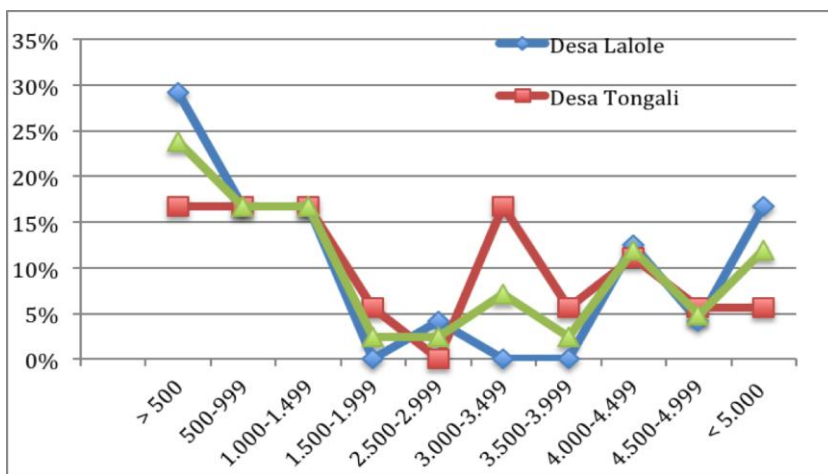
Kelompok Pendapatan (Ribu Rupiah)	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Kurang dari 500	29.2	16.7	23.8
500-999	16.7	16.7	16.7
1.000-1.499	16.7	16.7	16.7
1.500-1.999	-	5.6	2.4
2.500-2.999	4.2	-	2.4
3.000-3.499	-	16.7	7.1
3.500-3.999	-	5.6	2.4
4.000-4.499	12.5	11.1	11.9
4.500-4.999	4.2	5.6	4.8
5.000 Ke atas	16.7	5.6	11.9
N	24	18	42

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Berdasarkan distribusi rumah tangga, mayoritas rumah tangga dua desa memiliki pendapatan rumah tangga hampir tersebar di setiap kelompok pendapatan. Di Desa Lalole jumlah rumah tangga dari perikanan tangkap yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 500.000,- merupakan persentase tertinggi yaitu 29,2 persen, sedangkan di Desa Tongali jumlah rumah tangga dari perikanan tangkap yang berpendapatan kurang dari Rp 500.000,- , kisaran Rp 500.000 sampai Rp 1.499.000 (sama dengan Desa Lalole) dan kisaran Rp 3.000.000 sampai Rp 3.499.000 memiliki persentase yang sama yaitu 16.7 persen. Distribusi kelompok pendapatan yang hampir sama dikarenakan alat tangkap yang digunakan memiliki tipe yang sama, mayoritas nelayan di Desa Lalole menggunakan bubu dan pancing dan di Desa Tongali menggunakan pancing dan jaring insang. Alat tangkap pancing mempunyai banyak kelebihan diantaranya sangat kecil pengaruh cuaca dan musim, selektif terhadap ukuran dan jenis tangkapan sehingga tergolong alat tangkap

yang ramah lingkungan, Alat-alat pancing tidak susah dalam strukturnya dan operasinya dapat dilakukan dengan mudah, walaupun memiliki banyak kelebihan alat tangkap pancing juga memiliki banyak kekurangan yaitu hasil tangkapan terbatas jumlahnya. Alat tersebut memerlukan umpan, sehingga ada tidaknya umpan akan berpengaruh terhadap jumlah kali operasi yang dapat dilakukan pancing terhadap ikan adalah pasif, dengan demikian tertangkapnya ikan tersebut sangat ditentukan oleh tertariknya ikan untuk memakan umpan.

Gambar 4.2-2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Perikanan Tangkap dan Budidaya di Lokasi Penelitian, Kabupaten .Buton Selatan, Tahun 2016 (Persentase)



Hasil tangkapan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim gelombang sehingga otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini terjadi di Desa Tongali, pada musim gelombang tenang pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan lebih tinggi dibandingkan dengan musim pancaroba dan musim gelombang kuat. Ada sedikit perbedaan antara dua desa tersebut, Desa Lalole memperoleh rata-rata pendapatan perbulan lebih tinggi di musim pancaroba dibanding gelombang tenang namun tidak terlalu berbeda antara musim dan yang terendah pada musim gelombang kuat. Untuk Desa Tongali terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara musim gelombang tenang (Rp 3.386.944) dengan musim

gelombang kuat (Rp. 748.333) hal ini dikarenakan nelayan jarang melaut pada gelombang kuat.

Tabel 4.2-6. Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Nelayan dari Perikanan Tangkap Menurut Musim di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Rupiah)

Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga per bulan	Musim			N
	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	
Desa Lalole	2,474,708	2,640,292	1,022,083	24
Desa Tongali	3,386,944	2,200,833	383,333	18
Kabupaten Buton Selatan	2,865,667	2,451,952	748,333	42

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Distribusi pendapatan dua desa survei memperlihatkan perbedaan yang sangat signifikan di musim musim gelombang tenang dan kuat. Pada musim gelombang kuat sekitar 50 persen rumah tangga sampel di Desa Lalole dan sekitar 72 persen rumah tangga sampel di Desa Tongali berada pada kelompok pendapatan kurang dari Rp 500.000,-, ini menunjukkan bahwa musim sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan jumlah trip. Kelompok pendapatan di atas Rp 5.000.000,- pada musim pancaroba menunjukkan persentase yang jauh lebih banyak dibanding musim lainnya. Untuk Desa Lalole 25 persen dan Desa Tongali 11.1 persen, hal ini dikarenakan pada musim pancaroba Ikan Tongkol paling banyak tertangkap. Pada musim gelombang tenang dan kuat ikan tongkol tetap tertangkap namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Pada musim barat (Ikan Langkeawa tidak tertangkap) jenis ikan yang tertangkap yaitu Ikan tongkol, ikan kerapu, ikan layang, ikan tuna, ikan rumah-rumah, ikan rumah-rumah, dan bubara. Musim Pancaroba ikan tongkol paling banyak tertangkap pada musim ini, ikan tuna, ikan layang, ikan kerapu, langkeawa, ikan rumah-rumah, dan ikan bubara. Pada musim timur (ikan tuna dan baby tuna tidak muncul) jenis ikan yang tertangkap yaitu ikan tongkol, ikan layang, ikan kerapu, langkeawa, ikan rumah-rumah, dan ikan bubara.

Tabel 4.2-7. Distribusi Rumah Tangga Nelayan Menurut Besar Pendapatan Per Musim Dari Perikanan Tangkap, di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan 2016. (Perentase)

Kelompok Pendapatan (ribu Rupiah)	Desa Lalole			Desa Tongali			Kabupaten Buton Selatan		
	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat	Gel Tenang	Pancaroba	Gel Kuat
< 500	25.0	29.2	50.0	16.7	22.2	72.2	21.4	26.2	59.5
500-999	12.5	12.5	20.8	11.1	16.7	11.1	11.9	14.3	16.7
1.000-1.499	12.5	12.5	8.3	5.6	5.6	5.6	9.5	9.5	7.1
1.500-1.999	16.7	4.2	8.3	11.1	11.1	11.1	14.3	7.1	9.5
2.000-2.499	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
2.500-2.999	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	2.4	0.0
3.000-3.499	0.0	8.3	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	7.1	0.0
3.500-3.999	8.3	0.0	4.2	16.7	11.1	0.0	11.9	4.8	2.4
4.000-4.499	4.2	4.2	0.0	5.6	11.1	0.0	4.8	7.1	0.0
4.500-4.999	20.8	4.2	0.0	27.8	0.0	0.0	23.8	2.4	0.0
> 5.000	0.0	25.0	8.3	0.0	11.1	0.0	0.0	19.0	4.8
N	24	24	24	18	18	18	42	42	42

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

4.3 Pengeluaran Rumah Tangga

Struktur pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga dengan pengeluaran pangan tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibandingkan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan rendah. Semakin tinggi pengeluaran pangan, berarti semakin kurang sejahtera rumah tangga yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin kecil pengeluaran pangan maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera. Sementara rumah tangga yang lebih banyak mengkonsumsi untuk barang-

barang mewah dan kebutuhan sekunder merupakan rumah tangga yang lebih sejahtera. Pengeluaran rumah tangga merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga digolongkan menjadi dua yaitu konsumsi pangan dan non pangan. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dalam survei ini merujuk pada BPS, dimana konsumsi pangan dikelompokkan menjadi 14 kelompok besar, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi. Sedangkan konsumsi non pangan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pajak dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara.

Tabel 4.3-1. Statistik Pengeluaran Rumah Tangga di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 (Rupiah)

Pengeluaran RT per bulan	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Rata-rata	2,678,895	1,784,206	2,231,551
Median	2,074,786	1,369,875	1,841,565
Minimum	539,583	275,845	275,845
Maksimum	6,433,952	5,488,548	6,433,952
Per Kapita	681,182	435,994	558,588
N	50	50	100

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 100 rumah tangga terpilih, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan adalah Rp. 2.231.551 dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 558.588 per bulan. Sebaran pengeluaran rumah tangga mulai dari Rp. 275.845 sampai Rp. 6.433.952. Lebarnya rentang pengeluaran rumah tangga tersebut mengindikasikan bahwa adanya perbedaan pengeluaran rumah tangga yang cukup besar antar rumah tangga. Dilihat dari masing-masing desa, rata-rata

pengeluaran rumah tangga per bulan di Desa Lalole mencapai Rp. 2,6 juta, Desa Tongali mencapai Rp. 1,7 juta, secara umum Desa Lalole memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibanding Desa Tongali (Tabel 4.3.2)

Tabel 4.3-2. Distribusi Rumah Tangga Menurut Besar Pengeluaran Rumah tangga per bulan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016. (Persentase)

Kelompok Pengeluaran (Ribu Rupiah)	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
< 500	0.0	4.0	2.0
500-999	6.0	12.0	9.0
1.000-1.499	16.0	46.0	31.0
1.500-1.999	22.0	8.0	15.0
2.000-2.499	18.0	10.0	14.0
2.500-2.999	10.0	2.0	6.0
3.000-3.499	2.0	6.0	4.0
3.500-3.999	2.0	6.0	4.0
4.000-4.499	6.0	2.0	4.0
4.500-4.999	4.0	2.0	3.0
> 5.000	14.0	2.0	8.0
N	50	50	100

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Berdasarkan distribusi pengeluaran di Kabupaten Buton berada pada kisaran Rp 1 juta – Rp 1.4 juta yaitu sebesar 31 persen dan pengeluaran terendah berada pada kelompok pengeluaran kurang dari Rp 500 ribu yaitu 2 persen (Tabel 4.3.2). Untuk tingkat desa, kelompok pengeluaran tertinggi di Desa Tongali berada pada kisaran Rp 1 juta – Rp 1.4 juta yaitu sebesar 46 persen dan pengeluaran terendah berada pada kelompok pengeluaran kurang dari Rp 2.5 juta – Rp 2.9 juta, Rp 4 juta – di atas Rp 5 juta masing-masing sebesar 2 persen. Di Desa Lalole, pengeluaran dengan persentase tertinggi berada pada kisaran pengeluaran Rp 1.5 juta –

Rp 1.9 juta yaitu sebanyak 22 persen dan persentase terendah berada pada kisaran Rp 3 juta dan Rp 3.9 yaitu 2 persen.

Tabel 4.3-3. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Penggunaan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016 (Rupiah)

Jenis Penggunaan	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Pangan	2,006,194	1,196,550	1,601,372
Non Pangan	644,837	571,038	607,937

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 100 rumah tangga sampel di Kabupaten Buton Selatan, pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan sangat jauh berbeda, pengeluaran untuk non pangan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pangan. Untuk pengeluaran pangan sebesar Rp 1.601.372, sedangkan pengeluaran non pangan Rp 607.937,-. Di Desa Lalole pengeluaran Pangan Rp 2.006.194, non pangan Rp 644.837, sama halnya di Desa Tongali pengeluaran pangan juga lebih banyak dibanding non pangan yaitu masing-masing Rp 1.196.550 dan Rp 571.038 (Tabel 4.3.3)

Tabel 4.3-4. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Penggunaan di Lokasi Penelitian, Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016

Jenis Penggunaan	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
Pangan	1,772,709	1,148,379	1,460,544
Pendidikan	159,231	198,988	179,846
Kesehatan	41,912	27,402	34,657
Keperluan Sosial dan Keagamaan	21,291	23,468	22,255

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

4.4 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Buton Selatan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. karena NTN mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan. NTN adalah rasio total pendapatan rumah tangga nelayan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu.

Kriteria besaran NTN yang diperoleh dapat lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari satu. Jika NTN lebih kecil dari satu berarti keluarga nelayan mempunyai daya beli lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpotensi untuk mengalami defisit anggaran rumah tangganya. Jika NTN berada disekitar angka satu, berarti keluarga nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan subsistennya. Sebaliknya jika NTN berada di atas satu, berarti keluarga nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder atau tersiernya, atau menabung dalam bentuk investasi barang.

Pada tabel 4.4-1 terlihat bahwa NTN untuk nelayan sample di Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2016 di bawah satu, demikian halnya dengan Desa Lalole, yang berarti bahwa penerimaan keluarga nelayan saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup subsistennya, walaupun semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikanan tangkap dapat dipenuhi. Sedangkan Desa Tongali NTN di atas satu, hal ini berarti bahwa penerimaan keluarga nelayan di Desa Tongali saat ini sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup subsistennya sehingga semua kebutuhan atau pengeluaran untuk usaha perikanan tangkap dapat dipenuhi.

Tabel 4.4-1. Rataan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016

No	Uraian	Desa Lalole	Desa Tongali	Kabupaten Buton Selatan
1	Pendapatan Rumah Tangga Nelayan (Rp)	2,166,747	2,240,671	2,198,429
2	Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan (Rp)	2,678,895	1,784,206	2,231,551
Nilai Tukar Nelayan (NTN)		0.81	1.26	0.99

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Indonesia, 2016.

BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT

5.1 Faktor Internal

5.1.1 Sumber Pendapatan

Pendapatan di dua desa lokasi penelitian sangat dipengaruhi kegiatan perikanan tangkap. Perikanan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi rumah tangga di dua desa. Letaknya yang berada pada wilayah pulau yang kaya dengan sumber daya laut menjadikan hampir semua penduduk/rumah tangga melakukan adaptasi *livelihood* dengan memilih bekerja sebagai nelayan tangkap.

Karena sangat terkait dengan kondisi alam (musim gelombang), tidak selamanya nelayan bisa menangkap ikan sepanjang tahun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan keberlanjutan penghidupannya, sebagian kecil penduduk di lokasi penelitian juga menjalankan strategi nafkah ganda/pekerjaan tambahan. Pertanian yang mencakup perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan menjadi pekerjaan tambahan yang paling banyak dilakukan. Mereka memanfaatkan pekarangan dan lahan-lahan yang ada di sekitar desa. Baik pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan sebagian besar dilakukan sendiri. Mereka hanya akan mendapatkan pendapatan ketika mereka melakukan aktivitas pekerjaannya.

5.1.2 Teknologi Alat Tangkap/Produksi dan Wilayah Tangkap

Teknologi Alat Tangkap

Alat penangkapan ikan yang dominan digunakan oleh nelayan di Kabupaten Buton Selatan adalah alat tangkap pancing. Hal ini lebih disebabkan oleh kapasitas armada penangkapan yang dimiliki masih dalam kategori tradisional. Perahu Tanpa Motor (PTM) masih sangat dominan pula. Namun demikian, alat tangkap purse seine juga telah

dioperasikan oleh nelayan di Kabupaten Buton Selatan, khususnya oleh nelayan di Kecamatan Kadatua.

Menangkap ikan membutuhkan peralatan dan teknik yang tepat untuk menangkap ikan, baik yang masih tradisional maupun yang menggunakan teknologi modern. Berikut jenis- jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan Kecamatan Siompu.

Tabel 5.1-1. Jumlah Alat Tangkap di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan (Unit)

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
A	Jenis Pancing	
1	Rawai Tuna	325
2	Rawai Dasar	352
3	Tonda	108
4	Ulur	81
5	Lainnya	36
B	Jaring	
1	Pukat Cincing	1
2	Insang	395
3	Angkat	0
C	Bubu	94
D	Lainnya	1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016

Nelayan Kecamatan Siompu menggunakan alat tangkap pancing, jaring dan bubu. Untuk alat tangkap pancing sendiri ada 5 jenis yaitu rawai tuna sebanyak 325 unit, rawai dasar sebanyak 352 unit sebagai alat tangkap golongan pancing yang terbanyak digunakan, pancing tonda 108 unit, pancing ulur 81 unit, dan jenis pancing lainnya sebanyak 36 unit. Golongan Jaring yaitu Pukat Cincing sebanyak 1 unit, jaring insang sebanyak 395 unit yang merupakan alat tangkap dengan jumlah terbanyak. Alat tangkap bubu sebanyak 94 unit dan alat tangkap lainnya 1 unit.

Produksi Perikanan Tangkap

Tabel 5.1-2. Produksi Perikanan Tangkap di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015.

No	Jenis Tangkapan	Jumlah (Kg)
1	Tongkol	288,672
2	Tuna	1,563,950
3	Cakalang	456,960
4	Terbang	25,800
5	Layang	238,240
6	Kembung	20,160
7	Kakap	139,480
8	Kerapu	31,600
9	Baronang	0
10	Lola	60
11	Teripang	1,266
12	Cumi	800
13	Pari	600
14	Hiu	180
15	Gurita	2,580
16	Teri	900
17	Tenggiri	2,220
18	Kerang	80
19	Layur	10,381
20	Lobster	1,292
21	Ikan lainnya	708,864
Jumlah		3,494,084

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2016

Jenis ikan hasil tangkapan terbanyak di Kecamatan Siompu adalah jenis ikan tuna dengan produksi pertahun sebanyak 1,563,950 kg kemudian ikan cakalang sebanyak 456,960 kg/tahun, ikan tersebut merupakan jenis ikan pelagis besar yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap pancing.

Wilayah Penangkapan

Sekitar 16 mil sebelah barat ke arah selatan Pulau Siompu terdapat rumpon yang dijadikan wilayah tangkap untuk ikan tuna, sebelah barat pulau sekitar 19 mil dari pulau terdapat rumpon nelayan siompu. Antara Pulau Kadatua dan Siompu merupakan wilayah tangkap untuk ikan tongkol. Selain itu wilayah tangkap juga berada di pulau kecil sebelah barat Pulau Siompu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan bahwa tidak jauh dari pulau kecil tersebut terdapat rumpon milik nelayan Selayar. Nelayan dari Desa Lalole juga melakukan penangkapan ikan di rumpon tersebut. Dari penggalian informasi yang dilakukan di dua desa penelitian di peroleh keterangan bahwa nelayan di Desa Tongali dan Lalole sangat membutuhkan bantuan rumpon sebagai sarana dalam mengefektifkan dan mengefisienkan praktek kerja mereka dalam memancing ikan tuna. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2011 pasal 19(2), yang dimaksudkan dengan rumpon adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/aktraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Konteks ini dimaksudkan agar; (1) sarana tersebut dapat dijadikan sebagai tempat mencari makan, berteduh dan beristirahat ikan (khususnya ikan tuna) sebagai target utama; (2) diperoleh tingkat kepastian akan hasil tangkapan yang lebih tinggi; (3) dapat menekan biaya operasional akibat perubahan pola tangkapan dari *hunting* menjadi *fishing (harvesting)*; (4) memperpanjang masa tangkapan, dari 6 bulan menjadi 8-10 bulan.

Kaitan dengan potensi sumberdaya ikan secara lestari, Di Desa Lalole Terdapat DPL (Daerah Perlindungan Laut) yang dikelola secara adat bekerjasama pemerintah setempat. Konstruksi kelembagaan ini cukup efektif sehingga DPL dapat berfungsi dengan baik. Dari keterangan yang diperoleh bahwa apabila ada yang melakukan penangkapan di wilayah tersebut akan didenda sebesar Rp 5.000.000,-. Sehingga masyarakat mematuhi peraturan tersebut.

5.1.3 Biaya Produksi (Modal Melaut)

Biaya produksi atau modal melaut merupakan jumlah yang harus dikeluarkan nelayan untuk usaha melaut yang umumnya meliputi biaya perbekalan, solar, balok es dan kebutuhan lainnya. Data lapangan yang

diperoleh menunjukkan bahwa umumnya nelayan ikan tuna di dua desa penelitian menggunakan modal melaut sekitar 2-3 juta sekali melaut. Keterangan yang diperoleh dari nelayan bahwa penangkapan ikan sudah semakin sulit dirasakan, hal ini dikarenakan tidak ada lagi wilayah tangkap yang pasti, tentunya dengan kondisi itu sangat berpengaruh terhadap biaya produksi, terutama penggunaan BBM yang ikut meningkat. Selain itu, biaya produksi mengalami peningkatan ketika melaut pada musim gelombang pancaroba dan gelombang tinggi, selain itu kondisi cuaca yang tidak menentu yang sulit untuk diprediksi. Jika dikaitkan dengan penelitian-penelitian IPCC, BMKG, LIPI, dan lembaga lainnya, ketidakpastian ini sangat terkait dengan perubahan iklim yang diakibatkan pemanasan global. Biasanya, untuk menghadapi persoalan ini, terutama pada saat gelombang tinggi para nelayan hanya menangkap ikan di pinggir-pinggir pantai saja. Peningkatan biaya produksi dan berkurangnya hasil tangkapan ini tentunya mengurangi pendapatan mereka.

Untuk biaya produksi lainnya, seperti upah awak kapal, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Sebagian besar dari mereka melakukan penangkapan ikan sendiri; dan jika dibantu, lebih banyak dibantu oleh keluarga batih (anggota rumah tangga) yang tidak dibayar. Sangat jarang yang bekerja sebagai nelayan buruh (ABK) bekerja di kapal/perahu orang lain.

5.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Peran teknologi sangatlah dibutuhkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan. Peran ini tidak hanya terkait ketersediaan alat, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan nelayan untuk menggunakannya atau dapat disebut sebagai adaptasi teknologi.

Sebagian besar nelayan di dua desa lokasi penelitian termasuk nelayan kecil (nelayan tradisional) jika dilihat dari ukuran armada penangkapan dan alat penangkapan yang dimiliki. Mereka tidak dalam kapasitas memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai nelayan modern karena peralatan yang dikembangkan sangat sederhana. Meskipun akses pasar ikan untuk permintaan ikan ekspor terbuka tetapi tidak berkaitan dengan kondisi nelayan di dua desa, yang masih dikategorikan sebagai nelayan

kecil yang tidak memiliki kemampuan berkembang sebagai nelayan besar. Oleh karena itu, alat tangkap berukuran besar seperti pukat cincin Nampak tidak berkembang, hal ini diasumsikan karena faktor kondisi sumberdaya manusia kenelayanan yang masih rendah. Demikian halnya dengan penggunaan alat-alat modern lainnya seperti radio komunikasi dan alat pencari ikan (*fish finder*) juga belum dipergunakan oleh nelayan di dua desa penelitian. Jika dikaitkan dengan optimalisasi produksi transformasi kapasitas nelayan tradisional ke nelayan modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebaiknya kedua alat ini sudah mejadi bagian penting yang harus digunakan oleh nelayan. Penggunaan *fish finder* dapat membantu nelayan mencari posisi ikan yang paling strategis. Dimana terdapat banyak gerombolan ikan, maka disitulah daerah yang paling strategis untuk memancing. Demikian halnya dengan penggunaan alat komunikasi, nelayan dapat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di laut maupu di darat, petugas-petugas perikanan dan sebagainya untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan aktivitas mereka, seperti kondisi laut, cuaca, tempat penangkapan ikan strategis dan sebagainya.

Efek kapasitas SDM yang rendah diduga pula dapat berimplikasi terhadap praktek mencari ikan dengan cara yang pragmatis (cara instan) melalui *destructive fishing*, seperti pembiusan atau pengemboman yang di masa lalu banyak terjadi.

5.2 Faktor Eksternal

5.2.1 Pemasaran: Harga dan Pemasaran

Harga dan pemasaran hasil produksi nelayan di wilayah kajian, analisisnya diawali melalui konstruksi jaringan sosial dalam sistem produksi. Dengan tipe yang sama, nelayan-nelayan di dua pulau adalah pemilik alat produksi dan ikut terlibat langsung dalam proses produksi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih tergolong menjadi buruh upahan. Konstruksi jaringan sosial sehubungan dengan kegiatan produksi kenelayanan, secara sederhana terbagi dalam tiga pola hubungan kerja yaitu; kegiatan penyediaan alat-alat produksi, kegiatan produksi serta kegiatan pemasaran. Dengan demikian, relevansi keterlekatan perilaku

ekonomi dalam hubungan sosial melalui jaringan sosial yang terjadi dalam kehidupan ekonomi termaknai melalui bagaimana individu terkait antara satu dengan lainnya dan bagaimana ikatan afiliasi tersebut melayani baik sebagai pelicin untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial ekonomi mereka.

Dari hasil keterangan informan diperoleh informasi bahwa konstruksi jaringan aktivitas mata pencaharian di wilayah kajian terbentuk dalam tiga model jaringan baik yang sifatnya vertikal (hirarkis), horizontal atau jaringan yang sifatnya diagonal. Ketiga model jaringan yang dimaksud dapat saja berdiri sendiri atau terintegrasi satu sama lain, tergantung dari tingkat kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing individu dalam tujuan membangun jaringan (*social net work*). Meskipun demikian, pola jaringan yang paling dominan yang terbentuk dalam aktivitas produksi dan pemasaran adalah pola jaringan yang sifatnya vertikal (hirarkhis).

Temuan lapangan juga menjadi penjelas secara empiri konteks tersebut. Nelayan di dua desa penelitian melakukan adaptasi social dalam keberlanjutan aktivitas produksi mereka melalui pola hubungan *patron-client*. Praktek social ekonomi ini terawat dengan baik oleh kedua belah-pihak baik yang berposisi sebagai patron (pelepas uang/pemodal) maupun bagi kalangan *client* (nelayan). Dalam upaya penangkapan ikan secara langsung, pelepas uang/pemodal adalah orang yang berperan memberikan modal melaut dan mengurus berbagai keperluan yang dibutuhkan. Namun di luar hal tersebut, pelepas uang/pemodal juga biasanya berkewajiban untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, salah satunya masalah ekonomi. Saat musim-musim peceklik, biasanya nelayan akan kesulitan mendapatkan penghasilan karena kondisi laut yang tidak mendukung. Terkadang pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan pengeluaran, sehingga nelayan banyak yang merugi. Kerugian tersebut biasanya akan ditutupi sementara oleh pelepas uang/pemodal. Pada masa-masa tersebut biasanya para nelayan akan meminjam uang kepada pelepas uang/pemodal untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Pengembalian uang bisa dilakukan secara langsung

ataupun dipotong dari hasil pendapatan di musim tangkap mendatang. Para pelepas uang/pemodal tidak semata-mata memberikan bantuan tanpa pertimbangan. Sifat dan perilaku nelayan juga menjadi pertimbangan dalam memberikan bantuan. Untuk nelayan-nelayan yang berperilaku baik dan sering membayar pinjaman tepat waktu, biasanya pelepas uang/pemodal juga tidak akan ragu untuk membantu nelayan tersebut. Sebaliknya, nelayan yang tidak patuh dan sering menunggak biasanya akan dikenakan peraturan tersendiri. Tingginya tingkat perilaku hubungan sosial terkait dengan *patron-client*, biasanya juga terkait dengan adanya pengaruh lingkungan. Nelayan dengan perilaku buruk akan melihat keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari pola perilaku baik. Lama-kelamaan nelayan tersebut juga akan berusaha berperilaku baik.

Kaitan perilaku hubungan social ekonomi nelayan yang terbangun secara lokalitas dengan pemasaran (harga dan pemasaran), disinilah berlaku apa yang disebut sebagai hukum eskplotasi. Hukum eksploitasi yang dimaksudkan sebagai bentuk pertukaran social dan ekonomi yang tidak sepadan antara *patron* dan *client*. Pemberlakuan norma “*dimana modal di peroleh, disitu hasil dipasarkan*” menempatkan nelayan tereksploitasi dari konstruksi kelembagaan pasar yang terbentuk. Nelayan (*client*) sebagai produsen tidak memiliki otoritas penuh dalam memasarkan dan memberikan nilai jual dari hasil produksi mereka. Pasar telah dikuasai oleh pelepas uang/pemodal (*patron*) yang berimplikasi signifikan terhadap penentuan harga jual ikan yang ditetapkan sendiri oleh pelepas uang/pemodal. Oleh karena itu dari beberapa kajian mengenai kemiskinan nelayan, telah disebutkan dengan jelas bahwa ciri kemiskinan pada masyarakat nelayan adalah kemiskinan structural akibat pola-pola hubungan yang terbangun selama ini.

5.2.2 Musim/Iklim

Musim dan kondisi alam sangat berpengaruh terhadap kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan nelayan di lokasi penelitian. Ketika musim pancaroba dan gelombang tinggi datang, frekuensi mereka melaut menjadi sangat berkurang.

Berkurangnya frekuensi melaut, terutama bagi nelayan Tongali, tentunya sangat berpengaruh pada hasil tangkapan dan pendapatan. Semakin sedikit frekuensi melaut, semakin sedikit pula pendapatan yang bisa diperoleh. Apalagi, ketika mereka melaut pada musim gelombang tinggi, mereka tidak bisa lagi menangkap ikan di wilayah tangkap yang biasanya. Hasilnya pun jauh menurun. Padahal, biaya produksi melaut meningkat. Kondisi ini tentunya mengurangi pendapatan bersih sekali menangkap.

5.2.3. Kurangnya Aksesibilitas terhadap Mata Pencaharian Alternatif

Strategi yang cerdas sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan individu dan keluarga. Dalam mencapai tujuan tersebut, jumlah pendapatan bukanlah hal yang paling utama. Salah satu faktor penting lainnya yaitu kemampuan dalam manajemen pola kerja. Dengan pengaturan yang baik, setidaknya akan membantu menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi nelayan. Berdasarkan temuan lapangan sebagai hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa perilaku ketenagakerjaan nelayan di dua desa penelitian masing-masing sangat rendah. Hal ini dibuktikan oleh jarang sekali nelayan di dua desa ini yang memiliki pekerjaan sampingan, baik pada musim tangkap maupun paceklik. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi nelayan. Pada musim tangkap, hampir seluruh nelayan menggantungkan hidupnya dari usaha penangkapan ikan. Namun pada musim paceklik, umumnya nelayan malas untuk mencari pekerjaan lain. Akibatnya mereka akan mengandalkan sisa uang musim tangkap, bahkan sampai meminjam kepada orang lain (pelepas uang/pemodal, kerabat, tetangga dan sebagainya). Berbeda dengan petani yang harus bekerja ekstra keras untuk mencari uang, para nelayan memiliki anggapan bahwa uang itu mudah dicari karena ikan di laut tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan nelayan yang dilakukan selama ini sejatinya tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan dalam konteks penghantaran program fisik material semata, tetapi juga harus mengkombinasikan pemberdayaan yang bersifat non material (penyadaran nilai) yang bertujuan merubah pola pikir mereka.

5.3 Faktor Struktural (Program Wilayah Pesisir dan Laut serta Program Pembangunan Lainnya)

Sama dengan desa-desa lainnya, selain mendapatkan bantuan dan program pemerintah, seperti program raskin, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan operasional pendidikan siswa miskin, kedua desa juga mendapatkan bantuan dana PNPM dan ADD yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana desa secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan desa. Meskipun demikian, sudah saatnya program-program tersebut sudah harus memiliki "Peta Jalan" program yang terinterkoneksi dari institusi-institusi terkait sehingga program-program yang diberikan tidak hanya sekedar strategi programatik pemberian bantuan (*charity*) kepada nelayan yang sifatnya sesaat, melainkan sudah harus memiliki nilai *sustainable* (keberlanjutan) dan tidak terkesan pengulangan-pengulangan program yang selalu harus dimulai dari awal.

Terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut, kondisi lapangan menunjukkan bahwa dibutuhkan pro aktif dari pemerintah daerah (jajaran terkait) dalam menghasilkan regulasi-regulasi berdasarkan reduksi dari peraturan pemerintah pusat. Hal ini terlihat belum ada satupun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Selatan yang terkontekstualkan dalam mengatur pengelolaan SDL termasuk penggunaan bahan peledak (bom) dan racun (sianida) untuk penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya yang dapat melahirkan kesadaran kolektif masyarakat secara lokalitas.

Kebijakan pelarangan penggunaan bahan peledak dan racun, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Laut (SDL) masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pelanggaran penggunaan bahan peledak dan racun masih mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1985, khususnya pasal 6 ayat (1) tentang pelarangan penggunaan bahan dan alat yang merusak sumber daya ikan, pasal 7 ayat (1) tentang pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga mengacu pada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 5 Tahun 1990

tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konstruksi norma berdasarkan kondisi masing-masing daerah sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam mengakomodir konteks keberagaman social, ekonomi dan budaya bangsa ini. Konteks ini menjadi penting karena keberadaan hukum yang ada akan mewakili rasa keadilan yang mereka hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Penerapan hukum juga akan menjadi efektif karena roh kelahirannya berdasarkan secara kontesktual. Keberadaan norma-norma adat yang telah lahir sebelumnya, sesungguhnya adalah potensi untuk disinergitaskan dengan hukum-hukum formal melalui Peraturan Desa atau Peraturan Daerah.

Disamping itu, kurangnya respon para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun TNI-AL untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku pelanggaran perusakan SDL juga ikut memperlemah implementasi aturan-aturan negara selama ini. Hasil penelitian yang dilakukan tidak diperoleh keterangan adanya pelanggar pengrusakan SDL yang telah diperadilanakan. Kondisi ini tentu saja akan melahirkan pelaku-pelaku destructive sumber daya laut tidak mengalami efek jera sebagai sangksi hukum yang diterima dan signifikan berdampak terhadap kerusakan SDL yang terus-menerus.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kabupaten Buton Selatan merupakan kabupaten yang masih sangat muda yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014. Alasan pemekaran kabupaten ini salah satunya karena akses yang menghambat pelayanan. Sejak pemekaran Kota Baubau pada tahun 2001, ibukota Kabupaten Buton dipindahkan ke Pasarwajo. Akses menuju Pasarwajo bagi masyarakat Buton Selatan harus melalui Kota Baubau terlebih dahulu karena belum ada akses langsung dari wilayah Buton Selatan ke Pasarwajo. Terlebih beberapa daerah di Buton Selatan merupakan pulau-pulau yang terpisah dari Pulau Buton, seperti Pulau Kadatua, Pulau Siompu, dan Pulau Batu Atas, pulau paling selatan di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Selatan sebagian besar wilayahnya terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi, atau pulau ke-130 terbesar di dunia. Wilayah Kabupaten Buton Selatan terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batu Atas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Kadatua.

Secara administrasi Kabupaten Buton Selatan memiliki luas lautan sebesar $\pm 99.685,62$ ha atau $\pm 996,86$ km². Ekosistem pantai di Kabupaten Buton Selatan sangat bervariasi, berupa formasi pantai berpasir, pantai tebing batu (*cliff*) dan pantai karang. Kombinasi ukuran partikel yang berbeda dan variasi factor lingkungan menciptakan suatu kisaran habitat pantai berpasir. Reoksigenasi dan suplay nutrient kedalam pasir bervariasi berdasarkan tingkat porositas, aksi gelombang dan tinggi muka pasir. Profil vertical bergradasi dari aerobik (pasir berwarna terang) hingga lapisan anaerobic dengan pasir berwarna gelap.

Kecamatan Siompu khususnya Desa Tongali memiliki Potensi dan Kondisi Mangrove. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa ekosistem mangrove tidak ditemukan di Desa Tongali. Kondisi ini sejalan

dengan apa yang dilaporkan dalam Dokumen Awal RZWP-3-K Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015 di sebutkan bahwa ekosistem mangrove di sepanjang pesisir Kabupaten Buton Selatan sudah sangat jarang ditemukan. Ekosistem mangrove ditemukan terkonsentrasi pada beberapa tempat saja dalam jumlah kecil dengan *cover area* yang tidak begitu luas. Salah satunya ditemukan di bagian dalam teluk Sampolawa dengan keragaman spesies yang rendah, dimana hanya dua jenis yang dijumpai yaitu jenis *Rhizopora mucronatu* dan *Avicenia alba*. Potensi dan Kondisi Lamun. Data dari studi dokumen yang dilakukan, menggambarkan bahwa kondisi padang lamun di Kecamatan Siompu tumbuh di sepanjang pantai. Pada kondisi air surut kawasan padang lamun Kec. Siompu sebagian besar kawasannya merupakan kawasan yang tidak digenangi oleh air laut serta kondisi substrat dasar lumpung hingga berpasir. Penutupan lamun setiap petak contoh berkisar antara 30% – 85% dengan kondisi setiap petak contoh dijumpai 3 – 4 jenis lamun dengan tinggi kanopi 15 - 40 cm. Cover lamun semakin ketengah hingga ujung kawasan padang lamun semakin padat dengan tingkat dominansi jenis yang tinggi. Jumlah individu lamun per satuan hektar di Kecamatan Siompu.

Sedangkan di Kecamatan Siompu Barat, Ekosistem mangrove ditemukan terkonsentrasi pada beberapa tempat saja dalam jumlah kecil dengan *cover area* yang tidak begitu luas. Salah satunya ditemukan di bagian dalam teluk Sampolawa dengan keragaman spesies yang rendah, dimana hanya dua jenis yang dijumpai yaitu jenis *Rhizopora mucronatu* dan *Avicenia alba*. Potensi dan Kondisi Lamun. Data dari studi dokumen yang dilakukan, menggambarkan bahwa kondisi padang lamun di Kecamatan Siompu Barat tumbuh secara spot-spot dengan tingkat tutupan dan kerapatan masing-masing jenis lamun yang jarang, serta kondisi substrat dasar lumpung hingga berpasir. Padang lamun yang dijumpai didominasi pada jenis *C. rotundata* sebanyak 12,500 individu, *Talasia* sebanyak 1,300 individu, *S. isoetifilium* sebanyak 5,200 individu dan *Enhalus Acroides* jumlah 4,700 individu pada luasan 1 Ha. Potensi dan Kondisi Terumbu Karang.

Tim monitoring ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait tahun 2015 menjadikan Desa lalole sebagai stasiun pengamatan. Hasil yang diperoleh disebutkan bahwa tingkatutupan karang sebesar 36,6% untuk karang hidup (*living coral*) dan dengan kategori sedang, karang dengan kategori karang mati yang ditumbuhi alga mendominasi dengan tingkat persentaseutupan mencapai 33,13%, hal ini diakibatkan pada lokasi monitoring merupakan lokasi yang sementara mengalami *recovery*.

Kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait sangat mempengaruhi sumber daya ikan dan biota laut lainnya. Berbagai spesies ikan sangat tergantung kepada terumbu karang dan ekosistem terkait sebagai tempat tinggal, memijah, dan mencari makan. Sebagai sebuah sistem rantai makanan, keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan ikan dan biota laut di ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan ikan di seluruh perairan.

Sebagai sebuah sistem sosial dan ekologi yang saling terkait, ikan dan kekayaan sumber daya laut inilah yang dijadikan sumber penghidupan utama penduduk/rumah tangga ketiga desa sejak dulu sampai sekarang. Untuk bertahan hidup dan menjamin keberlanjutan penghidupannya, sebagian besar penduduk/rumah tangga ketiga desa menjalankan strategi nafkah dengan cara menangkap ikan (menjadi nelayan). Mereka sangat tergantung pada hasil tangkapan ikan dan biota lainnya. Sebagian lagi yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utamanya juga menjadikan perikanan tangkap sebagai pekerjaan tambahannya. Selain menjadi nelayan tangkap, sebagian kecil dari mereka melakukan kegiatan perikanan budidaya berupa pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung dan keramba jaring tancap.

Sayangnya, ketiga ekosistem yang menjadi tempat hidup, memijah, memberarkan anak, dan mencari makan ikan dan biota laut lainnya, saat ini kondisinya sebagian besar rusak dan kurang baik. Terbatasnya pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat ketiga ekosistem membuat

sebagian penduduk/rumah tangga di ketiga desa membuat terbatasnya kepedulian dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketiga ekosistem. Program COREMAP II yang pernah dilakukan, terutama *public awareness*, hanya melakukan penyadaran terhadap pelestarian terumbu karang saja. Itu pun hanya mampu menjangkau seperempat penduduk pulau dan tidak cukup menyadarkan seluruh penduduk dan meningkatkan kepeduliannya, termasuk untuk terumbu karang sekalipun. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan perilaku perusakan, terutama yang tidak langsung, masih banyak ditemukan di ketiga desa. Penduduk di ketiga desa masih banyak yang membuang sampah langsung ke laut.

Sebagai sebuah sistem sosial dan ekologi yang saling terkait, ikan dan kekayaan sumber daya laut inilah yang dijadikan sumber penghidupan utama penduduk/rumah tangga di desa Lalole dan Tongali sejak dulu sampai sekarang. Untuk bertahan hidup dan menjamin keberlanjutan penghidupannya, sebagian besar penduduk/rumah tangga ketiga desa menjalankan strategi nafkah dengan cara menangkap ikan (menjadi nelayan). Mereka sangat tergantung pada hasil tangkapan ikan dan biota lainnya. Sebagian lagi yang menjadikan perkebunan sebagai pekerjaan utamanya juga menjadikan perikanan tangkap sebagai pekerjaan tambahannya. Selain menjadi nelayan tangkap.

Kondisi empiris memperlihatkan bahwa, ketiga ekosistem yang menjadi tempat hidup, memijah, memberarkan anak, dan mencari makan ikan dan biota laut lainnya, saat ini kondisinya sebagian besar rusak dan kurang baik. Terbatasnya pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat ketiga ekosistem membuat sebagian penduduk/rumah tangga di dua desa membuat terbatasnya kepedulian dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketiga ekosistem. Program COREMAP II yang pernah dilakukan, terutama *public awareness*, hanya melakukan penyadaran terhadap pelestarian terumbu karang saja. Itu pun hanya mampu menjangkau sebagian penduduk pulau dan tidak cukup menyadarkan seluruh penduduk dan meningkatkan kepeduliannya, termasuk untuk terumbu karang sekalipun.

Masalah-malah yang dihadapi nelayan yaitu Ukuran kapal kecil sehingga daerah jangkauan terbatas, Alat tangkap masih sangat tradisional, Es untuk mempertahankan kualitas ikan dibeli di desa (es buatan rumah tangga) sangat mudah mencair dibanding es balok, Rendahnya kapasitas tentang teknologi penangkapan ikan yang modern, Adanya pelepas uang/pemberi modal (sejenis rentenir) yang memperlakukan praktek-praktek eksploitasi menyebabkan kondisi kehidupan social ekonomi nelayan semakin termaginalkan.

Jenis MPA yang cenderung dipaksakan tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tanpa melihat kesesuaian ekologi juga menjadi awal kegagalan program ini. Aspek pemasaran juga seringkali dilupakan dan tidak dipersiapkan dengan baik. Seringkali program MPA yang telah diberikan dapat diproduksi oleh masyarakat, namun tidak bisa dipasarkan. Terakhir, yang sering kali menjadi masalah adalah perencanaan, implementasi, pendampingan, dan pengawasan yang masih sangat sektoral. Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten, misalnya, hanya memberikan MPA tanpa mempertimbangkan karakters sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berujung pada kondisi program yang gagal dan tidak berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di lokasi penelitian, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan informal yang intensif, meluas, dan kontinyu. Materi yang diberikan dalam pelatihan harus holistik, mulai dari membuka pandangan/wawasan sampai ke hal-hal yang praktis dan detail. Pelatihan harus lebih banyak dilakukan di lapangan dan langsung praktek, seperti model sekolah lapang.

2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan manfaat terumbu karang, padang lamun, dan mangrove secara intensif, meluas, kontinyu, holistik. Sama dengan pelatihan pada nomor 1, peningkatan pengetahuan dan pemahaman ini juga harus lebih banyak dilakukan di lapangan dan langsung praktek, seperti model sekolah lapang. Proses ini juga harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam ketiga ekosistem tersebut, termasuk nelayan luar, penduduk “atas”, pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan kejaksaan.
3. Penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam menjaga, mengawasi, dan menindak setiap kegiatan yang merusak ketiga ekosistem tersebut, termasuk pengawasan internal di semua lembaga dan aparat penegak hukum untuk menghilangkan oknum-oknum yang justru menjadi pelindung para pelaku pengrusakan.
4. Program MPA (atau apapun namanya) sangat penting dilakukan. Namun, harus dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Program MPA harus berbasiskan karakteristik sosial-budaya, kebutuhan penduduk/rumah tangga, dan kesesuaian ekologi. Peningkatan kapasitas penduduk/rumah tangga sebagai penerima manfaat serta pendamping dan pelaksana program harus dilakukan sebelum pelaksanaan program dimulai. Pendamping harus tinggal menetap di desa selama program dilaksanakan. Pendamping juga harus menjadi penghubung antara masyarakat, LPSTK, dan pemerintah. Jaminan pemasaran juga menjadi hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan dan harus disiapkan sebelum pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Buton. 2016. Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka.
BPS Kabupaten Buton.

BPS Kabupaten Buton. 2016. Kecamatan Siompu Dalam Angka. BPS
Kabupaten Buton.

BPS Kabupaten Buton. 2016. Kecamatan Siompu Barat Dalam Angka.
BPS Kabupaten Buton.

Laporan Akhir Dokumen Awal RZWP-3-K Kabupaten Buton Selatan.
2015. PT. Bennatin Surya Cipta. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. FGD (Nelayan dan Tokoh Masyarakat) Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat.



Lampiran 2. FGD (Ibu-Ibu Rumah Tangga) Desa Lalole Kecamatan Siompu Barat



Lampiran 3. FGD Desa Tongali (Nelayan dan Tokoh Masyarakat)
Kecamatan Siompu



Lampiran 4. FGD (Ibu

Rumah
Tangga)
Tongali
Kecamatan

Desa
Siompu



